



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perlu disusun secara tepat sasaran, tertib dan taat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang disusun berdasarkan Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, dan/atau Standar Teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan belanja dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
15. Harga satuan adalah harga atau nilai yang ditetapkan untuk satu unit atau satuan tertentu dari suatu barang atau jasa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SHS berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran SHS Kabupaten Dharmasraya berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 3

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan;
  - d. satuan biaya pemeliharaan;
  - e. satuan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
  - f. satuan biaya pakaian;

- g. satuan biaya honorarium Non ASN dan jasa;
  - h. satuan biaya lembur;
  - i. satuan biaya sewa ;
  - j. satuan biaya jasa konsultasi;
  - k. satuan biaya iuran kesehatan dan asuransi;
  - l. satuan biaya barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - m. satuan biaya hadiah perlombaan
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Apabila terdapat SHS yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini atau terjadi perubahan harga pasar, maka dilakukan pemutakhiran berdasarkan :
- a. usulan SKPD;
  - b. perubahan kebijakan; dan/atau
  - c. perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim penyusun terhadap usulan SKPD.
- (3) Usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui sekretaris daerah dengan melampirkan kajian atas usulan tersebut.
- (4) Sekretaris Daerah dan Tim Penyusun memberikan rekomendasi menerima/menolak kepada bupati atas usulan SKPD.
- (5) Pemutakhiran terhadap lampiran Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Pada saat pelaksanaan anggaran, tetap berpedoman pada harga satuan yang berlaku dan/atau harga pasar dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu dan mendesak, pada saat pelaksanaan anggaran, dimana harga pasar melebihi standar harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan anggaran didasarkan pada harga pasar dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (3).
- (3) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari PA/KPA dengan dilampiri dokumen pendukung terkait harga pasar yang digunakan.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

Pengendalian terhadap Pelaksanaan SHS dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan SHS dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

Pasal 8

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 31 Oktober 2024



Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHAMASRAYA,



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMSRAYA TAHUN 2024 NOMOR : 19

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA YANG  
BERFUNGSI SEBAGAI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Standar harga satuan yang disusun berdasarkan standar harga satuan regional dan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan (SHS) berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:
  1. Satuan biaya honorarium;
  2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
- b. Satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawabanyang terdiri atas:
  1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
  2. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam negeri;
  3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
  4. Satuan biaya pemeliharaan

1.1 Satuan Biaya Honorarium

1.1.1 Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada setiap Satuan Kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan menjumlahkan atas pagu dana yang dikelola pada DPA tersebut.

2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
3. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - a. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - 1) KPA tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - 2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - b. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - c. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - 1) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - 2) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
4. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan.
5. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

#### 1.1.1.1 Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

1. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
3. Apabila Pengguna Anggaran tidak melimpahkan kewenangannya atau sebagian kewenangan sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA dan KPA.
4. Bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka honorarium/ jasa dibayarkan berdasarkan selisih dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dilimpahkan.
5. Bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan seluruh kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka honorarium/ jasa sesuai tabel diatas tidak dapat dibayarkan.
6. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. PA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya menerima honor sebagai PA dan dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi/Komisi Teknis (Komtek) sesuai bidang tugas

- pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
    - a. menyusun RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD;
    - b. menyusun DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
    - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
    - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - h. menandatangani SPM;
    - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
    - m. menetapkan perencanaan pengadaan;
    - n. menetapkan dan mengumumkan RUP;
    - o. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
    - p. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
    - q. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
    - r. menetapkan Pejabat Pengadaan;
    - s. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
    - t. menetapkan Tim Teknis;
    - u. menetapkan Tim/ Juri untuk pelaksanaan melalui sayembara/ Kontes;
    - v. menyatakan tender gagal/ Seleksi gagal;
    - w. menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan;
    - x. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - y. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
    - z. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
    - â. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya juga sebagai pengguna barang yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
  10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  11. Dalam hal PA berhalangan tetap atau sementara, Bupati menunjuk pejabat perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.1.1.2 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan:

- a. besaran jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan yang dikelola adalah sebesar sama dan/atau diatas 3 (tiga) miliar kecuali Sekretariat Daerah KPA per Bagian;
  - b. lokasi;
  - c. rentang kendali.
2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan terhadap SKPD yang membentuk unit pelaksana teknis dinas;
3. Pelimpahan kewenangan kepada KPA meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA;
5. Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas juga sebagai Kuasa Pengguna Barang yaitu kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
7. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa, KPA dapat bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen hanya menerima honor sebagai KPA dan dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi/Komisi Teknis (Komtek) sesuai bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan seseuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. KPA pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus;
  - b. menyusun DPA-Unit organisasi bersifat khusus;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
  - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

- j. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - k. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA mengambil alih pelimpahan yang telah diserahkan kepada KPA;
  12. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah dapat berjumlah 1 (satu) orang atau lebih sesuai kebutuhan dan kewajaran, untuk SKPD.

#### 1.1.1.3 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Kriteria penetapan PPTK meliputi:
  - a. pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku PA atau satu tingkat dibawah KPA dalam hal terdapat pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA;
  - b. memiliki kemampuan manajerial;
  - c. berintegritas; dan
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
3. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang meliputi :
  - a. memiliki kemampuan manajerial;
  - b. berintegritas; dan
  - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
4. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
5. PNS yang menduduki jabatan PPTK merupakan pejabat satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA, dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Struktural dan/atau Fungsional satu tingkat di bawah KPA dan memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
6. PPTK dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
7. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD, yang terdiri dari:
    - 1) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
    - 2) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan; dan
    - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan kepada PA/KPA.
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan yang terdiri dari :
    - 1) menyiapkan laporan Kinerja pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;

- 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - 3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan.
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
- d. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA, dengan batasan :
- 1) PPTK pada SKPD bertanggungjawab kepada PA; dan
  - 2) PPTK pada unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- e. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK;
- f. PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

#### 1.1.1.4 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Barang.

Kepala SKPD selaku PA/KPA menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD dan SKPKD, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD menetapkan pejabat Sekretaris/Kepala Tata Usaha pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), apabila tidak ada maka kepala SKPD dapat menunjuk Pejabat Eselon III atau Pejabat Eselon IV yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.
2. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
3. PPK dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
4. Dalam hal PPK SKPD berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA mengambil alih mandat dan menunjuk PPK SKPD pengganti.
5. PPK-SKPD dalam melaksanakan tugasnya juga sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yaitu Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
6. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD
  - f. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas

- pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan; dan
- h. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
7. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen.

#### 1.1.1.5 Honorarium Bendahara Pengeluaran

1. Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
2. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPUP, SPP GU, SPP TU, dan SPPLS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
  - i. memeriksa kas secara periodik;
  - j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - l. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - m. pelaksanaan anggaran pengeluaran Pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
3. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
4. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
5. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA;
6. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
7. Bendahara pengeluaran dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
8. Bendahara Pengeluaran dilarang :
  - a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan

- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 9. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.1.1.6 Honorarium Bendahara Penerimaan.

1. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
2. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang :
  - a. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
  - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
  - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah.
3. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
4. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
5. Bendahara penerimaan dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola.
6. Bendahara Penerimaan dilarang :
  - a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
  - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Dalam hal Bendahara Penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.1.1.7 Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. besaran anggaran;
  - b. rentang kendali; dan/atau
  - c. lokasi.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS;
  - b. menerima, menyimpan dan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
  - i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - j. memeriksa kas secara periodik;
  - k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan
4. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
  5. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas Pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  6. Bendahara pengeluaran pembantu dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola tidak termasuk besaran gaji pokok dan tunjangan.
  7. Bendahara Pengeluaran pembantu dilarang :
    - a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
    - b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
    - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 1.1.1.8 Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu
1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
  2. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
  3. Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu meliputi :
    - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
    - b. meminta bukti transaksi atas Pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
    - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
    - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan

- jumlah yang telah ditetapkan;
  - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
  - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah.
4. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
  5. Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara fungsional yakni membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
  6. Bendahara penerimaan pembantu dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola.
  7. Bendahara Penerimaan pembantu dilarang :
    - a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
    - a. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
    - b. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 1.1.1.9 Honorarium Kuasa BUD

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
2. Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang Daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
  - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
  - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
3. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan Anggaran Kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji Anggaran Kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
  - b. melakukan penyisihan Piutang tidak tertagih dalam mengelola Piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
4. Kuasa BUD dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola.

5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
6. Dalam hal kuasa BUD berhalangan tetap atau sementara paling lama 3 (tiga) hari, BUD bertugas mengambil alih kewenangan yang telah diserahkan kepada kuasa BUD.

1.1.1.10 Honorarium Bendahara BOSP

Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dapat dibantu oleh Bendahara BOSP pada tiap tiap Sekolah SD/SMP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bendahara BOSP SD/SMP dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Belanja Bos dalam rangka pelaksanaan APBD.
2. Bendahara BOSP SD/SMP ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.
3. Bendahara BOSP SD/SMP dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel dibawah ini dengan perhitungan jumlah besaran anggaran yang dikelola.
4. Bendahara BOSP SD/SMP bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

| 5.1.02.02.01.0080 |   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |               |                    |
|-------------------|---|---|---------------|--------------------|
| No                | Komponen  | Spesifikasi   | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang             | Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta                      | Orang / Bulan | 700.000            |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta              | Orang / Bulan | 800.000            |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar         | Orang / Bulan | 900.000            |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar       | Orang / Bulan | 1.000.000          |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar           | Orang / Bulan | 1.100.000          |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar            | Orang / Bulan | 1.200.000          |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar       | Orang / Bulan | 1.300.000          |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 25 - Rp 50 Milyar               | Orang / Bulan | 1.500.000          |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar                       | Orang / Bulan | 2.500.000          |
| 2.                | Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang | Anggaran Dikelola s.d Rp. 500 juta                      | Orang / Bulan | 550.000            |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar         | Orang / Bulan | 650.000            |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar       | Orang / Bulan | 750.000            |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar           | Orang / Bulan | 850.000            |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar            | Orang / Bulan | 1.000.000          |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar       | Orang / Bulan | 1.300.000          |
|                   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar                    | Orang / Bulan | 1.500.000          |
|                   |   |   |               |                    |

| No | Komponen  | Spesifikasi                                       | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
|----|---|---|---------------|--------------------|
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar                 | Orang / Bulan | 2.000.000          |
| 3. | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Barang | Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta                | Orang / Bulan | 350.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta        | Orang / Bulan | 400.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar   | Orang / Bulan | 500.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar | Orang / Bulan | 600.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar     | Orang / Bulan | 700.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar      | Orang / Bulan | 800.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar | Orang / Bulan | 900.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar              | Orang / Bulan | 1.000.000          |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar                 | Orang / Bulan | 1.500.000          |
| 4. | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                     | Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta                | Orang / Bulan | 400.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta        | Orang / Bulan | 500.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar   | Orang / Bulan | 600.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar | Orang / Bulan | 700.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar     | Orang / Bulan | 800.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar      | Orang / Bulan | 900.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar | Orang / Bulan | 1.000.000          |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar              | Orang / Bulan | 1.200.000          |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar                 | Orang / Bulan | 1.500.000          |
| 5. | Honorarium Bendahara Pengeluaran  | Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta                | Orang / Bulan | 340.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta        | Orang / Bulan | 400.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar   | Orang / Bulan | 500.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar | Orang / Bulan | 600.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar     | Orang / Bulan | 700.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar      | Orang / Bulan | 800.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar | Orang / Bulan | 900.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar              | Orang / Bulan | 1.000.000          |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar                 | Orang / Bulan | 1.500.000          |
| 6. | Honorarium  | Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta                | Orang /       | 200.000            |

| No | Komponen  | Spesifikasi                                       | Satuan                             | Besaran Harga (Rp) |
|----|---|---|------------------------------------|--------------------|
|    | Bendahara Penerima                                |   | Bulan                              |                    |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta        | Orang / Bulan                      | 250.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar   | Orang / Bulan                      | 300.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar | Orang / Bulan                      | 400.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar     | Orang / Bulan                      | 500.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar      | Orang / Bulan                      | 600.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar | Orang / Bulan                      | 700.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 25 - 50 Milyar            | Orang / Bulan                      | 800.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar                 | Orang / Bulan                      | 1.000.000          |
| 7. |   | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu         | Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta | Orang / Bulan      |
|    | Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta        |   | Orang / Bulan                      | 250.000            |
|    | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar   |   | Orang / Bulan                      | 300.000            |
|    | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar |   | Orang / Bulan                      | 350.000            |
|    | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar     |   | Orang / Bulan                      | 400.000            |
|    | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar      |   | Orang / Bulan                      | 450.000            |
|    | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar |   | Orang / Bulan                      | 500.000            |
|    | Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar              |   | Orang / Bulan                      | 550.000            |
|    | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar                 |   | Orang / Bulan                      | 750.000            |
| 8. | Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu          |   | Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta | Orang / Bulan      |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 500 juta        | Orang / Bulan                      | 250.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar   | Orang / Bulan                      | 300.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar | Orang / Bulan                      | 350.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar     | Orang / Bulan                      | 400.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - 10 Milyar      | Orang / Bulan                      | 450.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar | Orang / Bulan                      | 500.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 25 50 Milyar              | Orang / Bulan                      | 550.000            |
|    |   | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar                 | Orang / Bulan                      | 750.000            |
| 9. |   | Honorarium PPKD/Kuasa BUD                         | Honorarium PPKD                    | Orang / Bulan      |
|    | Honorarium Kuasa BUD                              |   | Orang / Bulan                      | 2.000.000          |

| No  | Komponen                       | Spesifikasi                      | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| 10. | Honorarium Bendahara BOS TK/SD | Bendaharan Bos TK                | Orang / Bulan | 250.000            |
|     |                                | Bendaharan Bos SD                | Orang / Bulan | 250.000            |
| 11. | Honorarium Bendahara BOS SMP   | Anggaran Dikelola < Rp. 500 Juta | Orang / Bulan | 250.000            |
|     |                                | Anggaran Dikelola ≥ Rp. 500 Juta | Orang / Bulan | 400.000            |

1.1.2 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan  
Biaya Jasa yang diberikan kepada Pengelolan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan merupakan kompensasi yang diberikan setiap bulan berdasarkan tugas yang diberikan terhadap pengelolan barang milik daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.1.2.1 Honorarium Pengurus Barang Pengelola

1. Biaya Jasa Pengurus Barang Pengelola Kabupaten adalah jasa yang diberikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
2. Pengurus Barang Pengelola diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.
3. Biaya Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengelola Kabupaten adalah jasa yang diberikan kepada Jabatan Struktural/ Fungsional di Bidang Pengelola Barang Milik Daerah yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang

1.1.2.2 Honorarium Pengurus Barang Pengguna

1. Biaya Jasa Pengurus Barang Pengguna adalah jasa yang diberikan kepada Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu/ Fungsional Umum pada SKPD yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
2. Pengurus Barang Pengguna diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.

1.1.2.3 Pembantu Pengurus Barang Pengguna

1. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah jasa yang diberikan kepada pegawai fungsional tertentu/fungsional umum pada SKPD, yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
2. Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.

1.1.2.4 Penyimpan Barang Pengguna

1. Penyimpan Barang Pengguna adalah jasa yang diberikan kepada pegawai fungsional tertentu/fungsional umum pada UPT Dinas Kesehatan, UPT SMP dan UPT. SD/TK/PAUD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
2. Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.

Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

| 5.1.02.02.01.0001 |                                   | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan |               |                    |
|-------------------|-----------------------------------|---|---------------|--------------------|
| No                | Komponen                          | Spesifikasi   | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Pengurus Barang Pengelola         | Pengurus Barang Pengelola                                       | Orang / Bulan | 850.000            |
|                   |                                   | Pembantu Pengurus Barang Pengelola                              | Orang / Bulan | 500.000            |
| 2.                | Pengurus Barang Pengguna          | Nilai Aset ≤ 5 miliar   | Orang / Bulan | 250.000            |
|                   |                                   | Nilai Aset > 5 miliar s.d 10 miliar                             | Orang / Bulan | 300.000            |
|                   |                                   | Nilai Aset > 10 miliar s.d 100 miliar                           | Orang / Bulan | 350.000            |
|                   |                                   | Nilai Aset > 100 miliar   | Orang / Bulan | 400.000            |
| 3.                | Pembantu Pengurus Barang Pengguna | Penyimpan Barang Pada OPD                                       | Orang / Bulan | 200.000            |
| 4.                | Penyimpan Barang Pengguna         | Pengurus Barang Pembantu Pada UPT pada Dinas Kesehatan          | Orang / Bulan | 250.000            |
|                   |                                   | Pengurus Barang Pembantu Pada UPT SMP                           | Orang / Bulan | 200.000            |
|                   |                                   | Pengurus Barang Pembantu Pada UPT SD                            | Orang / Bulan | 200.000            |
|                   |                                   | Pengurus Barang Pembantu Pada UPT TK/PAUD                       | Orang / Bulan | 200.000            |

### 1.1.3 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat atau kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

#### 1.1.3.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. Pejabat pengadaan barang/jasa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pada SKPD dan atau pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah,-) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah,-)
2. Biaya jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan honor bulanan sesuai tabel dibawah ini.
3. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

#### 1.1.3.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

1. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa (Kontruksi) diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian

pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/jasa (Kontruksi) yang bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan seleksi dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

2. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa (kontruksi) diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini.
3. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa (kontruksi) diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa (Kontruksi), jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
4. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa (Kontruksi) juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
5. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
6. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

#### 1.1.3.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi).

1. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) yang bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan seleksi dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
2. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini.
3. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi), jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
4. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan barang (Non Kontruksi) juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
5. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

6. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.
- 1.1.3.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
    1. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan seleksi dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
    2. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini.
    3. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya), jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
    4. Biaya jasa panitia atau kelompok kerja pengadaan barang/jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
    5. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa;
    6. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.
  - 1.1.3.5 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
    1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang memiliki sertifikat PBJ yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dan mengadakan dan menerapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
    2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
      - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
      - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
      - c. menetapkan spesifikasi teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK);
      - d. menetapkan rancangan kontrak;
      - e. menetankan HPS;
      - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
      - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - i. mengendalikan kontrak
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
3. Apabila tidak ada PPK, maka tugas PPK dapat dirangkap oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pendelegasian dari PA. Selain itu PA dan KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK.
  4. Pejabat Pembuat Komitmen PPK diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini.
  5. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan kepada pejabat untuk melaksanakan tugas menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Paket mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.

#### 1.1.3.6 Honorarium Tim Teknis

Honorarium Tim Teknis diberikan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai tim teknis untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang /jasa serta membantu pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan (Kontruksi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Tim Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Teknis diberikan honor per paket pekerjaan sesuai tabel dibawah ini adalah terhadap PA/KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Biaya jasa Pejabat/ Tim Teknis diberikan kepada seorang seorang Tim Teknis sebanyak 15 Paket Pekerjaan Kontruksi, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Paket mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.

| 5.1.02.02.01.0081 |   | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa          |               |                    |
|-------------------|---|---|---------------|--------------------|
| No.               | Komponen                                      | Spesifikasi                                       | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa      | Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi/Non Kontruksi) | Orang / bulan | 680.000            |
| 2.                | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan | Nilai Pagu> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta         | Orang / Paket | 750.000            |
|                   |   | Nilai Pagu> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar         | Orang / Paket | 1.020.000          |

| No.   | Komponen  | Spesifikasi                                     | Satuan  | Besaran Harga (Rp)                        |
|---|---|---|---|---|
|   | Barang/ Jasa (Konstruksi)   | Nilai Pagu> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar     | Orang / Paket   | 1.270.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar     | Orang / Paket   | 1.520.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar      | Orang / Paket   | 1.780.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar     | Orang / Paket   | 2.120.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar     | Orang / Paket   | 2.450.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar      | Orang / Paket   | 2.790.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu>Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar      | Orang / Paket   | 3.130.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 100 milyar                      | Orang / Paket   | 3.500.000                                 |
| 3.  | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | Nilai Pagu> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta       | Orang / Paket   | 760.000                                   |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar       | Orang / Paket   | 920.000                                   |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar     | Orang / Paket   | 1.140.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar     | Orang / Paket   | 1.370.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar      | Orang / Paket   | 1.600.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar     | Orang / Paket   | 1.910.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar     | Orang / Paket   | 2.210.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar      | Orang / Paket   | 2.520.000                                 |
|   |   | Nilai Pagu> Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar     | Orang / Paket   | 2.820.000                                 |
|   |   | 4.  | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya | Nilai Pagu> Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta |
| Nilai Pagu> Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta   | Orang / Paket   |   |   | 600.000                                   |
| Nilai Pagu> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar   | Orang / Paket   |   |   | 720.000                                   |
| Nilai Pagu> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar | Orang / Paket   |   |   | 910.000                                   |
| Nilai Pagu> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar | Orang / Paket   |   |   | 1.090.000                                 |
| Nilai Pagu> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar  | Orang / Paket   |   |   | 1.270.000                                 |
| Nilai Pagu> Rp.10 milyar s.d Rp. 25 milyar  | Orang / Paket   |   |   | 1.510.000                                 |
| Nilai Pagu> Rp.25 milyar s.d Rp. 50 milyar  | Orang / Paket   |   |   | 1.750.000                                 |
| Nilai Pagu > Rp. 50 milyar                  | Orang / Paket   |   |   | 1.990.000                                 |
| 5.  | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)   |   |   | Anggaran Dikelola s.d Rp. 100 juta        |
|   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 100 - Rp. 250 juta      | Orang / Paket   | 600.000                                   |
|   |   | Anggaran Dikelola > Rp. 250 juta - Rp. 500 juta | Orang / Paket   | 700.000                                   |

| No. | Komponen              | Spesifikasi                                      | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
|-----|-----------------------|--|---------------|--------------------|
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar  | Orang / Paket | 800.000            |
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 1 Milyar - 2,5 Milyar    | Orang / Paket | 950.000            |
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar    | Orang / Paket | 1.100.000          |
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 5 Milyar - Rp. 10 Milyar | Orang / Paket | 1.200.000          |
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 10 Milyar - 25 Milyar    | Orang / Paket | 1.400.000          |
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 25 Milyar - 50 Milyar    | Orang / Paket | 1.600.000          |
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 50 Milyar - 75 Milyar    | Orang / Paket | 1.800.000          |
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 75 Milyar - 100 Milyar   | Orang / Paket | 2.000.000          |
|     |                       | Anggaran Dikelola > Rp. 100 Milyar - 250 Milyar  | Orang / Paket | 2.200.000          |
|     |                       | Anggaran Dikelola diatas Rp. 250 Milyar          | Orang / Paket | 2.500.000          |
| 6.  | Honorarium Tim Teknis | Nilai Pagu s.d Rp. 200 juta                      | Orang / Paket | 300.000            |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta        | Orang / Paket | 400.000            |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar        | Orang / Paket | 600.000            |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar      | Orang / Paket | 800.000            |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar      | Orang / Paket | 1.000.000          |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar       | Orang / Paket | 1.100.000          |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar      | Orang / Paket | 1.200.000          |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar      | Orang / Paket | 1.300.000          |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar       | Orang / Paket | 1.500.000          |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar      | Orang / Paket | 1.700.000          |
|     |                       | Nilai Pagu> Rp.100 milyar s.d Rp. 250 milyar     | Orang / Paket | 2.000.000          |

1.1.4 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

- a. Biaya Jasa untuk Perangkat UKPBJ merupakan kompensasi untuk Tim dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim dan Sekretariat LPSE berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab sekretariat ULP/LPSE dan ketersediaan anggaran.
- b. Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- c. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

| 5.1.02.02.01.0082 |   | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) |               |                    |
|-------------------|---|---|---------------|--------------------|
| No.               | Komponen  | Spesifikasi   | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) | Kepala  | Orang / Bulan | 1.000.000          |
|                   |   | Sekretaris/ Staf Pendukung  | Orang / Bulan | 800.000            |

1.1.5 Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas.

1.1.5.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion (FGD)*, dan kegiatan sejenisnya (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. Narasumber berasal dari:
  - a. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - b. Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
3. Dalam hal narasumber tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa narasumber/ pembahas.

1.1.5.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

1. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
2. Moderator berasal dari luar/ dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.1.5.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium Pembawa Acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas

memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/atau masyarakat.

1.1.5.4 Honorarium Panitia

Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dengan bersaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.1.5.5 Honorarium Pemimpin Lagu

Honorarium Pemimpin Lagu yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam satu kali kegiatan yang bukan merupakan panitia dan atau peserta, honorarium dalam hal pada kegiatan tersebut mendapatkan perjalanan dinas dapat memilih salah satu;

1.1.5.6 Honorarium Pembaca Doa

Honorarium Pembaca Doa yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam satu kali kegiatan yang bukan merupakan panitia dan atau peserta, honorarium dalam hal pada kegiatan tersebut mendapatkan perjalanan dinas dapat memilih salah satu;

1.1.5.7 Honorarium Pembacaan Kalam Ilahi

Honorarium Pembacaan Kalam Ilahi yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam satu kali kegiatan yang bukan merupakan panitia dan atau peserta, honorarium dalam hal pada kegiatan tersebut mendapatkan perjalanan dinas dapat memilih salah satu

1.1.5.8 Honorarium Pembacaan Saritilawah

Honorarium Pembacaan Saritilawah yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam satu kali kegiatan yang bukan merupakan panitia dan atau peserta, honorarium dalam hal pada kegiatan tersebut mendapatkan perjalanan dinas dapat memilih salah satu

|                   |  |
|-------------------|--|
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|-------------------|--|

| No. | Komponen | Spesifikasi | Satuan | Besaran Harga (Rp) |
|-----|----------|-------------|--------|--------------------|
|-----|----------|-------------|--------|--------------------|

| No. | Komponen                            | Spesifikasi   | Satuan           | Besaran Harga (Rp) |
|-----|-------------------------------------|---|------------------|--------------------|
| 1.  | Honorarium Narasumber Atau Pembahas | Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya                     | Orang / Jam      | 1.700.000          |
|     |                                     | Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah Lainnya yang disetarakan  | Orang / Jam      | 1.400.000          |
|     |                                     | Pejabat Eselon I/ yang disetarakan                                      | Orang / Jam      | 1.200.000          |
|     |                                     | Pejabat Eselon II/ yang disetarakan                                     | Orang / Jam      | 1.000.000          |
|     |                                     | Pejabat Eselon III dibawah/ yang disetarakan                            | Orang / Jam      | 900.000            |
| 2.  | Honorarium Moderator                | Moderator Nasional/Provinsi   | Orang / Kegiatan | 700.000            |
|     |                                     | Moderator Kabupaten Kota  | Orang / Kegiatan | 300.000            |
| 3.  | Honorarium Pembawa Acara            | Pembawa Acara Nasional/Provinsi   | Orang / Kegiatan | 400.000            |
|     |                                     | Pembawa Acara Kabupaten   | Orang / Kegiatan | 150.000            |
| 4.  | Honorarium Panitia                  | Penanggung Jawab  | Orang / Kegiatan | 450.000            |
|     |                                     | Ketua/ Wakil Ketua  | Orang / Kegiatan | 400.000            |
|     |                                     | Sekretaris  | Orang / Kegiatan | 300.000            |
|     |                                     | Anggota   | Orang / Kegiatan | 300.000            |
| 5.  | Honorarium Pemimpin lagu            | Honorarium Pemimpin lagu  | Orang / Kegiatan | 100.000            |
| 6.  | Honorarium Pembaca Doa              | Honorarium Pembaca Doa  | Orang / Kegiatan | 100.000            |
| 7.  | Honorarium Pembacaan Kalam Ilahi    | Pembaca Kalam Ilahi   | Orang / Kegiatan | 100.000            |
| 8.  | Honorarium Pembacaan Saritilawah    | Pembaca Saritilawah   | Orang / Kegiatan | 100.000            |
| 9.  | Honorarium Fasilitator              | Fasilitator Pertemuan Rapat Koordinasi Stunting Tingkat Kab/kota        | Orang / Kegiatan | 1.500.000          |
| 10. | Honorarium Fasilitator              | Pertemuan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan                              | Orang / Kegiatan | 410.000            |
| 11. | Honorarium Fasilitator              | Pertemuan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Lini Lapangan | Orang / Kegiatan | 600.000            |
| 12. | Honorarium Fasilitator              | Sosialisasi Pelayanan Satyagatra  | Orang / Kegiatan | 300.000            |
| 13. | Honorarium Pembawa Acara/Instruktur | Instruktur Senam Luar Kabupaten   | Orang / Kegiatan | 750.000            |
| 14. | Honorarium Pembawa Acara/Instruktur | Instruktur Senam Dalam Kabupaten  | Orang / Kegiatan | 500.000            |

1.1.5.9 Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator Dan Pembawa Acara Profesional

1. Narasumber, moderator atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) adalah yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya.
2. Jasa honorarium Narasumber, moderator atau pembawa acara professional diberikan sesuai tabel dibawah ini.
3. Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, moderator dan pembawa acara professional (Pakar, Praktisi atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara ad cost).

| 5.1.02.02.01.0003 |  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |                  |                    |
|-------------------|--|--|------------------|--------------------|
| No.               | Komponen   | Spesifikasi  | Satuan           | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional | Honorarium Narasumber  | Orang / Jam      | 1.700.000          |
|                   |  | Honorarium Moderator   | Orang / Kegiatan | 1.000.000          |
|                   |  | Honorarium Pembawa Acara   | Ornag / Kegiatan | 750.000            |

1.1.6 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaanya berasal dari lintas satuan perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan   | Klasifikasi |    |     |
|----|---|-------------|----|-----|
|    |   | I           | II | III |
| 1. | Pejabat Eselon II                                   | 2           | 3  | 4   |
| 2. | Pejabat Eselon III                                  | 3           | 4  | 5   |
| 3. | Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional | 5           | 6  | 7   |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Untuk Kabupaten Dharmasraya masuk Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, diberikan honor paling banyak untuk Pejabat Eselon II sebanyak 3 kegiatan, Eselon III sebanyak 4 kegiatan dan Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 6 kegiatan.

1.1.6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
  - b. antar satuan perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
3. untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati yang keanggotaannya antar satuan perangkat daerah besaran honorarium setara dengan Tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
4. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
5. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari hari; dan
6. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien

#### 1.1.6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

| 5.1.02.02.01.0004 |  | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |               |                    |
|-------------------|--|--|---------------|--------------------|
| No.               | Komponen   | Spesifikasi  | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati            | Pengarah   | Orang / Bulan | 1.500.000          |
|                   |  | Penanggung Jawab   | Orang / Bulan | 1.250.000          |
|                   |  | Ketua  | Orang / Bulan | 1.000.000          |
|                   |  | Wakil Ketua  | Orang / Bulan | 850.000            |
|                   |  | Sekretaris   | Orang / Bulan | 750.000            |
|                   |  | Anggota  | Orang / Bulan | 750.000            |
|                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | Pengarah   | Orang / Bulan | 750.000            |
|                   |  | Penanggung Jawab   | Orang / Bulan | 700.000            |
|                   |  | Ketua  | Orang / Bulan | 650.000            |
|                   |  | Wakil Ketua  | Orang / Bulan | 600.000            |
|                   |  | Sekretaris   | Orang / Bulan | 500.000            |
|                   |  | Anggota  | Orang / Bulan | 500.000            |
| 2.                | Honorarium   | Ketua/ Wakil Ketua   | Orang / Bulan | 250.000            |

| No. | Komponen   | Spesifikasi | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
|-----|--|-------------|---------------|--------------------|
|     | Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Bupati dan Sekretaris Daerah | Anggota     | Orang / Bulan | 220.000            |

1.1.7 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli dan Beracara

1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
2. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

| 5.1.02.02.01.0005 |   | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara |                  |                    |
|-------------------|---|--|------------------|--------------------|
| No                | Komponen                                      | Spesifikasi  | Satuan           | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli | Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli                          | Orang / Kegiatan | 1.800.000          |
| 2.                | Honorarium beracara                           | Beracara   | Orang / Kegiatan | 1.800.000          |
| 3.                | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi      | Psikolog Klinis  | Orang / Kali     | 200.000            |

1.1.8 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Satuan biaya belanja honorarium Penyuluh/ Pendamping merupakan satuan biaya untuk jasa tenaga penyuluh atau pendamping untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD terhadap Pendampingan/ Pembinaan/ Penyuluhan/ Pelayanan/ Pendataan/ Pengawasan/ Pendistribusian/ Pemungutan dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh kepala SKPD terkait.

| 5.1.02.02.01.0006 |   | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan |               |                    |
|-------------------|---|---|---------------|--------------------|
| No                | Komponen                                | Spesifikasi                             | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | SLTA                                    | Orang / Bulan | 2.100.000          |
|                   |   | DI/DII/DIII/Sarjana Terapan             | Orang / Bulan | 2.400.000          |
|                   |   | Sarjana (S1)                            | Orang / Bulan | 2.600.000          |
|                   |   | Master (S2)                             | Orang / Bulan | 2.800.000          |
|                   |   | Doktor (S3)                             | Orang / Bulan | 3.000.000          |

1.1.9 Honorarium Rohaniwan

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

| 5.1.02.02.01.0007 |                      | Honorarium Rohaniwan        |               |                    |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| No                | Komponen             | Spesifikasi                 | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Rohaniwan | Pengambil Sumpah<br>Jabatan | Orang / Bulan | 300.000            |

1.1.10 Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

1.1.10.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Per *Reciew* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.1.10.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah beris warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.1.10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.1.10.4 Honorarium Penulis Artikel

Honorarium Penulis Artikel Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Website diberikan kepada seseorang yang memberikan kontribusi dalam penulisan artikel pada Jurnal/ Buletin/ Majalah/ Website.

| 5.1.02.02.01.0008 |                                  | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website |               |                    |
|-------------------|----------------------------------|---|---------------|--------------------|
| No                | Komponen                         | Spesifikasi   | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal | Penanggung Jawab  | Orang/ terbit | 500.000            |
|                   |                                  | Redaktur  | Orang/ terbit | 400.000            |
|                   |                                  | Penyuting/Editor  | Orang/ terbit | 250.000            |
|                   |                                  | Desain Grafis   | Orang/ terbit | 180.000            |
|                   |                                  | Fotografer  | Orang/ terbit | 180.000            |
|                   |                                  | Sekretariat   | Orang/ terbit | 150.000            |
| 2.                | Honorarium Penyusunan Tim        | Penanggung Jawab  | Orang/ terbit | 400.000            |
|                   |                                  | Redaktur  | Orang/ terbit | 300.000            |

| No | Komponen   | Spesifikasi                               | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
|----|--|---|---------------|--------------------|
|    | Buletin/Majalah  | Penyunting/Editor                         | Orang/ terbit | 250.000            |
|    |  | Desain Grafis                             | Orang/ terbit | 180.000            |
|    |  | Fotografer                                | Orang/ terbit | 180.000            |
|    |  | Sekretariat                               | Orang/ terbit | 150.000            |
| 3. | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website | Penanggung Jawab                          | Orang / Bulan | 500.000            |
|    |  | Redaktur                                  | Orang / Bulan | 450.000            |
|    |  | Editor                                    | Orang / Bulan | 400.000            |
|    |  | Web Admin                                 | Orang / Bulan | 350.000            |
|    |  | Web Developer                             | Orang / Bulan | 300.000            |
| 4. | Honorarium Penulis Artikel                                     | Penulis Artikel Jurnal                    | Per Halaman   | 200.000            |
|    |  | Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website | Per Halaman   | 100.000            |

#### 1.1.11 Honorarium Penyelenggara Ujian

Jasa penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

| 5.1.02.02.01.0009 |   | Honorarium Penyelenggara Ujian    |                    |                    |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| No.               | Komponen  | Spesifikasi                       | Satuan             | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar | Penyusun atau pembuat Bahan Ujian | Naskah / Pelajaran | 150.000            |
|                   |   | Pengawas Ujian                    | Orang / Hari       | 240.000            |
|                   |   | Pemeriksa Hasil Ujian             | Siswa / Mata Ujian | 5.000              |

#### 1.1.12 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Jasa Penulisan Butir Soal dan Jasa telaah butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

| 5.1.02.02.01.0010 |  | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota |  |  |
|-------------------|--|---|--|--|
|-------------------|--|---|--|--|

| No. | Komponen   | Spesifikasi           | Satuan         | Besaran Harga (Rp) |
|-----|--|-----------------------|----------------|--------------------|
| 1.  | Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten | Penyusunan Butir Soal | Per Butir Soal | 100.000            |
| 2.  | Honorarium Telaahn Butir Soal Tingkat Kabupaten    | Telaah Materi Soal    | Per Butir Soal | 45.000             |
|     |  | Telaah Bahasa Soal    | Per Butir Soal | 20.000             |

#### 1.1.13 Honorarium Penyelenggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

##### 1.1.13.1 Honorarium Penceramah

Honorarium Pencaramah dapat diberikan kepada Pencaramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau *sharing experience* sesuai

dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat
- b) Berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c) Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% dari honorarium penceramah

#### 1.1.13.2 Honorarium Pengajar berasal dari luar SKPD

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Kerja Penyelenggara

#### 1.1.13.3 Honorarium Pengajar berasal dari dalam SKPD

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik dari Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.1.13.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50 (lima puluh persen).

#### 1.1.13.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan peserta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e) Jam pelajaran yang digunakan penyelenggaraan pendidikan dan 45 (empat puluh lima) menit.

| 5.1.02.02.01.0011 |   | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan |                       |                    |
|-------------------|---|--|-----------------------|--------------------|
| No                | Komponen  | Spesifikasi  | Satuan                | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)             | Honorarium Penceramah  | Orang / Jam Pelajaran | 1.000.000          |
|                   |   | Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara           | Orang / Jam Pelajaran | 300.000            |
|                   |   | Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara          | Orang / Jam Pelajaran | 200.000            |
|                   |   | Honorarium Penyusun Modul Diklat                             | Per modul             | 5.000.000          |
| 2.                | Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d 5 hari         | Penanggung Jawab   | Orang / Kegiatan      | 450.000            |
|                   |   | Ketua/ Wakil Ketua   | Orang / Kegiatan      | 400.000            |
|                   |   | Sekretaris   | Orang / Kegiatan      | 300.000            |
|                   |   | Anggota  | Orang / Kegiatan      | 300.000            |
| 3.                | Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat Lama Diklat 6 s.d 30 hari      | Penanggung Jawab   | Orang / Kegiatan      | 675.000            |
|                   |   | Ketua/ Wakil Ketua   | Orang / Kegiatan      | 600.000            |
|                   |   | Sekretaris   | Orang / Kegiatan      | 450.000            |
|                   |   | Anggota  | Orang / Kegiatan      | 450.000            |
| 4.                | Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat Lama Diklat lebih dari 30 hari | Penanggung Jawab   | Orang / Kegiatan      | 900.000            |
|                   |   | Ketua/ Wakil Ketua   | Orang / Kegiatan      | 800.000            |
|                   |   | Sekretaris   | Orang / Kegiatan      | 600.000            |
|                   |   | Anggota  | Orang / Kegiatan      | 600.000            |

#### 1.1.14 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 orang.

| 5.1.02.02.01.0012 |  | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah |               |                    |
|-------------------|--|---|---------------|--------------------|
| No.               | Komponen                                   | Spesifikasi                               | Satuan        | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah  | Pembina                                   | Orang / Bulan | 3.500.000          |
|                   |  | Pengarah                                  | Orang / Bulan | 3.000.000          |
|                   |  | Ketua                                     | Orang / Bulan | 2.500.000          |
|                   |  | Wakil Ketua                               | Orang / Bulan | 2.000.000          |
|                   |  | Sekretaris                                | Orang / Bulan | 1.500.000          |
|                   |  | Anggota                                   | Orang / Bulan | 1.300.000          |
| 2.                | Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | Ketua                                     | Orang / Bulan | 1.000.000          |
|                   |  | Sekretaris                                | Orang / Bulan | 900.000            |
|                   |  | Anggota                                   | Orang / Bulan | 600.000            |

1.2 Satuan Biaya Perjalanan Dalam Negeri

1.2.1 Biaya Perjalanan Dinas Biasa

A. Umum

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
2. Perjalanan dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. pengumandahan (detasering);
  - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma /S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
3. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
4. Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
  - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota yang meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota.
5. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. uang representasi perjalanan dinas, dan
  - e. sewa kendaraan dalam kota.
6. Tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disetarakan dengan biaya perjalanan dinas

Bupati, sedangkan tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan pejabat Eselon II.

7. Perjalanan dinas Istri Bupati/ Ketua Penggerak PKK, Istri Wakil Bupati/ Ketua GOW, Istri Pimpinan dan Anggota DPRD dan Ketua Dharma Wanita dalam rangka pelaksanaan penunjang tugas suami atau penunjang program kegiatan Pemerintah disetarakan dengan pejabat Eselon III/ Golongan IV;
  8. Perjalanan dinas Pimpinan Organisasi/Lembaga yang berbadan hukum (Ketua LKAAM, Ketua KNPI, Ketua MUI, Ketua KONI, Ketua KORMI, Wali Nagari, Ketua Bamus, Ketua Organisasi Lain serta wartawan dalam rangka penunjang program kegiatan Pemerintah Daerah dan sejenis disetarakan dengan pejabat Eselon IV/ Golongan III;
  9. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala Jorong, Perangkat Nagari, Anggota Bamus, Pengurus Organisasi beserta anggota organisasi kemasyarakatan dalam rangka penunjang program kegiatan pemerintah daerah disetarakan dengan pejabat golongan II;
  10. Ajudan/Sespri Bupati, Ajudan/Sespri Wakil Bupati, Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat menginap di hotel yang sama dengan biaya akomodasi disetarakan dengan pejabat Eselon III;
  11. Patwal yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati diberikan Uang Harian dan Akomodasi sesuai dengan golongan kepegawaiannya;
- B. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan:
  - a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
    - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD belum terbentuk atau berhalangan tetap atau sementara dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
    - 3) Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Staf Ahli atau yang disetarakan, lintas SKPD dan Pihak Lain surat tugasnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    - 4) Pejabat Eselon III ke bawah pada Perangkat Daerah surat tugasnya ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - b. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
    - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD belum terbentuk atau berhalangan tetap atau sementara dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
    - 3) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain surat tugasnya ditandatangani oleh Bupati.

- 4) Sopir yang mengantarkan pejabat ke Bandara luar daerah luar provinsi surat tugasnya di tanda tangani Kepala Perangkat Daerah.
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
4. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
7. Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
8. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Dokumen Pengeluaran riil yang sah seperti tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Biaya Taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
  - e. Biaya Transportasi Darat (One Way) dan/atau biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi, dalam hal biaya transportasi Darat (One Way) dan/atau biaya transportasi dalam perjalanan dinas tidak ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini.
  - f. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk komponen uang harian dan uang representasi perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pihak Lain;
  - g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota sudah termasuk jasa supir dan BBM selama pelaksanaan perjalanan dinas berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), digunakan untuk Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan Kendaraan Dinas Jabatan dan tidak bisa digunakan untuk diklat;
  - h. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan; dan
  - i. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
9. Perjalanan Dinas ASN atau Non ASN yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas, disesuaikan dengan agenda kegiatan Bupati/DPRD
  10. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi atau luar daerah luar provinsi yang dilakukan atas inisiatif pejabat atau perangkat daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal Eselon III atau Jabatan Fungsional Muda dan dapat mengikut sertakan Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan/atau Staf/ Non ASN, kecuali dalam hal keadaan tertentu dapat dilaksanakan oleh Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional;

11. Bagi ASN yang menduduki jabatan pelaksana tugas (Plt) dapat menggunakan standar perjalanan dinas sesuai dengan jabatan yang ditugaskan/diembannya dengan mencantumkan jabatan tersebut pada surat tugas;
12. Masyarakat yang ditugaskan pemerintah daerah untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan biaya perjalanan dinas dibebankan kepada Perangkat Daerah teknis yang memiliki fungsi terkait;
13. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikat waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
  - b. perjalanan dinas dengan jarak tempuh diatas 100 km s.d 250 km diberikan waktu perjalanan dinas 2 (dua) hari;
  - c. perjalanan dinas dengan jarak tempuh diatas 250 km diberikan waktu perjalanan dinas 3 (tiga) hari;
14. Perjalanan dinas dalam rangka melakukan *sharing* informasi/studi banding dan/atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari untuk satu kabupaten tujuan dan paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) daerah kabupaten tujuan, khusus ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari;
15. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Pemerintah Pusat diberikan selama 4 (empat) hari perjalanan pergi pulang (PP) kecuali dalam keadaan khusus dan/atau kondisi tertentu dengan menggunakan transportasi darat dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
16. Biaya Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, teknis fungsional, bimbingan teknis, lokakarya, sosialisasi yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan dan/atau dengan membayar kontribusi diberikan uang harian dan uang transportasi dengan ketentuan:
  - a. Uang Harian diberikan 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan;
  - b. Uang harian selama pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, teknis fungsional, bimbingan teknis, lokakarya, sosialisasi diberikan sebesar standar biaya diklat;
17. Biaya Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, teknis fungsional, bimbingan teknis, lokakarya, sosialisasi yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah yang akomodasi dan konsumsinya tidak ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan diberikan uang harian dibayarkan 100%;
18. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi darat paling lama 5 (lima) hari dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Selama 3 (tiga) hari untuk jarak tempuh 250 km;
  - b. Selama 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan dengan untuk jarak tempuh diatas 250 km s.d 500 km;
  - c. Selama 5 (lima) hari minimal 2 (dua) tempat tujuan atau lebih untuk jarak tempuh diatas 500 km;
19. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sopir mengantar/menjemput Pejabat ke Bandar Udara Internasional Minangkabau, Bandar Udara Sutan Syarif Kasim II Pekan Baru dan Bandar Udara Muaro Bungo dibayarkan 1 (satu) hari perjalanan dinas kecuali dalam kondisi

tertentu seperti macet dalam perjalanan akibat bencana tanah longsor, kecelakaan mobil, pembangunan jalan, dll yang mengakibatkan macet dalam perjalanan lebih 3 jam dapat dibayarkan 2 (dua) hari perjalanan dengan melampirkan Surat Pernyataan yang diketahui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

20. Penandatanganan Visum SPPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh sopir dalam rangka mengantar dan menjemput pejabat ke Bandar Udara ditanda tangani oleh PT. Angkasa Pura dan/atau Biro Umum/ Bagian Umum Sekretariat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota setempat;
21. Apabila hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, akomodasi, uang representasi dan transportasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian.
22. Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang diterima;
23. Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama;
24. Rincian jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada DPA SKPD merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan APBD rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas;
25. Format SPPD dan Kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 8 tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran
2. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil) berdasarkan tabel Satuan biaya tiket pesawat.
3. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

#### Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Biasa

1. Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi diberikan kepada ASN/Non ASN dan pihak lain dalam rangka menghadiri kegiatan Bimtek, Sosialisasi, FGD dan sejenis;
2. Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi digunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan pihak lain.
3. Biaya transportasi bagi Bupati, DPRD, ASN, Non ASN dan pihak lain dibayarkan secara riil (at cost).
4. Jika bukti pembayaran biaya transportasi dalam dalam perjalanan dinas tidak ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Uang Representasi Perjalanan Dinas

1. Uang Representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang

melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

2. Uang Representasi Perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *Lumpsum*;
3. Pembayaran uang representasi diberikan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

#### Biaya Taksi dari Bandara ke Tempat Tujuan

1. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
  - a. Keberangkatan
    - 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
    - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan ke tempat tujuan;
  - b. Kepulangan
    - 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
    - 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Pembiayaan satuan biaya taksi yang dilaksanakan melebihi besaran standar biaya bisa dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost);
3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandar udara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost);
4. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban pengeluaran riil (at cost).
5. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
6. Untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan secara rombongan minimal 3 (tiga) orang dan menggunakan jalur darat dapat menggunakan kendaraan sewa kendaraan resmi dengan biaya riil (at cost) dimana sewa kendaraan tersebut telah termasuk biaya bahan bakar dan sopir serta biaya toll dan kapal penyebrangan dan biaya taksi tidak dibayarkan lagi;
7. Dalam hal pelaku perjalanan dinas menggunakan kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada angka 6, kepada pelaku perjalanan dinas tidak beri biaya taksi perjalanan dinas.

#### Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi yang sama (One Way)

1. Satuan Biaya Transportasi darat dari Ibu kota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibu Kota Provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi;

2. Satuan biaya transportasi darat dari Ibu kota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way atau sekali jalan) dibayarkan sesuai pembayaran riil (at cost) dengan melampirkan tiket pembayaran;
3. Jika bukti pembayaran biaya transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (One Way) dalam perjalanan dinas tidak ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

1.2.1.1 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

1.2.1.1.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

| 5.1.02.04.01.0001 |  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |              |                    |
|-------------------|--|---|--------------|--------------------|
| No.               | Komponen   | Spesifikasi   | Satuan       | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi    | Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD   | orang / hari | 380.000            |
|                   |  | Pejabat Eselon IIA  | orang / hari | 375.000            |
|                   |  | Pejabat Eselon IIB/Anggota DPRD /Forkopimda                                   | orang / hari | 370.000            |
|                   |  | Pejabat Eselon III/ Gol. IV   | orang / hari | 360.000            |
|                   |  | Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI                            | orang / hari | 350.000            |
|                   |  | Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII  | orang / hari | 250.000            |
|                   |  | PTT/ Non ASN/ Sopir   | orang / hari | 200.000            |
|                   |  | Diklat ASN  | orang / hari | 110.000            |
| 2.                | Uang Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi | Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD   | orang / hari | 5.236.000          |
|                   |  | Pejabat Eselon IIA  | orang / hari | 3.332.000          |
|                   |  | Pejabat Eselon IIB/Anggota DPRD/Forkopimda                                    | orang / hari | 3.150.000          |
|                   |  | Pejabat Eselon III/ Gol. IV   | orang / hari | 1.353.000          |
|                   |  | Pejabat Eselon IV/ Gol. III, II, I, PPPK Gol I s.d IX, PTT/ Non ASN dan Sopir | orang / hari | 650.000            |
|                   |  |   |              |                    |

1.2.1.1.2 Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi

| .No | Uraian                                       | Komponen                            | Satuan       | Besaran Nilai (Rp.) |
|-----|--|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1.  | Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota | Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD | orang / hari | 250.000             |
|     |  | Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD     | orang / hari | 150.000             |

1.2.1.1.3 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

| No. | Kota Asal     | Kota Tujuan     | Satuan       | Besaran Harga (Rp) |
|-----|---------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 1   | Pulau Punjung | Muaro Sijunjung | orang / kali | 100.000            |
|     |               | Sawahlunto      | orang / kali | 125.000            |
|     |               | Solok           | orang / kali | 150.000            |
|     |               | Aro Suka        | orang / kali | 150.000            |
|     |               | Padang          | orang / kali | 175.000            |
|     |               | Bukit Tinggi    | orang / kali | 175.000            |
|     |               | Padang Panjang  | orang / kali | 150.000            |

| No. | Kota Asal | Kota Tujuan    | Satuan       | Besaran Harga (Rp) |
|-----|-----------|----------------|--------------|--------------------|
|     |           | Batu Sangkar   | orang / kali | 150.000            |
|     |           | Painan         | orang / kali | 250.000            |
|     |           | Payakumbuh     | orang / kali | 200.000            |
|     |           | Pariaman / BIM | orang / kali | 200.000            |
|     |           | Lubuk Basung   | orang / kali | 250.000            |
|     |           | Lubuk Sikaping | orang / kali | 250.000            |
|     |           | Simpang Empat  | orang / kali | 300.000            |
|     |           | Padang Aro     | orang / kali | 250.000            |

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

| No | Daerah        |                           | Satuan       | Besaran (Rp) |
|----|---------------|---------------------------|--------------|--------------|
|    | Asal          | Tujuan                    |              |              |
| 1  | Pulau Punjung | Kab. Mandailing Natal     | Orang / Kali | 404.000      |
| 2  |               | Kota Pekanbaru            | Orang / Kali | 200.000      |
| 3  |               | Kota Dumai                | Orang / Kali | 390.000      |
| 4  |               | Kab. Indra Giri Hilir     | Orang / Kali | 330.000      |
| 5  |               | Kab. Indra Giri Hulu      | Orang / Kali | 246.000      |
| 6  |               | Kab. Bengkalis            | Orang / Kali | 389.000      |
| 7  |               | Kab. Kampar               | Orang / Kali | 285.000      |
| 8  |               | Kab. Kuantan Singingi     | Orang / Kali | 85.000       |
| 9  |               | Kab. Pelalawan            | Orang / Kali | 290.000      |
| 10 |               | Kab. Rokan Hilir          | Orang / Kali | 478.000      |
| 11 |               | Kab. Rokan Hulu           | Orang / Kali | 373.000      |
| 12 |               | Kab. Siak                 | Orang / Kali | 400.000      |
| 13 |               | Kota Jambi                | Orang / Kali | 352.000      |
| 14 |               | Kota Sungai Penuh         | Orang / Kali | 221.000      |
| 15 |               | Kab. Batang Hari          | Orang / Kali | 297.000      |
| 16 |               | Kab. Bungo                | Orang / Kali | 112.000      |
| 17 |               | Kab. Kerinci              | Orang / Kali | 205.000      |
| 18 |               | Kab. Merangin             | Orang / Kali | 183.000      |
| 19 |               | Kab. Muaro Jambi          | Orang / Kali | 369.000      |
| 20 |               | Kab. Sarolangun           | Orang / Kali | 262.000      |
| 21 |               | Kab. Tanjung Jabung barat | Orang / Kali | 456.000      |
| 22 |               | Kab. Tanjung Jabung Timur | Orang / Kali | 406.000      |
| 23 |               | Kab. Tebo                 | Orang / Kali | 126.000      |
| 24 |               | Kota Bengkulu             | Orang / Kali | 510.000      |
| 25 |               | Kab. Bengkulu Selatan     | Orang / Kali | 627.000      |
| 26 |               | Kab. Bengkulu Tengah      | Orang / Kali | 495.000      |
| 27 |               | Kab. Bengkulu Utara       | Orang / Kali | 562.000      |
| 28 |               | Kab. Kaur                 | Orang / Kali | 700.000      |
| 29 |               | Kab. Kapahiang            | Orang / Kali | 471.000      |
| 30 |               | Kab. Lebong               | Orang / Kali | 530.000      |
| 31 |               | Kab. Mukomuko             | Orang / Kali | 334.000      |
| 32 |               | Kab. Rejang Lebong        | Orang / Kali | 450.000      |
| 33 |               | Kab. Seluma               | Orang / Kali | 551.000      |
| 34 |               | Kab. Banyuasin            | Orang / Kali | 535.000      |
| 35 |               | Kab. Empat Lawang         | Orang / Kali | 467.000      |
| 36 |               | Kab. Lahat                | Orang / Kali | 540.000      |
| 37 |               | Kab. Muara Enim           | Orang / Kali | 582.000      |
| 38 |               | Kab. Musi Banyuasin       | Orang / Kali | 477.000      |
| 39 |               | Kab. Musi Rawas           | Orang / Kali | 408.000      |
| 40 |               | Kab. Musi Rawas Utara     | Orang / Kali | 325.000      |

| No | Daerah |                                  | Satuan       | Besaran (Rp) |
|----|--------|----------------------------------|--------------|--------------|
|    | Asal   | Tujuan                           |              |              |
| 41 |        | Kab. Ogan Ilir                   | Orang / Kali | 684.000      |
| 42 |        | Kab. Ogan Komering Ilir          | Orang / Kali | 637.000      |
| 43 |        | Kab. Ogan Komering Ulu           | Orang / Kali | 743.000      |
| 44 |        | Kab. Selat Ogan Komering Ulu Sel | Orang / Kali | 777.000      |
| 45 |        | Kab. Timur Ogan Komering Ulu Tim | Orang / Kali | 743.000      |
| 46 |        | Kab. Penukal Abab Pematang Ilir  | Orang / Kali | 589.000      |
| 47 |        | Kota lubuk linggau               | Orang / Kali | 399.000      |
| 48 |        | Kota Palembang                   | Orang / Kali | 581.000      |
| 49 |        | Kota Pagar Alam                  | Orang / Kali | 559.000      |
| 50 |        | Kota Prabumulih                  | Orang / Kali | 613.000      |
| 51 |        | Kota Bandar Lampung              | Orang / Kali | 994.000      |
| 52 |        | Kota Metro                       | Orang / Kali | 868.000      |
| 53 |        | Kab. lampung Barat               | Orang / Kali | 847.000      |
| 54 |        | Kab. lampung Selatan             | Orang / Kali | 940.000      |
| 55 |        | Kab. lampung Tengah              | Orang / Kali | 831.000      |
| 56 |        | Kab. lampung Timur               | Orang / Kali | 874.000      |
| 57 |        | Kab. lampung Utara               | Orang / Kali | 861.000      |
| 58 |        | Kab. Mesuji                      | Orang / Kali | 767.000      |
| 59 |        | Kab. Pesawaran                   | Orang / Kali | 895.000      |
| 60 |        | Kab. Pesisir Barat               | Orang / Kali | 819.000      |
| 61 |        | Kab. Pringsewu                   | Orang / Kali | 893.000      |
| 62 |        | Kab. Tanggamus                   | Orang / Kali | 954.000      |
| 63 |        | Kab. Tulang Bawang               | Orang / Kali | 784.000      |
| 64 |        | Kab. Tulang Bawang Barat         | Orang / Kali | 784.000      |
| 65 |        | Kab. Way Kanan                   | Orang / Kali | 779.000      |

1.2.1.2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

1.2.1.2.1 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Rp.)

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|-------------------|--------------------------------|

| No | Provinsi         | Satuan       | Luar Daerah  |                                      |  |   |                              |         |
|----|------------------|--------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|---------|
|    |                  |              | Bupati/<br>Wakil<br>Bupati/<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon<br>II/<br>Forkopi<br>mda | Pejabat<br>Eselon<br>III/ Gol.<br>IV | Pejabat<br>Eselon<br>IV/ Gol.<br>III dan<br>PPPK<br>Gol IX<br>s.d XI | Gol I/<br>Gol II<br>dan<br>PPPK<br>Gol I s.d<br>VII | PTT/<br>Non<br>ASN/<br>Sopir | Diklat  |
| 1  | 2                | 3            | 4  | 5                                    | 6  | 7   | 8                            | 9       |
| 1. | Aceh             | Orang / hari | 360.000  | 350.000                              | 340.000  | 300.000   | 260.000                      | 110.000 |
| 2. | Sumatera Utara   | Orang / hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 310.000   | 270.000                      | 110.000 |
| 3. | Riau             | Orang / hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 310.000   | 270.000                      | 110.000 |
| 4. | Kepulauan Riau   | Orang / hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 310.000   | 270.000                      | 110.000 |
| 5. | Jambi            | Orang / hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 310.000   | 270.000                      | 110.000 |
| 6. | Sumatera Selatan | Orang / hari | 380.000  | 370.000                              | 360.000  | 320.000   | 310.000                      | 110.000 |

| No  | Provinsi                  | Satuan          | Luar Daerah  |                                      |  |   |                              |         |
|-----|---------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|---------|
|     |                           |                 | Bupati/<br>Wakil<br>Bupati/<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon<br>II/<br>Forkopi<br>mda | Pejabat<br>Eselon<br>III/ Gol.<br>IV | Pejabat<br>Eselon<br>IV/ Gol.<br>III dan<br>PPPK<br>Gol IX<br>s.d XI | Gol I/<br>Gol II<br>dan<br>PPPK<br>Gol I s.d<br>VII | PTT/<br>Non<br>ASN/<br>Sopir | Diklat  |
| 1   | 2                         | 3               | 4  | 5                                    | 6  | 7   | 8                            | 9       |
| 7.  | Lampung                   | Orang<br>/ hari | 380.000  | 370.000                              | 360.000  | 320.000   | 280.000                      | 110.000 |
| 8.  | Bengkulu                  | Orang<br>/ hari | 380.000  | 370.000                              | 360.000  | 320.000   | 280.000                      | 110.000 |
| 9.  | Bangka<br>Belitung        | Orang<br>/ hari | 410.000  | 400.000                              | 390.000  | 350.000   | 310.000                      | 120.000 |
| 10. | Banten                    | Orang<br>/ hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 310.000   | 270.000                      | 110.000 |
| 11. | Jawa Barat                | Orang<br>/ hari | 430.000  | 420.000                              | 410.000  | 400.000   | 360.000                      | 130.000 |
| 12. | D.K.I.<br>Jakarta         | Orang<br>/ hari | 530.000  | 520.000                              | 510.000  | 500.000   | 460.000                      | 160.000 |
| 13. | Jawa<br>Tengah            | Orang<br>/ hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 310.000   | 300.000                      | 110.000 |
| 14. | D.I.<br>Yogyakarta        | Orang<br>/ hari | 420.000  | 410.000                              | 400.000  | 390.000   | 350.000                      | 130.000 |
| 15. | Jawa Timur                | Orang<br>/ hari | 410.000  | 400.000                              | 390.000  | 380.000   | 340.000                      | 120.000 |
| 16. | Bali                      | Orang<br>/ hari | 480.000  | 470.000                              | 460.000  | 450.000   | 410.000                      | 140.000 |
| 17. | Nusa<br>Tenggara<br>Barat | Orang<br>/ hari | 440.000  | 420.000                              | 410.000  | 400.000   | 360.000                      | 130.000 |
| 18. | Nusa<br>Tenggara<br>Timur | Orang<br>/ hari | 430.000  | 420.000                              | 410.000  | 400.000   | 360.000                      | 130.000 |
| 19. | Kalimantan<br>Barat       | Orang<br>/ hari | 380.000  | 370.000                              | 360.000  | 350.000   | 310.000                      | 110.000 |
| 20. | Kalimantan<br>Tengah      | Orang<br>/ hari | 360.000  | 350.000                              | 340.000  | 330.000   | 290.000                      | 110.000 |
| 21. | Kalimantan<br>Selatan     | Orang<br>/ hari | 380.000  | 370.000                              | 360.000  | 350.000   | 310.000                      | 110.000 |
| 22. | Kalimantan<br>Timur       | Orang<br>/ hari | 430.000  | 420.000                              | 410.000  | 400.000   | 360.000                      | 130.000 |
| 23. | Kalimantan<br>Utara       | Orang<br>/ hari | 430.000  | 420.000                              | 410.000  | 400.000   | 360.000                      | 130.000 |
| 24. | Sulawesi<br>Utara         | Orang<br>/ hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 340.000   | 300.000                      | 110.000 |
| 25. | Gorontalo                 | Orang<br>/ hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 340.000   | 300.000                      | 110.000 |
| 26. | Sulawesi<br>Barat         | Orang<br>/ hari | 410.000  | 400.000                              | 390.000  | 380.000   | 340.000                      | 120.000 |
| 27. | Sulawesi<br>Selatan       | Orang<br>/ hari | 430.000  | 420.000                              | 410.000  | 400.000   | 360.000                      | 130.000 |
| 28. | Sulawesi<br>Tengah        | Orang<br>/ hari | 370.000  | 360.000                              | 350.000  | 340.000   | 300.000                      | 110.000 |
| 29. | Sulawesi<br>Tenggara      | Orang<br>/ hari | 380.000  | 370.000                              | 360.000  | 350.000   | 310.000                      | 110.000 |

| No  | Provinsi     | Satuan       | Luar Daerah  |                                      |  |   |                              |         |
|-----|--------------|--------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|---------|
|     |              |              | Bupati/<br>Wakil<br>Bupati/<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon<br>II/<br>Forkopi<br>mda | Pejabat<br>Eselon<br>III/ Gol.<br>IV | Pejabat<br>Eselon<br>IV/ Gol.<br>III dan<br>PPPK<br>Gol IX<br>s.d XI | Gol I/<br>Gol II<br>dan<br>PPPK<br>Gol I s.d<br>VII | PTT/<br>Non<br>ASN/<br>Sopir | Diklat  |
| 1   | 2            | 3            | 4  | 5                                    | 6  | 7   | 8                            | 9       |
| 30. | Maluku       | Orang / hari | 380.000  | 370.000                              | 360.000  | 350.000   | 310.000                      | 110.000 |
| 31. | Maluku Utara | Orang / hari | 430.000  | 420.000                              | 410.000  | 410.000   | 370.000                      | 130.000 |
| 32. | Papua        | Orang / hari | 580.000  | 570.000                              | 560.000  | 550.000   | 510.000                      | 170.000 |
| 33. | Papua Barat  | Orang / hari | 480.000  | 470.000                              | 460.000  | 450.000   | 410.000                      | 140.000 |

1.2.1.2.2 Uang Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

| No  | Provinsi            | Satuan       | Tarif Hotel   |   |                                      |  |
|-----|---------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|--|
|     |                     |              | Bupati/<br>Wakil<br>Bupati/<br>Pimpinan<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon I | Anggota<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon II/<br>Forkopimda | Pejabat<br>Eselon<br>III/ Gol.<br>IV | Pejabat Eselon<br>IV/ Gol. III, II,<br>I, PPPK Gol I<br>s.d IX, PTT/<br>Non ASN dan<br>Sopir |
| 1   | 2                   | 3            | 4   | 5   | 6                                    | 7  |
| 1.  | Aceh                | Orang / hari | 4.420.000   | 3.526.000   | 1.294.000                            | 556.000  |
| 2.  | Sumatera Utara      | Orang / hari | 4.960.000   | 1.518.000   | 1.100.000                            | 530.000  |
| 3.  | Riau                | Orang / hari | 3.820.000   | 3.119.000   | 1.650.000                            | 852.000  |
| 4.  | Kepulauan Riau      | Orang / hari | 4.275.000   | 1.854.000   | 1.037.000                            | 792.000  |
| 5.  | Jambi               | Orang / hari | 4.000.000   | 3.337.000   | 1.212.000                            | 580.580  |
| 6.  | Sumatera Selatan    | Orang / hari | 5.850.000   | 3.083.000   | 1.571.000                            | 861.000  |
| 7.  | Lampung             | Orang / hari | 4.491.000   | 2.067.000   | 1.140.000                            | 580.000  |
| 8.  | Bengkulu            | Orang / hari | 2.071.000   | 1.628.000   | 1.546.000                            | 630.000  |
| 9.  | Bangka Belitung     | Orang / hari | 3.887.000   | 2.838.000   | 1.957.000                            | 622.000  |
| 10. | Banten              | Orang / hari | 5.725.000   | 2.373.000   | 1.000.000                            | 718.718  |
| 11. | Jawa Barat          | Orang / hari | 5.381.000   | 2.755.000   | 1.006.000                            | 570.000  |
| 12. | D.K.I. Jakarta      | Orang / hari | 5.850.000   | 1.490.000   | 992.000                              | 730.000  |
| 13. | Jawa Tengah         | Orang / hari | 4.242.000   | 1.480.000   | 954.000                              | 600.600  |
| 14. | D.I. Yogyakarta     | Orang / hari | 5.017.000   | 2.695.000   | 1.384.000                            | 845.000  |
| 15. | Jawa Timur          | Orang / hari | 4.400.000   | 1.605.000   | 1.076.000                            | 664.000  |
| 16. | Bali                | Orang / hari | 4.890.000   | 1.946.000   | 910.000                              | 910.000  |
| 17. | Nusa Tenggara Barat | Orang / hari | 3.500.000   | 2.648.000   | 1.418.000                            | 580.000  |

| No  | Provinsi            | Tarif Hotel  |   |   |                                      |  |
|-----|---------------------|--------------|---|---|--------------------------------------|--|
|     |                     | Satuan       | Bupati/<br>Wakil<br>Bupati/<br>Pimpinan<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon I | Anggota<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon II/<br>Forkopimda | Pejabat<br>Eselon<br>III/ Gol.<br>IV | Pejabat Eselon<br>IV/ Gol. III, II,<br>I, PPPK Gol I<br>s.d IX, PTT/<br>Non ASN dan<br>Sopir |
| 1   | 2                   | 3            | 4   | 5   | 6                                    | 7  |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | Orang / hari | 3.000.000   | 1.493.000   | 1.355.000                            | 550.000  |
| 19. | Kalimantan Barat    | Orang / hari | 2.654.000   | 1.538.000   | 1.125.000                            | 538.000  |
| 20. | Kalimantan Tengah   | Orang / hari | 4.901.000   | 3.391.000   | 1.160.000                            | 659.000  |
| 21. | Kalimantan Selatan  | Orang / hari | 4.797.000   | 3.316.000   | 1.500.000                            | 540.000  |
| 22. | Kalimantan Timur    | Orang / hari | 4.000.000   | 2.188.000   | 1.507.000                            | 804.000  |
| 23. | Kalimantan Utara    | Orang / hari | 4.000.000   | 2.188.000   | 1.507.000                            | 804.000  |
| 24. | Sulawesi Utara      | Orang / hari | 4.919.000   | 2.290.000   | 924.000                              | 782.000  |
| 25. | Gorontalo           | Orang / hari | 4.168.000   | 2.549.000   | 1.431.000                            | 764.000  |
| 26. | Sulawesi Barat      | Orang / hari | 4.076.000   | 2.581.000   | 1.075.000                            | 704.704  |
| 27. | Sulawesi Selatan    | Orang / hari | 4.820.000   | 1.550.000   | 1.020.000                            | 732.000  |
| 28. | Sulawesi Tengah     | Orang / hari | 2.309.000   | 2.027.000   | 1.567.000                            | 951.000  |
| 29. | Sulawesi Tenggara   | Orang / hari | 2.475.000   | 2.059.000   | 1.297.000                            | 786.000  |
| 30. | Maluku              | Orang / hari | 3.467.000   | 3.240.000   | 1.048.000                            | 667.000  |
| 31. | Maluku Utara        | Orang / hari | 3.440.600   | 3.175.000   | 1.073.000                            | 600.000  |
| 32. | Papua               | Orang / hari | 3.859.000   | 3.318.000   | 2.521.000                            | 829.000  |
| 33. | Papua Barat         | Orang / hari | 3.872.000   | 3.212.000   | 2.056.000                            | 718.000  |

1.2.1.2.3 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (pp)

| No  | Kota    |                | Satuan | Satuan Biaya Tiket |           |
|-----|---------|----------------|--------|--------------------|-----------|
|     | Asal    | Tujuan         |        | Bisnis             | Ekonomi   |
| 1.  | Jakarta | Ambon          | PP     | 13.285.000         | 7.081.000 |
| 2.  | Jakarta | Balikpapan     | PP     | 7.412.000          | 3.797.000 |
| 3.  | Jakarta | Banda Aceh     | PP     | 7.519.000          | 4.492.000 |
| 4.  | Jakarta | Bandar Lampung | PP     | 2.407.000          | 1.583.000 |
| 5.  | Jakarta | Banjarmasin    | PP     | 5.252.000          | 2.995.000 |
| 6.  | Jakarta | Batam          | PP     | 4.867.000          | 2.888.000 |
| 7.  | Jakarta | Bengkulu       | PP     | 4.364.000          | 2.621.000 |
| 8.  | Jakarta | Biak           | PP     | 14.065.000         | 7.519.000 |
| 9.  | Jakarta | Denpasar       | PP     | 5.305.000          | 3.262.000 |
| 10. | Jakarta | Gorontalo      | PP     | 7.231.000          | 4.824.000 |
| 11. | Jakarta | Jambi          | PP     | 4.065.000          | 2.460.000 |

| No  | Kota       |                | Satuan | Satuan Biaya Tiket |            |
|-----|------------|----------------|--------|--------------------|------------|
|     | Asal       | Tujuan         |        | Bisnis             | Ekonomi    |
| 12. | Jakarta    | Jayapura       | PP     | 14.568.000         | 8.193.000  |
| 13. | Jakarta    | Yogyakarta     | PP     | 4.107.000          | 2.268.000  |
| 14. | Jakarta    | Kendari        | PP     | 7.658.000          | 4.182.000  |
| 15. | Jakarta    | Kupang         | PP     | 9.413.000          | 5.081.000  |
| 16. | Jakarta    | Makassar       | PP     | 7.444.000          | 3.829.000  |
| 17. | Jakarta    | Malang         | PP     | 4.599.000          | 2.695.000  |
| 18. | Jakarta    | Mamuju         | PP     | 7.295.000          | 4.867.000  |
| 19. | Jakarta    | Manado         | PP     | 10.824.000         | 5.102.000  |
| 20. | Jakarta    | Manokwari      | PP     | 16.226.000         | 10.824.000 |
| 21. | Jakarta    | Mataram        | PP     | 5.316.000          | 3.230.000  |
| 22. | Jakarta    | Medan          | PP     | 7.252.000          | 3.808.000  |
| 23. | Jakarta    | Muaro Bungo    | PP     | 5.530.000          | 3.000.000  |
| 24. | Jakarta    | Padang         | PP     | 5.530.000          | 2.952.000  |
| 25. | Jakarta    | Palangkaraya   | PP     | 4.984.000          | 2.984.000  |
| 26. | Jakarta    | Palembang      | PP     | 3.861.000          | 2.268.000  |
| 27. | Jakarta    | Palu           | PP     | 9.348.000          | 5.113.000  |
| 28. | Jakarta    | Pangkal Pinang | PP     | 3.412.000          | 2.139.000  |
| 29. | Jakarta    | Pekanbaru      | PP     | 5.583.000          | 3.016.000  |
| 30. | Jakarta    | Pontianak      | PP     | 4.353.000          | 2.781.000  |
| 31. | Jakarta    | Semarang       | PP     | 3.861.000          | 2.182.000  |
| 32. | Jakarta    | Solo           | PP     | 3.861.000          | 2.342.000  |
| 33. | Jakarta    | Surabaya       | PP     | 5.466.000          | 2.674.000  |
| 34. | Jakarta    | Ternate        | PP     | 10.001.000         | 6.664.000  |
| 35. | Jakarta    | Timika         | PP     | 13.830.000         | 7.487.000  |
| 36. | Jakarta    | Tanjung Selor  | PP     | 7.424.000          | 4.057.000  |
| 37. | Ambon      | Denpasar       | PP     | 8.054.000          | 4.471.000  |
| 38. | Ambon      | Jayapura       | PP     | 7.434.000          | 4.161.000  |
| 39. | Ambon      | Kendari        | PP     | 4.824.000          | 2.856.000  |
| 40. | Ambon      | Makassar       | PP     | 6.022.000          | 3.455.000  |
| 41. | Ambon      | Manokwari      | PP     | 5.177.000          | 3.027.000  |
| 42. | Ambon      | Palu           | PP     | 6.140.000          | 3.508.000  |
| 43. | Ambon      | Sorong         | PP     | 3.637.000          | 2.257.000  |
| 44. | Ambon      | Surabaya       | PP     | 8.803.000          | 4.845.000  |
| 45. | Ambon      | Ternate        | PP     | 4.022.000          | 2.449.000  |
| 46. | Balikpapan | Banda Aceh     | PP     | 12.739.000         | 6.749.000  |
| 47. | Balikpapan | Batam          | PP     | 10.354.000         | 5.305.000  |
| 48. | Balikpapan | Denpasar       | PP     | 10.739.000         | 5.648.000  |
| 49. | Balikpapan | Jayapura       | PP     | 19.071.000         | 10.086.000 |
| 50. | Balikpapan | Yogyakarta     | PP     | 9.669.000          | 4.749.000  |
| 51. | Balikpapan | Makassar       | PP     | 12.664.000         | 6.150.000  |
| 52. | Balikpapan | Manado         | PP     | 15.702.000         | 7.295.000  |
| 53. | Balikpapan | Medan          | PP     | 12.493.000         | 6.140.000  |
| 54. | Balikpapan | Padang         | PP     | 10.942.000         | 5.369.000  |
| 55. | Balikpapan | Palembang      | PP     | 9.445.000          | 4.749.000  |
| 56. | Balikpapan | Pekanbaru      | PP     | 10.996.000         | 5.423.000  |
| 57. | Balikpapan | Semarang       | PP     | 9.445.000          | 4.674.000  |
| 58. | Balikpapan | Solo           | PP     | 9.445.000          | 4.813.000  |
| 59. | Balikpapan | Surabaya       | PP     | 10.889.000         | 5.113.000  |
| 60. | Balikpapan | Timika         | PP     | 18.408.000         | 9.445.000  |
| 61. | Banda Aceh | Denpasar       | PP     | 10.835.000         | 6.279.000  |

| No   | Kota           |                | Satuan | Satuan Biaya Tiket |            |
|------|----------------|----------------|--------|--------------------|------------|
|      | Asal           | Tujuan         |        | Bisnis             | Ekonomi    |
| 62.  | Banda Aceh     | Jayapura       | PP     | 19.167.000         | 10.717.000 |
| 63.  | Banda Aceh     | Yogyakarta     | PP     | 9.765.000          | 5.380.000  |
| 64.  | Banda Aceh     | Makassar       | PP     | 12.760.000         | 6.781.000  |
| 65.  | Banda Aceh     | Manado         | PP     | 15.798.000         | 7.926.000  |
| 66.  | Banda Aceh     | Pontianak      | PP     | 9.990.000          | 5.840.000  |
| 67.  | Banda Aceh     | Semarang       | PP     | 9.530.000          | 5.305.000  |
| 68.  | Banda Aceh     | Solo           | PP     | 9.530.000          | 5.444.000  |
| 69.  | Banda Aceh     | Surabaya       | PP     | 10.985.000         | 5.744.000  |
| 70.  | Banda Aceh     | Timlka         | PP     | 18.504.000         | 10.076.000 |
| 71.  | Bandar Lampung | Balikpapan     | PP     | 8.129.000          | 4.129.000  |
| 72.  | Bandar Lampung | Banda Aceh     | PP     | 8.225.000          | 4.760.000  |
| 73.  | Bandar Lampung | Banjarmasin    | PP     | 6.193.000          | 3.412.000  |
| 74.  | Bandar Lampung | Batam          | PP     | 5.840.000          | 3.316.000  |
| 75.  | Bandar Lampung | Biak           | PP     | 14.119.000         | 7.487.000  |
| 76.  | Bandar Lampung | Denpasar       | PP     | 6.236.000          | 3.647.000  |
| 77.  | Bandar Lampung | Jayapura       | PP     | 14.568.000         | 8.097.000  |
| 78.  | Bandar Lampung | Yogyakarta     | PP     | 5.155.000          | 2.760.000  |
| 79.  | Bandar Lampung | Kendari        | PP     | 8.354.000          | 4.482.000  |
| 80.  | Bandar Lampung | Makassar       | PP     | 8.161.000          | 4.161.000  |
| 81.  | Bandar Lampung | Malang         | PP     | 5.594.000          | 3.134.000  |
| 82.  | Bandar Lampung | Manado         | PP     | 11.199.000         | 5.305.000  |
| 83.  | Bandar Lampung | Mataram        | PP     | 6.246.000          | 3.626.000  |
| 84.  | Bandar Lampung | Medan          | PP     | 7.979.000          | 4.150.000  |
| 85.  | Bandar Lampung | Padang         | PP     | 6.439.000          | 3.380.000  |
| 86.  | Bandar Lampung | Palangkaraya   | PP     | 5.947.000          | 3.401.000  |
| 87.  | Bandar Lampung | Palembang      | PP     | 4.931.000          | 2.760.000  |
| 88.  | Bandar Lampung | Pekanbaru      | PP     | 6.482.000          | 3.433.000  |
| 89.  | Bandar Lampung | Pontianak      | PP     | 5.380.000          | 3.220.000  |
| 90.  | Bandar Lampung | Semarang       | PP     | 4.931.000          | 2.685.000  |
| 91.  | Bandar Lampung | Solo           | PP     | 4.931.000          | 2.824.000  |
| 92.  | Bandar Lampung | Surabaya       | PP     | 6.386.000          | 3.123.000  |
| 93.  | Bandar Lampung | Timlka         | PP     | 13.905.000         | 7.455.000  |
| 94.  | Bandung        | Batam          | PP     | 6.289.000          | 3.583.000  |
| 95.  | Bandung        | Denpasar       | PP     | 5.626.000          | 3.252.000  |
| 96.  | Bandung        | Jambi          | PP     | 5.006.000          | 2.941.000  |
| 97.  | Bandung        | Yogyakarta     | PP     | 3.369.000          | 2.129.000  |
| 98.  | Bandung        | Padang         | PP     | 6.129.000          | 3.508.000  |
| 99.  | Bandung        | Palembang      | PP     | 4.385.000          | 2.631.000  |
| 100. | Bandung        | Pangkal Pinang | PP     | 4.599.000          | 2.738.000  |
| 101. | Bandung        | Pekanbaru      | PP     | 6.525.000          | 3.701.000  |
| 102. | Bandung        | Semarang       | PP     | 3.027.000          | 1.957.000  |
| 103. | Bandung        | Solo           | PP     | 3.647.000          | 2.268.000  |
| 104. | Bandung        | Surabaya       | PP     | 4.824.000          | 2.856.000  |
| 105. | Bandung        | Tanjung Pandan | PP     | 4.439.000          | 2.663.000  |
| 106. | Banjarmasin    | Banda Aceh     | PP     | 10.792.000         | 6.022.000  |
| 107. | Banjarmasin    | Batam          | PP     | 8.407.000          | 4.578.000  |
| 108. | Banjarmasin    | Biak           | PP     | 16.686.000         | 8.749.000  |
| 109. | Banjarmasin    | Denpasar       | PP     | 8.792.000          | 4.920.000  |
| 110. | Banjarmasin    | Jayapura       | PP     | 17.135.000         | 9.359.000  |
| 111. | Banjarmasin    | Yogyakarta     | PP     | 7.723.000          | 4.022.000  |

| No   | Kota        |              | Satuan | Satuan Biaya Tiket |            |
|------|-------------|--------------|--------|--------------------|------------|
|      | Asal        | Tujuan       |        | Bisnis             | Ekonomi    |
| 112. | Banjarmasin | Medan        | PP     | 10.546.000         | 5.412.000  |
| 113. | Banjarmasin | Padang       | PP     | 9.006.000          | 4.642.000  |
| 114. | Banjarmasin | Palembang    | PP     | 7.498.000          | 4.022.000  |
| 115. | Banjarmasin | Pekanbaru    | PP     | 9.049.000          | 4.696.000  |
| 116. | Banjarmasin | Semarang     | PP     | 7.498.000          | 3.958.000  |
| 117. | Banjarmasin | Solo         | PP     | 7.498.000          | 4.097.000  |
| 118. | Banjarmasin | Surabaya     | PP     | 8.942.000          | 4.385.000  |
| 119. | Banjarmasin | Timlka       | PP     | 16.472.000         | 8.717.000  |
| 120. | Batam       | Banda Aceh   | PP     | 10.439.000         | 5.936.000  |
| 121. | Batam       | Denpasar     | PP     | 8.450.000          | 4.824.000  |
| 122. | Batam       | Jayapura     | PP     | 16.782.000         | 9.263.000  |
| 123. | Batam       | Yogyakarta   | PP     | 7.370.000          | 3.936.000  |
| 124. | Batam       | Makassar     | PP     | 10.375.000         | 5.337.000  |
| 125. | Batam       | Manado       | PP     | 13.413.000         | 6.482.000  |
| 126. | Batam       | Medan        | PP     | 10.193.000         | 5.316.000  |
| 127. | Batam       | Padang       | PP     | 8.653.000          | 4.546.000  |
| 128. | Batam       | Palembang    | PP     | 7.145.000          | 3.936.000  |
| 129. | Batam       | Pekanbaru    | PP     | 8.707.000          | 4.599.000  |
| 130. | Batam       | Pontianak    | PP     | 7.594.000          | 4.396.000  |
| 131. | Batam       | Semarang     | PP     | 7.145.000          | 3.861.000  |
| 132. | Batam       | Solo         | PP     | 7.145.000          | 4.000.000  |
| 133. | Batam       | Surabaya     | PP     | 8.600.000          | 4.300.000  |
| 134. | Batam       | Timika       | PP     | 16.119.000         | 8.621.000  |
| 135. | Bengkulu    | Palembang    | PP     | 2.899.000          | 1.893.000  |
| 136. | Biak        | Balikpapan   | PP     | 18.622.000         | 9.477.000  |
| 137. | Biak        | Banda Aceh   | PP     | 18.718.000         | 10.108.000 |
| 138. | Biak        | Batam        | PP     | 16.333.000         | 8.664.000  |
| 139. | Biak        | Denpasar     | PP     | 16.729.000         | 8.995.000  |
| 140. | Biak        | Jayapura     | PP     | 3.615.000          | 2.321.000  |
| 141. | Biak        | Yogyakarta   | PP     | 15.648.000         | 8.108.000  |
| 142. | Biak        | Manado       | PP     | 11.734.000         | 6.353.000  |
| 143. | Biak        | Medan        | PP     | 18.472.000         | 9.498.000  |
| 144. | Biak        | Padang       | PP     | 16.932.000         | 8.728.000  |
| 145. | Biak        | Palembang    | PP     | 15.424.000         | 8.108.000  |
| 146. | Biak        | Pekanbaru    | PP     | 16.985.000         | 8.781.000  |
| 147. | Biak        | Pontianak    | PP     | 15.873.000         | 8.568.000  |
| 148. | Biak        | Surabaya     | PP     | 12.782.000         | 7.081.000  |
| 149. | Biak        | Timlka       | PP     | 5.808.000          | 3.444.000  |
| 150. | Denpasar    | Jayapura     | PP     | 11.680.000         | 6.845.000  |
| 151. | Denpasar    | Kupang       | PP     | 5.091.000          | 2.952.000  |
| 152. | Denpasar    | Makassar     | PP     | 4.182.000          | 2.631.000  |
| 153. | Denpasar    | Manado       | PP     | 7.851.000          | 4.278.000  |
| 154. | Denpasar    | Mataram      | PP     | 1.840.000          | 1.390.000  |
| 155. | Denpasar    | Medan        | PP     | 10.589.000         | 5.658.000  |
| 156. | Denpasar    | Padang       | PP     | 9.049.000          | 4.888.000  |
| 157. | Denpasar    | Palangkaraya | PP     | 8.557.000          | 4.909.000  |
| 158. | Denpasar    | Palembang    | PP     | 7.541.000          | 4.278.000  |
| 159. | Denpasar    | Pekanbaru    | PP     | 9.092.000          | 4.942.000  |
| 160. | Denpasar    | Pontianak    | PP     | 7.990.000          | 4.738.000  |
| 161. | Denpasar    | Timika       | PP     | 10.140.000         | 6.129.000  |

| No   | Kota       |              | Satuan | Satuan Biaya Tiket |            |
|------|------------|--------------|--------|--------------------|------------|
|      | Asal       | Tujuan       |        | Bisnis             | Ekonomi    |
| 162. | Jambi      | Balikpapan   | PP     | 7.733.000          | 4.407.000  |
| 163. | Jambi      | Banjarmasin  | PP     | 7.690.000          | 4.193.000  |
| 164. | Jambi      | Denpasar     | PP     | 7.733.000          | 4.439.000  |
| 165. | Jambi      | Yogyakarta   | PP     | 6.653.000          | 3.551.000  |
| 166. | Jambi      | Kupang       | PP     | 11.434.000         | 6.075.000  |
| 167. | Jambi      | Makassar     | PP     | 9.659.000          | 4.952.000  |
| 168. | Jambi      | Malang       | PP     | 7.091.000          | 3.925.000  |
| 169. | Jambi      | Manado       | PP     | 12.707.000         | 6.097.000  |
| 170. | Jambi      | Palangkaraya | PP     | 7.444.000          | 4.193.000  |
| 171. | Jambi      | Pontianak    | PP     | 6.878.000          | 4.011.000  |
| 172. | Jambi      | Semarang     | PP     | 6.428.000          | 3.476.000  |
| 173. | Jambi      | Solo         | PP     | 6.428.000          | 3.615.000  |
| 174. | Jambi      | Surabaya     | PP     | 7.883.000          | 3.915.000  |
| 175. | Jayapura   | Yogyakarta   | PP     | 13.274.000         | 7.690.000  |
| 176. | Jayapura   | Manado       | PP     | 22.109.000         | 11.263.000 |
| 177. | Jayapura   | Medan        | PP     | 18.932.000         | 10.097.000 |
| 178. | Jayapura   | Padang       | PP     | 17.381.000         | 9.327.000  |
| 179. | Jayapura   | Palembang    | PP     | 15.873.000         | 8.717.000  |
| 180. | Jayapura   | Pekanbaru    | PP     | 17.435.000         | 9.380.000  |
| 181. | Jayapura   | Pontianak    | PP     | 16.322.000         | 9.177.000  |
| 182. | Jayapura   | Timlka       | PP     | 3.615.000          | 2.289.000  |
| 183. | Yogyakarta | Denpasar     | PP     | 3.861.000          | 2.481.000  |
| 184. | Yogyakarta | Makassar     | PP     | 6.525.000          | 3.893.000  |
| 185. | Yogyakarta | Manado       | PP     | 10.536.000         | 5.722.000  |
| 186. | Yogyakarta | Medan        | PP     | 9.519.000          | 4.770.000  |
| 187. | Yogyakarta | Padang       | PP     | 7.969.000          | 4.000.000  |
| 188. | Yogyakarta | Palembang    | PP     | 6.460.000          | 3.380.000  |
| 189. | Yogyakarta | Pekanbaru    | PP     | 8.022.000          | 4.054.000  |
| 190. | Yogyakarta | Pontianak    | PP     | 6.910.000          | 3.840.000  |
| 191. | Yogyakarta | Timlka       | PP     | 11.894.000         | 7.038.000  |
| 192. | Kendari    | Banda Aceh   | PP     | 12.953.000         | 7.102.000  |
| 193. | Kendari    | Batam        | PP     | 10.568.000         | 5.658.000  |
| 194. | Kendari    | Denpasar     | PP     | 5.455.000          | 3.273.000  |
| 195. | Kendari    | Yogyakarta   | PP     | 8.129.000          | 4.706.000  |
| 196. | Kendari    | Padang       | PP     | 11.167.000         | 5.722.000  |
| 197. | Kendari    | Palembang    | PP     | 9.659.000          | 5.102.000  |
| 198. | Kendari    | Pekanbaru    | PP     | 11.220.000         | 5.776.000  |
| 199. | Kendari    | Semarang     | PP     | 9.659.000          | 5.027.000  |
| 200. | Kendari    | Solo         | PP     | 9.659.000          | 5.166.000  |
| 201. | Kendari    | Surabaya     | PP     | 11.103.000         | 5.466.000  |
| 202. | Kendari    | Timlka       | PP     | 18.633.000         | 9.798.000  |
| 203. | Kupang     | Jayapura     | PP     | 14.386.000         | 8.108.000  |
| 204. | Kupang     | Yogyakarta   | PP     | 7.348.000          | 4.182.000  |
| 205. | Kupang     | Makassar     | PP     | 7.637.000          | 4.311.000  |
| 206. | Kupang     | Manado       | PP     | 11.648.000         | 6.140.000  |
| 207. | Kupang     | Surabaya     | PP     | 6.749.000          | 3.722.000  |
| 208. | Makassar   | Biak         | PP     | 8.493.000          | 4.931.000  |
| 209. | Makassar   | Jayapura     | PP     | 10.193.000         | 5.787.000  |
| 210. | Makassar   | Kendari      | PP     | 2.663.000          | 1.786.000  |
| 211. | Makassar   | Manado       | PP     | 5.327.000          | 2.909.000  |

| No   | Kota     |              | Satuan | Satuan Biaya Tiket |           |
|------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
|      | Asal     | Tujuan       |        | Bisnis             | Ekonomi   |
| 212. | Makassar | Timlka       | PP     | 11.723.000         | 6.567.000 |
| 213. | Malang   | Balikpapan   | PP     | 10.108.000         | 5.134.000 |
| 214. | Malang   | Banda Aceh   | PP     | 10.204.000         | 5.765.000 |
| 215. | Malang   | Banjarmasin  | PP     | 8.161.000          | 4.407.000 |
| 216. | Malang   | Batam        | PP     | 7.819.000          | 4.311.000 |
| 217. | Malang   | Biak         | PP     | 16.087.000         | 8.482.000 |
| 218. | Malang   | Jayapura     | PP     | 16.536.000         | 9.092.000 |
| 219. | Malang   | Kendari      | PP     | 10.322.000         | 5.487.000 |
| 220. | Malang   | Makassar     | PP     | 10.129.000         | 5.166.000 |
| 221. | Malang   | Manado       | PP     | 13.167.000         | 6.311.000 |
| 222. | Malang   | Medan        | PP     | 9.958.000          | 5.145.000 |
| 223. | Malang   | Padang       | PP     | 8.418.000          | 4.385.000 |
| 224. | Malang   | Palangkaraya | PP     | 7.915.000          | 4.407.000 |
| 225. | Malang   | Palembang    | PP     | 6.899.000          | 3.765.000 |
| 226. | Malang   | Pekanbaru    | PP     | 8.461.000          | 4.439.000 |
| 227. | Malang   | Timlka       | PP     | 15.873.000         | 8.461.000 |
| 228. | Manado   | Medan        | PP     | 15.552.000         | 7.316.000 |
| 229. | Manado   | Padang       | PP     | 14.012.000         | 6.546.000 |
| 230. | Manado   | Palembang    | PP     | 12.504.000         | 5.926.000 |
| 231. | Manado   | Pekanbaru    | PP     | 14.055.000         | 6.599.000 |
| 232. | Manado   | Pontianak    | PP     | 12.953.000         | 6.396.000 |
| 233. | Manado   | Semarang     | PP     | 12.504.000         | 5.851.000 |
| 234. | Manado   | Solo         | PP     | 12.504.000         | 5.990.000 |
| 235. | Manado   | Surabaya     | PP     | 9.937.000          | 5.262.000 |
| 236. | Manado   | Timlka       | PP     | 16.183.000         | 8.995.000 |
| 237. | Mataram  | Balikpapan   | PP     | 10.750.000         | 5.615.000 |
| 238. | Mataram  | Banda Aceh   | PP     | 10.846.000         | 6.246.000 |
| 239. | Mataram  | Banjarmasin  | PP     | 8.803.000          | 4.888.000 |
| 240. | Mataram  | Batam        | PP     | 8.461.000          | 4.803.000 |
| 241. | Mataram  | Biak         | PP     | 11.552.000         | 6.546.000 |
| 242. | Mataram  | Jayapura     | PP     | 13.092.000         | 7.327.000 |
| 243. | Mataram  | Yogyakarta   | PP     | 4.417.000          | 2.781.000 |
| 244. | Mataram  | Makassar     | PP     | 4.717.000          | 2.909.000 |
| 245. | Mataram  | Manado       | PP     | 8.717.000          | 4.738.000 |
| 246. | Mataram  | Medan        | PP     | 10.600.000         | 5.637.000 |
| 247. | Mataram  | Padang       | PP     | 9.060.000          | 4.867.000 |
| 248. | Mataram  | Palembang    | PP     | 7.551.000          | 4.246.000 |
| 249. | Mataram  | Pekanbaru    | PP     | 9.102.000          | 4.909.000 |
| 250. | Mataram  | Pontianak    | PP     | 8.001.000          | 4.706.000 |
| 251. | Mataram  | Surabaya     | PP     | 3.829.000          | 2.321.000 |
| 252. | Medan    | Banda Aceh   | PP     | 3.466.000          | 2.193.000 |
| 253. | Medan    | Makassar     | PP     | 12.514.000         | 6.172.000 |
| 254. | Medan    | Pontianak    | PP     | 9.733.000          | 5.230.000 |
| 255. | Medan    | Semarang     | PP     | 9.284.000          | 4.696.000 |
| 256. | Medan    | Solo         | PP     | 9.284.000          | 4.835.000 |
| 257. | Medan    | Surabaya     | PP     | 10.739.000         | 5.134.000 |
| 258. | Medan    | Timika       | PP     | 18.258.000         | 9.455.000 |
| 259. | Padang   | Makassar     | PP     | 10.974.000         | 5.402.000 |
| 260. | Padang   | Pontianak    | PP     | 8.193.000          | 4.460.000 |
| 261. | Padang   | Semarang     | PP     | 7.744.000          | 3.925.000 |

| No   | Kota           |             | Satuan | Satuan Biaya Tiket |           |
|------|----------------|-------------|--------|--------------------|-----------|
|      | Asal           | Tujuan      |        | Bisnis             | Ekonomi   |
| 262. | Padang         | Solo        | PP     | 7.744.000          | 4.065.000 |
| 263. | Padang         | Surabaya    | PP     | 9.199.000          | 4.364.000 |
| 264. | Padang         | Timika      | PP     | 16.718.000         | 8.685.000 |
| 265. | Palangkaraya   | Banda Aceh  | PP     | 10.546.000         | 6.022.000 |
| 266. | Palangkaraya   | Batam       | PP     | 8.161.000          | 4.578.000 |
| 267. | Palangkaraya   | Yogyakarta  | PP     | 7.477.000          | 4.022.000 |
| 268. | Palangkaraya   | Mataram     | PP     | 8.557.000          | 4.888.000 |
| 269. | Palangkaraya   | Medan       | PP     | 10.300.000         | 5.412.000 |
| 270. | Palangkaraya   | Padang      | PP     | 8.760.000          | 4.642.000 |
| 271. | Palangkaraya   | Palembang   | PP     | 7.252.000          | 4.022.000 |
| 272. | Palangkaraya   | Pekanbaru   | PP     | 8.803.000          | 4.696.000 |
| 273. | Palangkaraya   | Semarang    | PP     | 7.252.000          | 3.947.000 |
| 274. | Palangkaraya   | Solo        | PP     | 7.252.000          | 4.086.000 |
| 275. | Palangkaraya   | Surabaya    | PP     | 8.696.000          | 4.385.000 |
| 276. | Palembang      | Balikpapan  | PP     | 9.894.000          | 5.220.000 |
| 277. | Palembang      | Makassar    | PP     | 9.466.000          | 4.781.000 |
| 278. | Palembang      | Pontianak   | PP     | 6.685.000          | 3.840.000 |
| 279. | Palembang      | Semarang    | PP     | 6.236.000          | 3.305.000 |
| 280. | Palembang      | Solo        | PP     | 6.236.000          | 3.444.000 |
| 281. | Palembang      | Surabaya    | PP     | 7.690.000          | 3.744.000 |
| 282. | Palembang      | Timika      | PP     | 15.210.000         | 8.076.000 |
| 283. | Palu           | Makassar    | PP     | 4.268.000          | 2.578.000 |
| 284. | Palu           | Poso        | PP     | 1.957.000          | 1.423.000 |
| 285. | Palu           | Sorong      | PP     | 6.878.000          | 3.883.000 |
| 286. | Palu           | Surabaya    | PP     | 6.878.000          | 3.883.000 |
| 287. | Palu           | Toli-Toli   | PP     | 2.941.000          | 1.915.000 |
| 288. | Pangkal Pinang | Balikpapan  | PP     | 9.038.000          | 4.631.000 |
| 289. | Pangkal Pinang | Banjarmasin | PP     | 7.091.000          | 3.915.000 |
| 290. | Pangkal Pinang | Batam       | PP     | 6.739.000          | 3.818.000 |
| 291. | Pangkal Pinang | Yogyakarta  | PP     | 6.065.000          | 3.262.000 |
| 292. | Pangkal Pinang | Makassar    | PP     | 9.060.000          | 4.663.000 |
| 293. | Pangkal Pinang | Manado      | PP     | 12.097.000         | 5.808.000 |
| 294. | Pangkal Pinang | Medan       | PP     | 8.888.000          | 4.653.000 |
| 295. | Pangkal Pinang | Padang      | PP     | 7.337.000          | 3.883.000 |
| 296. | Pangkal Pinang | Palembang   | PP     | 5.829.000          | 3.262.000 |
| 297. | Pangkal Pinang | Pekanbaru   | PP     | 7.391.000          | 3.936.000 |
| 298. | Pangkal Pinang | Pontianak   | PP     | 6.279.000          | 3.733.000 |
| 299. | Pangkal Pinang | Semarang    | PP     | 5.829.000          | 3.187.000 |
| 300. | Pangkal Pinang | Solo        | PP     | 5.829.000          | 3.326.000 |
| 301. | Pangkal Pinang | Surabaya    | PP     | 7.284.000          | 3.626.000 |
| 302. | Pekanbaru      | Pontianak   | PP     | 8.247.000          | 4.514.000 |
| 303. | Pekanbaru      | Semarang    | PP     | 7.797.000          | 3.979.000 |
| 304. | Pekanbaru      | Solo        | PP     | 7.797.000          | 4.118.000 |
| 305. | Pekanbaru      | Surabaya    | PP     | 9.241.000          | 4.407.000 |
| 306. | Pekanbaru      | Timika      | PP     | 16.771.000         | 8.739.000 |
| 307. | Pontianak      | Makassar    | PP     | 9.915.000          | 5.241.000 |
| 308. | Pontianak      | Semarang    | PP     | 6.685.000          | 3.765.000 |
| 309. | Pontianak      | Solo        | PP     | 6.685.000          | 3.904.000 |
| 310. | Pontianak      | Surabaya    | PP     | 8.140.000          | 4.204.000 |
| 311. | Pontianak      | Timika      | PP     | 15.659.000         | 8.535.000 |

| No   | Kota     |          | Satuan | Satuan Biaya Tiket |           |
|------|----------|----------|--------|--------------------|-----------|
|      | Asal     | Tujuan   |        | Bisnis             | Ekonomi   |
| 312. | Semarang | Makassar | PP     | 9.466.000          | 4.706.000 |
| 313. | Solo     | Makassar | PP     | 9.466.000          | 4.845.000 |
| 314. | Surabaya | Denpasar | PP     | 3.198.000          | 1.979.000 |
| 315. | Surabaya | Jayapura | PP     | 12.675.000         | 7.231.000 |
| 316. | Surabaya | Makassar | PP     | 5.936.000          | 3.433.000 |
| 317. | Surabaya | Timika   | PP     | 11.295.000         | 6.589.000 |

1.2.1.2.4 Biaya Taksi dari Bandara ke Tempat Tujuan

| No  | Kota                | Satuan       | Besaran (Rp.) |
|-----|---------------------|--------------|---------------|
| 1.  | Aceh                | Orang / Kali | 123.000       |
| 2.  | Sumatera Utara      | Orang / Kali | 232.000       |
| 3.  | Riau                | Orang / Kali | 94.000        |
| 4.  | Kepulauan Riau      | Orang / Kali | 137.000       |
| 5.  | Jambi               | Orang / Kali | 147.000       |
| 6.  | Sumatera Selatan    | Orang / Kali | 128.000       |
| 7.  | Lampung             | Orang / Kali | 167.000       |
| 8.  | Bengkulu            | Orang / Kali | 109.000       |
| 9.  | Bangka Belitung     | Orang / Kali | 90.000        |
| 10. | Banten              | Orang / Kali | 446.000       |
| 11. | Jawa Barat          | Orang / Kali | 166.000       |
| 12. | D.K.I. Jakarta      | Orang / Kali | 256.000       |
| 13. | Jawa Tengah         | Orang / Kali | 75.000        |
| 14. | D.I. Yogyakarta     | Orang / Kali | 118.000       |
| 15. | Jawa Timur          | Orang / Kali | 194.000       |
| 16. | Bali                | Orang / Kali | 159.000       |
| 17. | Nusa Tenggara Barat | Orang / Kali | 231.000       |
| 18. | Nusa Tenggara Timur | Orang / Kali | 108.000       |
| 19. | Kalimantan Barat    | Orang / Kali | 135.000       |
| 20. | Kalimantan Tengah   | Orang / Kali | 111.000       |
| 21. | Kalimantan Selatan  | Orang / Kali | 150.000       |
| 22. | Kalimantan Timur    | Orang / Kali | 450.000       |
| 23. | Kalimantan Utara    | Orang / Kali | 102.000       |
| 24. | Sulawesi Utara      | Orang / Kali | 138.000       |
| 25. | Gorontalo           | Orang / Kali | 240.000       |
| 26. | Sulawesi Barat      | Orang / Kali | 313.000       |
| 27. | Sulawesi Selatan    | Orang / Kali | 145.000       |
| 28. | Sulawesi Tengah     | Orang / Kali | 165.000       |
| 29. | Sulawesi Tenggara   | Orang / Kali | 171.000       |
| 30. | Maluku              | Orang / Kali | 240.000       |
| 31. | Maluku Utara        | Orang / Kali | 215.000       |
| 32. | Papua               | Orang / Kali | 431.000       |
| 33. | Papua Barat         | Orang / Kali | 182.000       |

1.2.1.2.5 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten dalam Provinsi yang sama (One Way)

| No. | Provinsi | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan | Satuan     | Besaran (Rp.) |
|-----|----------|---|------------|---------------|
| 1   | Aceh     | Banda Aceh ke Kab. Aceh Barat             | Orang/Kali | 275.000       |

| No. | Provinsi       | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan | Satuan     | Besaran (Rp.) |
|-----|----------------|---|------------|---------------|
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Aceh Barat Daya        | Orang/Kali | 298.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Aceh Besar             | Orang/Kali | 183.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Aceh Jaya              | Orang/Kali | 238.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Aceh Selatan           | Orang/Kali | 325.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Aceh Singkil           | Orang/Kali | 420.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Aceh Tamiang           | Orang/Kali | 315.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Aceh Tengah            | Orang/Kali | 293.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Ka. Aceh Tenggara           | Orang/Kali | 460.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Aceh Timur             | Orang/Kali | 289.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Ka. Aceh Utara              | Orang/Kali | 270.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Bener Meriah           | Orang/Kali | 278.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Bireuen                | Orang/Kali | 220.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Gayo lues              | Orang/Kali | 330.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Nagan Raya             | Orang/Kali | 275.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Pidie                  | Orang/Kali | 190.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Pidie Jaya             | Orang/Kali | 205.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. langsa                 | Orang/Kali | 301.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. lhokseumawe            | Orang/Kali | 240.000       |
|     |                | Banda Aceh ke Kab. Subulussalam           | Orang/Kali | 400.000       |
| 2   | Sumatera Utara | Medan ke Kab. Asahan                      | Orang/Kali | 259.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Batubara                    | Orang/Kali | 225.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Dairi                       | Orang/Kali | 270.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Deli Serdang                | Orang/Kali | 186.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Humbang Hasundutan          | Orang/Kali | 300.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Karo                        | Orang/Kali | 200.000       |
|     |                | Medan ke Kab. labuhan Batu                | Orang/Kali | 287.000       |
|     |                | Medan ke Kab. labuhan Batu Selatan        | Orang/Kali | 360.000       |
|     |                | Medan ke Kab. labuhan Batu Utara          | Orang/Kali | 300.000       |
|     |                | Medan ke Kab. langkat                     | Orang/Kali | 186.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Mandailing Natal            | Orang/Kali | 420.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Padang lawas                | Orang/Kali | 420.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Padang lawas Utara          | Orang/Kali | 420.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Pakhak Barat                | Orang/Kali | 300.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Samosir                     | Orang/Kali | 330.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Serdang Bedagai             | Orang/Kali | 200.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Simalungun                  | Orang/Kali | 264.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Tapanuli Selatan            | Orang/Kali | 328.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Tapanuli Tengah             | Orang/Kali | 345.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Tapanuli Utara              | Orang/Kali | 330.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Toba                        | Orang/Kali | 300.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Binjai                      | Orang/Kali | 180.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Pematang Siantar            | Orang/Kali | 225.000       |
|     |                | Medan ke Kab. Sibolga                     | Orang/Kali | 345.000       |

| No.                          | Provinsi         | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan         | Satuan         | Besaran (Rp.)                 |
|------------------------------|------------------|---|----------------|-------------------------------|
|                              |                  | Medan ke Kab. Tanjung Balai                       | Orang/Kali     | 285.000                       |
|                              |                  | Medan ke Kab. Tebing Tinggi                       | Orang/Kali     | 203.000                       |
| 3                            | Riau             | Pekanbaru ke Kab. Indra Giri Hilir                | Orang/Kali     | 380.000                       |
|                              |                  | Pekanbaru ke Kab. Indra Giri Hulu                 | Orang/Kali     | 315.000                       |
|                              |                  | Pekanbaru ke Kab. Kampar                          | Orang/Kali     | 200.000                       |
|                              |                  | Pekanbaru ke Kab. Kuantan Singingi                | Orang/Kali     | 300.000                       |
|                              |                  | Pekanbaru ke Kab. Pelalawan                       | Orang/Kali     | 225.000                       |
|                              |                  | Pekanbaru ke Kab. Rokan Hilir                     | Orang/Kali     | 350.000                       |
|                              |                  | Pekanbaru ke Kab. Rokan Hulu                      | Orang/Kali     | 322.000                       |
|                              |                  | Pekanbaru ke Kab. Siak                            | Orang/Kali     | 350.000                       |
|                              |                  | Pekanbaru ke Kab. Dumai                           | Orang/Kali     | 400.000                       |
|                              |                  | 4   | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang ke Kab. Bintan |
| 5                            | Jambi            | Jambi ke Kab. Batang Hari                         | Orang/Kali     | 175.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kab. Bungo                               | Orang/Kali     | 270.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kab. Kerinci                             | Orang/Kali     | 325.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kab. Merangin                            | Orang/Kali     | 260.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kab. Muaro Jambi                         | Orang/Kali     | 170.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kab. Sarolangun                          | Orang/Kali     | 241.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kab. Tanjung Jabung barat                | Orang/Kali     | 225.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kab. Tanjung Jabung Timur                | Orang/Kali     | 190.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kab. Tebo                                | Orang/Kali     | 250.000                       |
|                              |                  | Jambi ke Kota Sungai Penuh                        | Orang/Kali     | 308.000                       |
| 6                            | Sumatera Selatan | Palembang ke Kab. Banyuasin                       | Orang/Kali     | 203.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Empat Lawang                    | Orang/Kali     | 315.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Lahat                           | Orang/Kali     | 250.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Muara Enim                      | Orang/Kali     | 235.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Musi Banyuasin                  | Orang/Kali     | 235.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Musi Rawas                      | Orang/Kali     | 320.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Musi Rawas Utara                | Orang/Kali     | 325.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Ogan Ilir                       | Orang/Kali     | 205.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Ogan Komering Ilir              | Orang/Kali     | 205.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Ogan Komering Ulu               | Orang/Kali     | 248.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Selat Ogan Komering Ulu Selatan | Orang/Kali     | 250.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Timu Ogan Komering Ulu Timur    | Orang/Kali     | 245.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kab. Pali                            | Orang/Kali     | 265.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kota lubuk linggau                   | Orang/Kali     | 290.000                       |
|                              |                  | Palembang ke Kota Pagar Alam                      | Orang/Kali     | 280.000                       |
| Palembang ke Kota Prabumulih | Orang/Kali       | 205.000   |                |                               |
| 7                            | Lampung          | Bandar Lampung ke Kab. lampung Barat              | Orang/Kali     | 270.000                       |

| No.                              | Provinsi        | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan  | Satuan     | Besaran (Rp.)                     |
|----------------------------------|-----------------|--|------------|-----------------------------------|
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Lampung Selatan     | Orang/Kali | 234.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Lampung Tengah      | Orang/Kali | 246.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Lampung Timur       | Orang/Kali | 246.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Lampung Utara       | Orang/Kali | 252.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Mesuji              | Orang/Kali | 276.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Pesawaran           | Orang/Kali | 216.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Pesisir Barat       | Orang/Kali | 200.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Pringsewu           | Orang/Kali | 222.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Tanggamus           | Orang/Kali | 240.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Tulang Bawang       | Orang/Kali | 252.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Tulang Bawang Barat | Orang/Kali | 267.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kab. Way Kanan           | Orang/Kali | 270.000                           |
|                                  |                 | Bandar Lampung ke Kota Metro               | Orang/Kali | 234.000                           |
|                                  |                 | 8  | Bengkulu   | Bengkulu ke Kab. Bengkulu Selatan |
| Bengkulu ke Kab. Bengkulu Tengah | Orang/Kali      |  |            | 232.000                           |
| Bengkulu ke Kab. Bengkulu Utara  | Orang/Kali      |  |            | 313.000                           |
| Bengkulu ke Kab. Kaur            | Orang/Kali      |  |            | 385.000                           |
| Bengkulu ke Kab. Kapahiang       | Orang/Kali      |  |            | 298.000                           |
| Bengkulu ke Kab. Lebong          | Orang/Kali      |  |            | 375.000                           |
| Bengkulu ke Kab. Mukomuko        | Orang/Kali      |  |            | 423.000                           |
| Bengkulu ke Kab. Rejang Lebong   | Orang/Kali      |  |            | 313.000                           |
| Bengkulu ke Kab. Seluma          | Orang/Kali      |  |            | 282.000                           |
| 9                                | Bangka Belitung | Pangkal Pinang ke Kab. Bangka              | Orang/Kali | 250.000                           |
|                                  |                 | Pangkal Pinang ke Kab. Bangka Barat        | Orang/Kali | 275.000                           |
|                                  |                 | Pangkal Pinang ke Kab. Bangka Selatan      | Orang/Kali | 275.000                           |
|                                  |                 | Pangkal Pinang ke Kab. Bangka Tengah       | Orang/Kali | 250.000                           |
| 10                               | Banten          | Serang ke Kab. Lebak                       | Orang/Kali | 208.000                           |
|                                  |                 | Serang ke Kab. Pandeglang                  | Orang/Kali | 138.000                           |
|                                  |                 | Serang ke Kab. Serang                      | Orang/Kali | 160.000                           |
|                                  |                 | Serang ke Kab. Tangerang                   | Orang/Kali | 254.000                           |
|                                  |                 | Serang ke Kota Cilegon                     | Orang/Kali | 160.000                           |
|                                  |                 | Serang ke Kota Tangerang                   | Orang/Kali | 313.000                           |
|                                  |                 | Serang ke Kota Tangerang Selatan           | Orang/Kali | 347.000                           |
| 11                               | Jawa Barat      | Bandung ke Kab. Bandung                    | Orang/Kali | 183.000                           |
|                                  |                 | Bandung ke Kab. Bandung Barat              | Orang/Kali | 275.000                           |
|                                  |                 | Bandung ke Kab. Bekasi                     | Orang/Kali | 265.000                           |
|                                  |                 | Bandung ke Kab. Bogor                      | Orang/Kali | 185.000                           |

| No. | Provinsi    | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan | Satuan     | Besaran (Rp.) |
|-----|-------------|---|------------|---------------|
|     |             | Bandung ke Kab. Ciamis                    | Orang/Kali | 245.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Cianjur                   | Orang/Kali | 215.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Cirebon                   | Orang/Kali | 280.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Garut                     | Orang/Kali | 243.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Indramayu                 | Orang/Kali | 275.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Karawang                  | Orang/Kali | 248.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Kuningan                  | Orang/Kali | 275.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Majalengka                | Orang/Kali | 235.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Pangadaran                | Orang/Kali | 283.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Purwakarta                | Orang/Kali | 218.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Subang                    | Orang/Kali | 208.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Sukabumi                  | Orang/Kali | 245.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Sumedang                  | Orang/Kali | 230.000       |
|     |             | Bandung ke Kab. Tasikmalaya               | Orang/Kali | 245.000       |
|     |             | Bandung ke Kota Banjar                    | Orang/Kali | 283.000       |
|     |             | Bandung ke Kota Bekasi                    | Orang/Kali | 265.000       |
|     |             | Bandung ke Kota Bogor                     | Orang/Kali | 285.000       |
|     |             | Bandung ke Kota Cimahi                    | Orang/Kali | 168.000       |
|     |             | Bandung ke Kota Cirebon                   | Orang/Kali | 270.000       |
|     |             | Bandung ke Kota Depok                     | Orang/Kali | 275.000       |
|     |             | Bandung ke Kota Sukabumi                  | Orang/Kali | 226.000       |
|     |             | Bandung ke Kota Tasikmalaya               | Orang/Kali | 245.000       |
| 12  | Jakarta     | Jakarta ke Kota Bekasi                    | Orang/Kali | 284.000       |
|     |             | Jakarta ke Kab.Bekasi                     | Orang/Kali | 284.000       |
|     |             | Jakarta ke Kab.Bogor                      | Orang/Kali | 300.000       |
|     |             | Jakarta ke Kota Bogor                     | Orang/Kali | 300.000       |
|     |             | Jakarta ke Kota Depok                     | Orang/Kali | 275.000       |
|     |             | Jakarta ke KotaTangerang                  | Orang/Kali | 286.000       |
|     |             | Jakarta ke KotaTangerang Selatan          | Orang/Kali | 286.000       |
|     |             | Jakarta ke Kab.Tangerang                  | Orang/Kali | 310.000       |
|     |             | Jakarta ke Kepulauan Seribu               | Orang/Kali | 428.000       |
| 13  | Jawa Tengah | Semarang ke Kab. Banjarnegara             | Orang/Kali | 260.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Banyumas                 | Orang/Kali | 257.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Batang                   | Orang/Kali | 240.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Blora                    | Orang/Kali | 270.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Boyolali                 | Orang/Kali | 240.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Brebes                   | Orang/Kali | 263.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Cilacap                  | Orang/Kali | 280.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Demak                    | Orang/Kali | 230.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Grobogan                 | Orang/Kali | 235.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Jepara                   | Orang/Kali | 240.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Karanganyar              | Orang/Kali | 250.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Kebumen                  | Orang/Kali | 260.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Kendal                   | Orang/Kali | 230.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Klaten                   | Orang/Kali | 250.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Kudus                    | Orang/Kali | 235.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Magelang                 | Orang/Kali | 240.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Pati                     | Orang/Kali | 240.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Pekalongan               | Orang/Kali | 245.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Pemalang                 | Orang/Kali | 250.000       |
|     |             | Semarang ke Kab. Purbalingga              | Orang/Kali | 270.000       |

| No.                     | Provinsi      | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan | Satuan     | Besaran (Rp.) |
|-------------------------|---------------|---|------------|---------------|
|                         |               | Semarang ke Kab. Purworejo                | Orang/Kali | 250.000       |
|                         |               | Semarang ke Kab. Rembang                  | Orang/Kali | 250.000       |
|                         |               | Semarang ke Kab. Semarang                 | Orang/Kali | 230.000       |
|                         |               | Semarang ke Kab. Sragen                   | Orang/Kali | 250.000       |
|                         |               | Semarang ke Kab. Sukoharjo                | Orang/Kali | 250.000       |
|                         |               | Semarang ke Kab. Tegal                    | Orang/Kali | 260.000       |
|                         |               | Semarang ke Kab. Temanggung               | Orang/Kali | 240.000       |
|                         |               | Semarang ke Kab. Wonogiri                 | Orang/Kali | 250.000       |
|                         |               | Semarang ke Kab. Wonosobo                 | Orang/Kali | 250.000       |
|                         |               | Semarang ke Kota Magelang                 | Orang/Kali | 240.000       |
|                         |               | Semarang ke Kota Pekalongan               | Orang/Kali | 245.000       |
|                         |               | Semarang ke Kota Salatiga                 | Orang/Kali | 235.000       |
|                         |               | Semarang ke Kota Surakarta                | Orang/Kali | 245.000       |
|                         |               | Semarang ke Kota Tegal                    | Orang/Kali | 260.000       |
| 14                      | DI Yogyakarta | Yogyakarta ke Kab. Bantul                 | Orang/Kali | 250.000       |
|                         |               | Yogyakarta ke Kab. Gunung Kidul           | Orang/Kali | 350.000       |
|                         |               | Yogyakarta ke Kab. Kulon Progo            | Orang/Kali | 350.000       |
|                         |               | Yogyakarta ke Kab. Sleman                 | Orang/Kali | 200.000       |
| 15                      | Jawa Timur    | Surabaya ke Kab. Bangkalan                | Orang/Kali | 225.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Banyuwangi               | Orang/Kali | 285.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Blitar                   | Orang/Kali | 255.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Bojonegoro               | Orang/Kali | 225.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Bondowoso                | Orang/Kali | 255.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Gresik                   | Orang/Kali | 225.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Jember                   | Orang/Kali | 261.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Jombang                  | Orang/Kali | 235.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Kediri                   | Orang/Kali | 235.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Lamongan                 | Orang/Kali | 225.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Lumajang                 | Orang/Kali | 261.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Madiun                   | Orang/Kali | 245.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Magetan                  | Orang/Kali | 253.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Malang                   | Orang/Kali | 228.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Mojokerto                | Orang/Kali | 225.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Nganjuk                  | Orang/Kali | 245.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Ngawi                    | Orang/Kali | 253.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Pacitan                  | Orang/Kali | 285.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Pamekasan                | Orang/Kali | 243.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Pasuruan                 | Orang/Kali | 228.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Ponorogo                 | Orang/Kali | 255.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Probolinggo              | Orang/Kali | 228.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Sampang                  | Orang/Kali | 235.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Sidoarjo                 | Orang/Kali | 240.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Situbondo                | Orang/Kali | 255.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Sumenep                  | Orang/Kali | 255.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Trenggalek               | Orang/Kali | 245.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Tuban                    | Orang/Kali | 245.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kab. Tulungagung              | Orang/Kali | 245.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kota Batu                     | Orang/Kali | 242.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kota Blitar                   | Orang/Kali | 255.000       |
|                         |               | Surabaya ke Kota Bojonegoro               | Orang/Kali | 225.000       |
| Surabaya ke Kota Kediri | Orang/Kali    | 235.000                                   |            |               |

| No. | Provinsi            | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan | Satuan     | Besaran (Rp.) |
|-----|---------------------|---|------------|---------------|
|     |                     | Surabaya ke Kota Madiun                   | Orang/Kali | 245.000       |
|     |                     | Surabaya ke Kota Malang                   | Orang/Kali | 228.000       |
|     |                     | Surabaya ke Kota Mojokerto                | Orang/Kali | 225.000       |
|     |                     | Surabaya ke Kota Probolinggo              | Orang/Kali | 228.000       |
| 16  | Bali                | Denpasar ke Kab. Badung                   | Orang/Kali | 188.000       |
|     |                     | Denpasar ke Kab. Bangli                   | Orang/Kali | 225.000       |
|     |                     | Denpasar ke Kab. Buleleng                 | Orang/Kali | 265.000       |
|     |                     | Denpasar ke Kab. Gianyar                  | Orang/Kali | 225.000       |
|     |                     | Denpasar ke Kab. Jembrana                 | Orang/Kali | 270.000       |
|     |                     | Denpasar ke Kab. Karangasem               | Orang/Kali | 263.000       |
|     |                     | Denpasar ke Kab. Tabanan                  | Orang/Kali | 225.000       |
| 17  | Nusa Tenggara Barat | Mataram ke Kab. lombok Barat              | Orang/Kali | 325.000       |
|     |                     | Mataram ke Kab. lombok Tengah             | Orang/Kali | 450.000       |
|     |                     | Mataram ke Kab. lombok Timur              | Orang/Kali | 350.000       |
| 18  | Nusa Tenggara Timur | Kupang ke Kab. Belu                       | Orang/Kali | 325.000       |
|     |                     | Kupang ke Kab. Kupang                     | Orang/Kali | 175.000       |
|     |                     | Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan       | Orang/Kali | 218.000       |
|     |                     | Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara         | Orang/Kali | 275.000       |
| 19  | Kalimantan Barat    | Pontianak ke Kab. Bengkayang              | Orang/Kali | 270.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Kapuas Hulu             | Orang/Kali | 550.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Kayong Utara            | Orang/Kali | 550.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Ketapang                | Orang/Kali | 550.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Kubu Raya               | Orang/Kali | 185.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. landak                  | Orang/Kali | 270.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Melawi                  | Orang/Kali | 430.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Mempawah                | Orang/Kali | 230.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Sambas                  | Orang/Kali | 300.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Sanggau                 | Orang/Kali | 303.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Sekadau                 | Orang/Kali | 343.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kab. Sintang                 | Orang/Kali | 392.000       |
|     |                     | Pontianak ke Kota Singkawang              | Orang/Kali | 257.000       |
| 20  | Kalimantan Tengah   | Palangkaraya ke Kab. Barito Selatan       | Orang/Kali | 290.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Barito Timur         | Orang/Kali | 333.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Barito Utara         | Orang/Kali | 425.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Gunung Mas           | Orang/Kali | 300.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Kapuas               | Orang/Kali | 275.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Katingan             | Orang/Kali | 250.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Kota Waringin Barat  | Orang/Kali | 425.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Kota Waringin Timur  | Orang/Kali | 300.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Lamandau             | Orang/Kali | 525.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Murung Raya          | Orang/Kali | 448.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Pulau Pisang         | Orang/Kali | 250.000       |
|     |                     | Palangkaraya ke Kab. Seruyan              | Orang/Kali | 328.000       |

| No.                                   | Provinsi           | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan | Satuan           | Besaran (Rp.)                 |
|---------------------------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------|
|                                       |                    | Palangkaraya ke Kab. Sukamara             | Orang/Kali       | 525.000                       |
| 21                                    | Kalimantan Selatan | Banjar Masin ke Kab. Balangan             | Orang/Kali       | 230.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Banjar               | Orang/Kali       | 170.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Barito Kuala         | Orang/Kali       | 200.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Hulu Sungai Selatan  | Orang/Kali       | 200.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Hulu Sungai Tengah   | Orang/Kali       | 212.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Hulu Sungai Utara    | Orang/Kali       | 218.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Kota Baru            | Orang/Kali       | 290.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Tabalong             | Orang/Kali       | 234.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Tanah Bumbu          | Orang/Kali       | 300.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Tanah Laut           | Orang/Kali       | 200.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Tapin                | Orang/Kali       | 189.000                       |
|                                       |                    | Banjar Masin ke Kab. Banjar Baru          | Orang/Kali       | 225.000                       |
|                                       |                    | 22  | Kalimantan Timur | Samarinda ke Kab. Kutai Barat |
| Samarinda ke Kab. Kutai Kartanegara   | Orang/Kali         |   |                  | 500.000                       |
| Samarinda ke Kab. Kutai Timur         | Orang/Kali         |   |                  | 1.350.000                     |
| Samarinda ke Kab. Paser               | Orang/Kali         |   |                  | 1.650.000                     |
| Samarinda ke Kab. Penajam Paser Utara | Orang/Kali         |   |                  | 950.000                       |
| Samarinda ke Kab. Balikpapan          | Orang/Kali         |   |                  | 550.000                       |
| Samarinda ke Kab. Bontang             | Orang/Kali         |   |                  | 600.000                       |
| 23                                    | Sulawesi Utara     | Manado ke Kab. Bolaang Mongondow          | Orang/Kali       | 250.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kab. Bolaang Mongondow Selatan  | Orang/Kali       | 275.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kab. Bolaang Mongondow Timur    | Orang/Kali       | 250.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kab. Bolaang Mongondow Utara    | Orang/Kali       | 300.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kab. Minahasa                   | Orang/Kali       | 180.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kab. Minahasa Selatan           | Orang/Kali       | 180.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kab. Minahasa Tenggara          | Orang/Kali       | 200.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kab. Minahasa Utara             | Orang/Kali       | 175.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kota Bitung                     | Orang/Kali       | 175.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kota Kotamobagu                 | Orang/Kali       | 250.000                       |
|                                       |                    | Manado ke Kota Tomohon                    | Orang/Kali       | 170.000                       |
| 24                                    | Gorontalo          | Gorontalo ke Kab. Boalemo                 | Orang/Kali       | 400.000                       |
|                                       |                    | Gorontalo ke Kab. Gorontalo               | Orang/Kali       | 300.000                       |
|                                       |                    | Gorontalo ke Kab. Gorontalo Utara         | Orang/Kali       | 350.000                       |
|                                       |                    | Gorontalo ke Kab. Pahuwato                | Orang/Kali       | 650.000                       |
| 25                                    | Sulawesi Barat     | Mamuju ke Kab. Majene                     | Orang/Kali       | 240.000                       |
|                                       |                    | Mamuju ke Kab. Mamasa                     | Orang/Kali       | 359.000                       |
|                                       |                    | Mamuju ke Kab. Mamuju Tengah              | Orang/Kali       | 200.000                       |
|                                       |                    | Mamuju ke Kab. Pasangkayu                 | Orang/Kali       | 270.000                       |

| No.                        | Provinsi          | Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan | Satuan     | Besaran (Rp.) |
|----------------------------|-------------------|---|------------|---------------|
|                            |                   | Mamuju ke Kab. Polewali Mandar            | Orang/Kali | 260.000       |
| 26                         | Sulawesi Selatan  | Makassar ke Kab. Bantaeng                 | Orang/Kali | 235.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Barru                    | Orang/Kali | 210.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Bone                     | Orang/Kali | 240.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Bulukumba                | Orang/Kali | 240.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Enrekang                 | Orang/Kali | 250.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Gowa                     | Orang/Kali | 175.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Jeneponto                | Orang/Kali | 230.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. luwu                     | Orang/Kali | 350.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. luwu Timur               | Orang/Kali | 375.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. luwu Utara               | Orang/Kali | 365.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Maros                    | Orang/Kali | 170.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Pinrang                  | Orang/Kali | 230.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Sidenreng Rappang        | Orang/Kali | 230.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Sinjai                   | Orang/Kali | 235.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Soppeng                  | Orang/Kali | 235.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Takalar                  | Orang/Kali | 190.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Tanatoraja               | Orang/Kali | 350.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Toraja Utara             | Orang/Kali | 350.000       |
|                            |                   | Makassar ke Kab. Wajo                     | Orang/Kali | 230.000       |
| Makassar ke Kota Pare-Pare | Orang/Kali        | 225.000                                   |            |               |
| 27                         | Sulawesi Tengah   | Palu ke Kab. luwuk                        | Orang/Kali | 400.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Buol                         | Orang/Kali | 472.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Donggala                     | Orang/Kali | 130.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Morowali                     | Orang/Kali | 400.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Morowali Utara               | Orang/Kali | 400.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Parigi Moutong               | Orang/Kali | 250.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Poso                         | Orang/Kali | 280.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Sigi                         | Orang/Kali | 219.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Tojouna-Una                  | Orang/Kali | 350.000       |
|                            |                   | Palu ke Kab. Toli-Toli                    | Orang/Kali | 412.000       |
| 28                         | Sulawesi Tenggara | Kendari ke Kab. Bombana                   | Orang/Kali | 355.000       |
|                            |                   | Kendari ke Kab. Kolaka                    | Orang/Kali | 370.000       |
|                            |                   | Kendari ke Kab. Kolaka Timur              | Orang/Kali | 300.000       |
|                            |                   | Kendari ke Kab. Kolaka Utara              | Orang/Kali | 425.000       |
|                            |                   | Kendari ke Kab. Konawe                    | Orang/Kali | 300.000       |
|                            |                   | Kendari ke Kab. Konawe Selatan            | Orang/Kali | 305.000       |
|                            |                   | Kendari ke Kab. Konawe Utara              | Orang/Kali | 300.000       |
| 29                         | Maluku Utara      | Sofifi ke Kab. Halmahera Barat            | Orang/Kali | 850.000       |
|                            |                   | Sofifi ke Kab. Halmahera Tengah           | Orang/Kali | 1.000.000     |
|                            |                   | Sofifi ke Kab. Halmahera Timur            | Orang/Kali | 1.250.000     |
|                            |                   | Sofifi ke Kab. Halmahera Utara            | Orang/Kali | 900.000       |
| 30                         | Papua             | Jayapura ke Kab. Jayapura                 | Orang/Kali | 600.000       |
|                            |                   | Jayapura ke Kab. Keerom                   | Orang/Kali | 900.000       |
|                            |                   | Jayapura ke Kab. Sarmi                    | Orang/Kali | 2.700.000     |
|                            |                   | Jayapura ke Kab. Merauke                  | Orang/Kali | 1.134.000     |
| 31                         | Papua Barat       | Manokwari ke Kab. Teluk Bintun            | Orang/Kali | 900.000       |
|                            |                   | Manokwari ke Kab. Manokwari S             | Orang/Kali | 750.000       |
|                            |                   | Manokwari ke Kab. Pegunungan              | Orang/Kali | 2.650.000     |
|                            |                   | Manokwari ke Kota Sorong                  | Orang/Kali | 1.000.000     |

### 1.2.2 Perjalanan Dinas Dalam Kota

#### Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Kabupaten

1. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota dalam Kabupaten terdiri atas:
  - a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau lebih dari 12 km, dan
  - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai 8 (delapan) jam dan/atau sampai 12 km hanya dapat diberikan biaya transportasi.
2. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten atau dalam daerah dalam kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD belum terbentuk atau berhalangan dapat ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD.
  - c. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Fungsional, ASN, Non ASN, Sopir pada lingkup Sekretariat Daerah dan Pejabat Lainnya/ masyarakat yang pembiayaannya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - d. Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, ASN, Non ASN dan Sopir pada perangkat daerah dan Pejabat Lainnya/masyarakat yang pembiayaannya dibebankan pada Perangkat Daerah ditandatangani ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah, khusus untuk pegawai ASN/Non ASN lintas Perangkat Daerah sebelumnya sudah ada persetujuan dari perangkat yang bersangkutan.
3. Pegawai Instansi Vertikal dalam rangka mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah yang pembebanan dananya pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan yang sebelumnya sudah dibuatkan surat pelimpahan wewenang SPT dari Sekretaris Daerah kepada Kepala Instansi Vertikal yang bersangkutan.
4. Satuan biaya perjalanan perjalanan dinas dalam kota dalam Kabupaten merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas dalam kota dalam Kabupaten yang terdiri atas komponen uang harian dan biaya transportasi.
5. Biaya transportasi dalam Kabupaten diberikan kepada ASN/Non ASN dan pihak lain dalam rangka menghadiri kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi, FGD dan sejenis.
6. Biaya transportasi perjalanan dinas dalam Kabupaten digunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi ASN, Non ASN dan pihak lain.
7. Biaya transportasi dibayarkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak menggunakan kendaraan dinas.
8. Besarnya biaya transportasi dalam Kabupaten dengan mempedomani Tabel biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota.
9. Biaya biaya transportasi dibayarkan secara rill (at cost, jika bukti pembayaran biaya transportasi dalam perjalanan dinas tidak

ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini.

1.2.2.1 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

| 5.1.02.04.01.0003 |                        | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                |                   |                                 |
|-------------------|------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| No.               | Komponen               | Spesifikasi  | Satuan            | Besaran Harga (Rp)              |
| 1                 | Uang Harian            | BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD                | Orang/hari        | 150.000                         |
|                   |                        | PEJABAT Eselon IIA                                 | Orang/hari        | 145.000                         |
|                   |                        | PEJABAT Eselon IIB/Anggota /FORKOPIMDA             | Orang/hari        | 140.000                         |
|                   |                        | Pejabat Eselon III/ Gol. IV                        | Orang/hari        | 130.000                         |
|                   |                        | Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI | Orang/hari        | 120.000                         |
|                   |                        | Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII               | Orang/hari        | 110.000                         |
|                   |                        | PTT/ Non ASN/ Sopir                                | Orang/hari        | 100.000                         |
|                   |                        | 2  | Transportasi BOKB | Pengganti Transportasi Kegiatan |
| 3                 | Pengganti Transportasi | Pengganti Transportasi Kegiatan                    | Orang/hari        | 100.000                         |

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Kecamatan

1. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota dalam Kecamatan terdiri atas:
  - a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau lebih dari 12 km, dan
  - b. Perjalanan dinas yang dilakukan dengan jarak tempuh sampai 12 km, uang harian dapat dibayarkan apabila melampirkan undangan.
2. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas dalam daerah dalam kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Eselon III, Fungsional, ASN, Non ASN, Sopir lingkup Kecamatan ditandatangani oleh Camat.
  - b. Kepala UPT, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, ASN, Non ASN dan Sopir lingkup UPT dan Pejabat Lainnya/masyarakat yang pembiayaannya dibebankan pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT.
3. Satuan biaya perjalanan perjalanan dinas dalam kota dalam Kecamatan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas dalam kota dalam Kecamatan yang terdiri atas komponen uang harian dan biaya transportasi.
4. Biaya transportasi dalam Kecamatan diberikan kepada ASN/Non ASN dan pihak lain dalam rangka menghadiri kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi, FGD dan sejenis.
5. Biaya transportasi perjalanan dinas dalam Kecamatan digunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi ASN, Non ASN dan pihak lain.
6. Besarnya biaya transportasi dalam Kecamatan dihitung berdasarkan jarak tempuh, dimana per kali 8 km dibayarkan biaya transportasi sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

7. Biaya transportasi dibayarkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak menggunakan kendaraan dinas.
8. Biaya transportasi dibayarkan secara rill (at cost, jika bukti pembayaran transportasi dalam perjalanan dinas tidak ada, maka diganti dengan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana Lampiran VI dalam Peraturan Bupati ini.

#### 1.2.2.2 Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

| 5.1.02.04.01.0003 |             | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |            |                    |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| No.               | Komponen    | Spesifikasi                         | Satuan     | Besaran Harga (Rp) |
| 1                 | Uang Harian | PEJABAT Ess. III/Gol IV             | Orang/hari | 100.000            |
|                   |             | PNS PEJABAT Ess. IV/ PNS Gol. III   | Orang/hari | 90.000             |
|                   |             | PPPK Gol IX s.d XI                  | Orang/hari | 90.000             |
|                   |             | PNS Gol. I/PNS Gol. I               | Orang/hari | 80.000             |
|                   |             | PPPK Gol I s.d Gol VII              | Orang/hari | 80.000             |
|                   |             | PTT/Non PNS/Sopir                   | Orang/hari | 70.000             |

#### 1.2.2.2.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota.

| No | Uraian  | Komponen                            | Satuan       | Besaran Nilai (Rp.) |
|----|---|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1. | Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota | Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD | orang / hari | 125.000             |
|    |   | Pejabat Esselon II/ Anggota DPRD    | orang / hari | 75.000              |

1.2.2.2.2 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Kabupaten

| No. | Kecamatan     | Kecamatan Tujuan (Rp.) |         |           |               |         |         |         |              |            |            |              |
|-----|---------------|------------------------|---------|-----------|---------------|---------|---------|---------|--------------|------------|------------|--------------|
|     |               | Pulau Punjung          | Sitiung | Koto Baru | Sungai Rumbai | IX Koto | Timpeh  | Tiumang | Padang Laweh | Koto salak | Koto Besar | Asam Jujuhan |
| 1   | Pulau Punjung |                        | 60.000  | 110.000   | 130.000       | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 100.000      | 130.000    | 140.000    | 240.000      |
| 2   | Sitiung       | 60.000                 |         | 60.000    | 90.000        | 180.000 | 60.000  | 60.000  | 50.000       | 80.000     | 100.000    | 200.000      |
| 3   | Koto Baru     | 110.000                | 60.000  |           | 110.000       | 220.000 | 100.000 | 30.000  | 60.000       | 20.000     | 60.000     | 160.000      |
| 4   | Sungai Rumbai | 130.000                | 90.000  | 110.000   |               | 250.000 | 130.000 | 80.000  | 100.000      | 70.000     | 50.000     | 60.000       |
| 5   | Sembilan Koto | 120.000                | 180.000 | 220.000   | 250.000       |         | 200.000 | 220.000 | 220.000      | 240.000    | 250.000    | 350.000      |
| 6   | Timpeh        | 110.000                | 60.000  | 100.000   | 130.000       | 200.000 |         | 80.000  | 50.000       | 120.000    | 140.000    | 240.000      |
| 7   | Tiumang       | 110.000                | 60.000  | 30.000    | 80.000        | 220.000 | 80.000  |         | 30.000       | 40.000     | 90.000     | 180.000      |
| 8   | Padang Laweh  | 100.000                | 50.000  | 60.000    | 100.000       | 220.000 | 50.000  | 30.000  |              | 80.000     | 110.000    | 210.000      |
| 9   | Koto salak    | 130.000                | 80.000  | 20.000    | 70.000        | 240.000 | 120.000 | 40.000  | 80.000       |            | 80.000     | 170.000      |
| 10  | Koto Besar    | 140.000                | 100.000 | 60.000    | 50.000        | 250.000 | 140.000 | 90.000  | 110.000      | 80.000     |            | 140.000      |
| 11  | Asam Jujuhan  | 240.000                | 200.000 | 160.000   | 60.000        | 350.000 | 240.000 | 180.000 | 210.000      | 170.000    | 140.000    |              |

1.3 Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan.

1.3.1 Makan Minum Rapat.

1. Satuan biaya makan dan minum tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum untuk jamu tamu, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penganggaran belanja Makan Minum Jamuan Tamu Kepala Daerah hanya pada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan pada OPD yang ada event Tingkat Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Kudapan (Snack) makan dan minuman Jamu Tamu dapat dibelanjakan untuk pembelian buah buahan, kue, makan kecil dan minuman.
4. Nasi bungkus restoran bisa dibelanjakan diantaranya :
  - a. nasi Bungkus;
  - b. sate;
  - c. martabak Mesir; dan
  - d. makanan sejenis lainnya.

| 5.1.02.01.01.0052 |  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |              |                    |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| No.               | Komponen   | Spesifikasi                       | Satuan       | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Nasi Kotak   | 1 (satu) Protein                  | Kotak        | 35.000             |
| 2.                | Nasi Kotak   | 2 (dua) Protein                   | Kotak        | 45.000             |
| 3.                | Nasi Bungkus   | Restoran                          | Bks          | 27.000             |
| 4.                | Nasi Bungkus   | Rumah Makan                       | Bks          | 22.000             |
| 5.                | Snack Kotak  | Snack Kotak                       | Kotak        | 8.000              |
| 6.                | Makan Minum Lembur   | Nasi Bungkus                      | Bks          | 22.000             |
| 7.                | Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dalam kabupaten  | Fullday                           | Orang / Hari | 200.000            |
| 8.                | Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I | Halfday                           | Orang / Hari | 351.000            |
| 9.                | Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I | Fullday                           | Orang / Hari | 502.000            |
| 10.               | Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I | Fullboard                         | Orang / Hari | 1.492.000          |
| 11.               | Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Kepala Daerah atau Eselon I | Resinedence                       | Orang / Hari | 853.000            |
| 12.               | Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II                   | Halfday                           | Orang / Hari | 311.000            |
| 13.               | Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II                   | Fullday                           | Orang / Hari | 432.000            |
| 14.               | Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II                   | Fullboard                         | Orang / Hari | 987.000            |
| 15.               | Rapat atau pertemuan diluar kantor setingkat Eselon II                   | Resinedence                       | Orang / Hari | 743.000            |
| 16.               | Makan Minum Rapat Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara                | Makan                             | Porsi        | 45.000             |
| 17.               | Makan Minum Rapat Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara                | Kudapan/ Snack                    | Porsi        | 30.000             |

### 1.3.2 Makanan Dan Minuman Jamu Tamu

1. Satuan biaya makan dan minum jamu tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum untuk jamu tamu, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penganggaran belanja Makan Minum Jamuan Tamu Kepala Daerah hanya pada Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan pada OPD yang ada event Tingkat Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Kudapan (Snack) makan dan minuman Jamu Tamu dapat dibelanjakan untuk pembelian buah buahan, kue, makan kecil dan minuman.
4. Nasi bungkus restoran bisa dibelanjakan diantaranya :
  - a. Nasi Bungkus;
  - b. Sate;
  - c. Martabak Mesir; dan
  - d. makanan sejenis lainnya.

| 5.1.02.01.01.0053 |                                  | Belanja Makanan Dan Minuman Jamu Tamu |        |                    |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|
| No.               | Komponen                         | Spesifikasi                           | Satuan | Besaran Harga (Rp) |
| 1.                | Makan Prasmanan 1 (satu) Protein | 1 (Satu) Protein                      | Porsi  | 35.000             |
| 2.                | Makan Prasmanan 2 (dua) Protein  | 2 (Dua) Protein                       | Porsi  | 45.000             |
| 3.                | Kudapan (snack)                  | Kudapan (snack)                       | Porsi  | 15.000             |
| 4.                | Kudapan (Snack)                  | Kudapan (Snack)                       | Porsi  | 20.000             |
| 5.                | Nasi Kotak                       | 1 (Satu) Protein                      | Kotak  | 35.000             |
| 6.                | Nasi Bungkus Restoran            | 1 (Satu) Protein                      | bks    | 26.000             |

### 1.3.3 Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

1. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan digunakan untuk menunjang kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Kesehatan
2. Uraian komponen belanja dari makan minum fasilitas pelayanan urusan kesehatan mengacu pada juknis pada bidang kesehatan

| 5.1.02.01.01.0056 |   | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan |              |                    |
|-------------------|---|---|--------------|--------------------|
| No.               | Komponen  | Spesifikasi   | Satuan       | Besaran Harga (Rp) |
| 1                 | Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | Biaya Belanja PMT Lokal Bumil KEK                                     | Orang / Hari | 21.500             |
|                   |   | Biaya Belanja PMT Lokal Balita Gizi Kurang                            | Orang / Hari | 16.500             |
| 2                 | Belanja Pemberian Makanan Kesehatan                           | Balita Gizi Kurang  | Orang / Hari | 16.500             |
|                   |   | Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Klonis)                                  | Orang / Hari | 21.500             |

### 1.3.4 Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Satuan biaya makan dan minum aktivitas lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum serta snack untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah berupa pelatihan/ bimbingan teknis/ sosialisasi/ workshop/ focus group discussion dan kegiatan yang sejenis.

| 5.1.02.01.01.0058 |                          | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |        |                    |  |
|-------------------|--------------------------|--|--------|--------------------|--|
| No.               | Komponen                 | Spesifikasi                                    | Satuan | Besaran Harga (Rp) |  |
| 1                 | Nasi Bungkus Rumah Makan | 1 (Satu) Protein                               | bks    | 22.000             |  |
|                   | Nasi Bungkus Restoran    | 1 (Satu) Protein                               | bks    | 26.000             |  |
|                   | Nasi Kotak               | 1 (Satu) Protein                               | Kotak  | 35.000             |  |
|                   | Snack Kotak              | Snack Kotak                                    | Kotak  | 8.000              |  |

#### 1.4 Satuan Biaya Pemeliharaan

##### 1.4.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

###### 1.4.1.1 Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger

1. Satuan biaya pemeliharaan alat berat apung merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional alat berat apung, yang digunakan untuk mempertahankan alat berat apung agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan alat berat apung sudah termasuk biaya penggantian suku cadang, service, dan biaya pencucian kendaraan dinas selama satu tahun.

###### 1.4.1.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 atau lebih merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4 atau lebih, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas roda 4 atau lebih agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 atau lebih sudah termasuk biaya penggantian suku cadang, service, dan biaya pencucian kendaraan dinas selama satu tahun;
3. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4 atau lebih tidak diperuntukan bagi:
4. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
5. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
6. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan kondisi tertentu diperuntukan untuk kendaraan dinas yang membutuhkan biaya yang besar dan/atau akibat kecelakaan kendaraan.
7. Pengalokasian Anggaran biaya pemeliharaan kendaraan kondisi tertentu dengan membuat telaahan staf oleh kepala SKPD dengan melampirkan perhitungan biaya dari bengkel atas persetujuan Bupati.

###### 1.4.1.3 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua

1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 2, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas roda 2 agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sudah termasuk biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 2 selama satu tahun;

3. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:
  - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau.
  - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- 1.4.1.4 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
  1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 3 merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 3, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas roda 3 agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
  2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 3 sudah termasuk biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 3 selama satu tahun;
  3. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas tidak diperuntukan bagi:
    - e. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau.
    - f. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- 1.4.1.5 Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
  1. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas bermotor khusus merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas bermotor khusus, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas bermotor khusus agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
  2. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas bermotor khusus sudah termasuk biaya penggantian suku cadang, service, dan biaya pencucian kendaraan dinas selama satu tahun;
  3. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas bermotor khusus tidak diperuntukan bagi:
    - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
    - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
  4. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan kondisi tertentu diperuntukan untuk kendaraan dinas bermotor khusus yang membutuhkan biaya yang besar dan/atau akibat kecelakaan kendaraan.
  5. Pengalokasian Anggaran biaya pemeliharaan kendaraan kondisi tertentu dengan membuat telaahan staf oleh kepala SKPD dengan melampirkan perhitungan biaya dari bengkel atas persetujuan Bupati.

1.4.1.6 Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set

1. Satuan biaya pemeliharaan Electric Generating Set merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional Electric Generating Set, yang digunakan untuk mempertahankan Electric Generating Set agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
2. Satuan biaya pemeliharaan Electric Generating Set sudah termasuk biaya penggantian suku cadang, service, dan biaya pencucian kendaraan dinas selama satu tahun.

1.4.1.7 Pemeliharaan Inventaris Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer dan AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

1.4.1.8 Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya

Satuan biaya pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen   | Spesifikasi                 | Satuan          | Harga Satuan |
|----|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya<br>Pemeliharaan Alat Berat | Spesifikasi Berat           | Unit/<br>Tahun  | 125.000.000  |
|    |                   |  | Spesifikasi Ringan          | Unit/<br>Tahun  | 50.000.000   |
|    |                   |  | Spesifikasi Sedang          | Unit/<br>Tahun  | 100.000.000  |
| 2  | 5.1.02.03.02.0015 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger<br>Perahu Penumpang                 | Usia < 2 Tahun              | Unit /<br>Tahun | 3.000.000    |
|    |                   |  | Usia 2 s.d < 7 Tahun        | Unit /<br>Tahun | 4.000.000    |
|    |                   |  | Usia > 7 Tahun              | Unit /<br>Tahun | 7.000.000    |
| 3  | 5.1.02.03.02.0016 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik<br>Speed Boat                           | Usia < 2 Tahun              | Unit /<br>Tahun | 5.000.000    |
|    |                   |  | Usia 2 s.d < 7 Tahun        | Unit /<br>Tahun | 10.000.000   |
|    |                   |  | Usia > 7 Tahun              | Unit /<br>Tahun | 20.000.000   |
| 4  | 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set<br>Pemeliharaan Genset            | Kapasitas kecil dari 50 KVA | Unit /<br>Tahun | 3.000.000    |
|    |                   |  | Kapasitas 75 KVA            | Unit /<br>Tahun | 4.000.000    |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen  | Spesifikasi   | Satuan       | Harga Satuan |
|----|-------------------|---|---|--------------|--------------|
|    |                   |   | Kapasitas 100 KVA   | Unit / Tahun | 5.000.000    |
|    |                   |   | Kapasitas 125 KVA   | Unit / Tahun | 6.000.000    |
|    |                   |   | Kapasitas 150 KVA   | Unit / Tahun | 7.000.000    |
|    |                   |   | Kapasitas 175 KVA   | Unit / Tahun | 8.000.000    |
|    |                   |   | Kapasitas 200 KVA   | Unit / Tahun | 9.000.000    |
|    |                   |   | Kapasitas 250 KVA   | Unit / Tahun | 10.000.000   |
|    |                   |   | Kapasitas 275 KVA   | Unit / Tahun | 11.000.000   |
|    |                   |   | Kapasitas 300 KVA   | Unit / Tahun | 12.500.000   |
|    |                   |   | Kapasitas diatas 350 KVA  | Unit / Tahun | 13.000.000   |
|    |                   |   | Kapasitas diatas 450 KVA  | Unit / Tahun | 14.000.000   |
|    |                   |   | Kapasitas diatas 500 KVA  | Unit / Tahun | 15.000.000   |
| 5  | 5.1.02.03.02.0023 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa  |   |              |              |
|    |                   | Pemeliharaan Pompa Spam   | Pemeliharaan Pompa, Asesories dan elektrikal SPAM                 | Unit/ Tahun  | 12.000.000   |
| 6  | 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |   |              |              |
|    |                   | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat  | Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah/ Ketua DPRD / Wakil Ketua DPRD | Unit / Tahun | 40.000.000   |
|    |                   |   | Pejabat Esselon II A  | Unit / Tahun | 30.000.000   |
|    |                   |   | Pejabat Esselon II B  | Unit / Tahun | 15.000.000   |
| 7  | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang        |   |              |              |
|    |                   | Kendaraan Dinas Operasional Roda 4  | Usia < 2 Tahun  | Unit / Tahun | 7.500.000    |
|    |                   |   | Usia 2 s.d 7 Tahun  | Unit / Tahun | 12.500.000   |
|    |                   |   | Usia > 7 Tahun  | Unit / Tahun | 15.000.000   |
|    |                   |   | Pemeliharaan kendraan dinas roda 4 kondisi tertentu BA 39 V       | Unit         | 45.940.000   |
|    |                   | Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 atau Lebih   | Usia < 2 Tahun  | Unit / Tahun | 15.000.000   |
|    |                   |   | Usia 2 s.d 7 Tahun  | Unit / Tahun | 20.000.000   |
|    |                   |   | Usia >7 Tahun   | Unit /       | 25.000.000   |

| No             | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen   | Spesifikasi                     | Satuan  | Harga Satuan |             |
|----------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--------------|-------------|
| 8              | 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang                     |                                 |   | Tahun        |             |
|                |                   | Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Barang  | Usia < 2 Tahun                  | Unit / Tahun  | 10.000.000   |             |
|                |                   |  | Usia 2 s.d 7 Tahun              | Unit / Tahun  | 15.000.000   |             |
| 9              | 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                          |                                 |   |              |             |
|                |                   | Kendaraan Roda 2   | Usia < 2 Tahun                  | Unit / Tahun  | 1.000.000    |             |
|                |                   |  | Usia 2 s.d 7 Tahun              | Unit / Tahun  | 1.250.000    |             |
| Usia > 7 Tahun | Unit / Tahun      |  | 1.500.000                       |   |              |             |
| 10             | 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga                         |                                 |   |              |             |
|                |                   | Kendaraan Roda 3   | Kendaraan Sampah                | Unit / Tahun  | 3.000.000    |             |
| 11             | 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus                              |                                 |   |              |             |
|                |                   | Damkar   | Usia < 2 Tahun                  | Unit / Tahun  | 15.000.000   |             |
|                |                   |  | Usia 2 s.d 7 Tahun              | Unit / Tahun  | 20.000.000   |             |
|                |                   |  | Usia > 7 Tahun                  | Unit / Tahun  | 30.000.000   |             |
|                |                   |  |                                 | Pemeliharaan Kondisi Tertentu Mobil Pemadam Kebakaran | Paket        | 200.000.000 |
|                |                   | Mobil Ambulan  | Usia < 2 Tahun                  | Unit / Tahun  | 15.000.000   |             |
|                |                   |  | Usia 2 s.d 7 Tahun              | Unit / Tahun  | 20.000.000   |             |
| Usia > 7 Tahun | Unit / Tahun      |  | 30.000.000                      |   |              |             |
| 12             | 5.1.02.03.02.0059 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi |                                 |   |              |             |
|                |                   | Perbaikan Timbangan  | Timbangan Elektronik            | Unit/ Tahun   | 10.000.000   |             |
| 13             | 5.1.02.03.02.0085 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain                                    |                                 |   |              |             |
|                |                   | Jasa Pemeliharaan Instrumen Laboratorium   | alat dan instrumen laboratorium | Unit/ Tahun   | 1.000.000    |             |
| 14             | 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor                              |                                 |   |              |             |
|                |                   | Pemeliharaan dan   | Alat Uji Berat (Axle            | Unit /  | 6.050.000    |             |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen  | Spesifikasi   | Satuan  | Harga Satuan   |
|----|-------------------|---|---|---|--|
|    |                   | Perawatan Alat Uji  | Load Tester)<br>Alat Uji Rem ( Brake Tester)<br>Ketebalan Asap (Smoke Tester)<br>Uji Emisi CO HC (Gas Anaizer)<br>Uji Kegelapan Kaca (Tint Tester)<br>Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester)<br>Uji Lampu Utama (Headlight Tester)<br>Uji Penunjuk Kecepatan (Speedometer Tester)<br>Uji Tingkat Suara (Sound Level Tester) | Tahun<br>Unit / Tahun<br>Unit / Tahun<br>Unit / Tahun<br>Unit / Tahun<br>Unit / Tahun<br>Unit / Tahun<br>Unit / Tahun<br>Unit / Tahun<br>Unit / Tahun | 6.050.000<br>3.250.000<br>3.250.000<br>3.350.000<br>6.250.000<br>4.500.000<br>4.550.000<br>2.750.000 |
| 15 | 5.1.02.03.02.0103 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman<br>Pemeliharaan Mesin potong rumput<br>pemeliharaan Gergaji mesin | Spesifikasi : Mesin potong rumput dorong<br>Mesin potong rumput 2 tak<br>Pemeliharaan sinso   | Pengolahan-Alat<br>Unit/<br>Tahun<br>Unit/<br>Tahun<br>Unit/<br>Tahun   | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000  |
| 16 | 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya<br>Pemeliharaan kontainer sampah                      | peggantian plat besi + pengelasan + pengecatan  | Unit/<br>Tahun  | 9.500.000  |
| 17 | 5.1.02.03.02.0118 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel<br>Pemeliharaan Inventaris Kantor                             | Inventaris Kantor   | Orang /<br>Tahun  | 80.000   |
| 18 | 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin<br>Pemeliharaan AC                                   | AC-Split<br>AC Sentral  | Unit /<br>Tahun<br>Unit /<br>Tahun  | 610.000<br>20.000.000  |
| 19 | 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)<br>Pemeliharaan Pompa Air      | Service Pompa air dan Jaringannya Kantor Sekretariat DPRD   | Unit/<br>Tahun  | 40.000.000   |
| 20 | 5.1.02.03.02.0132 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio<br>Pemeliharaan                           | Pemeliharaan Soud   | Unit/   | 500.000  |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen   | Spesifikasi                   | Satuan       | Harga Satuan |             |
|----|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 21 | 5.1.02.03.02.0404 | Sound System   | System Kantor DPRD            | Tahun        |              |             |
|    |                   | Pemeliharaan Videotron   | Pemeliharaan Mic Kanto DPRD   | Paket        | 30.000.000   |             |
|    |                   |  | Pemeliharaan Video Tron DPRD  | Paket        | 25.000.000   |             |
|    |                   | Pemeliharaan Videotron   |                               | M2           | 5.000.000    |             |
| 21 | 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan                |                               |              |              |             |
| 22 | 5.1.02.03.02.0405 | Pemeliharaan Server Aplikasi   | Pemeliharaan Server BKD       | Unit/Tahun   | 30.000.000   |             |
| 22 | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                |                               |              |              |             |
| 23 | 5.1.02.03.02.0409 | Pemeliharaan Komputer  | Pemeliharaan Laptop/ Komputer | Unit / Tahun | 500.000      |             |
| 23 | 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |                               |              |              |             |
| 24 | 5.1.02.03.02.0492 | Pemeliharaan Printer   | Pemeliharaan Printer          | Unit / Tahun | 500.000      |             |
|    |                   | Pemeliharaan Printer E-KTP   | Penggantian Print Heat Evolis | Unit/Tahun   | 8.880.000    |             |
|    |                   | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Darat-Rambu Bersuar             |                               |              |              | Lalu Lintas |
|    |                   | Rehabilitas Rambu  | Rambu-Rambu Lalu Lintas       | Tahun        | 15.000.000   |             |


 BUPATI DHARMASRAYA,  
  
 SULTAN RISKA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2025.

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA YANG  
BERFUNGSI SEBAGAI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Satuan Biaya Kegiatan Lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Persiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang merupakan kebutuhan yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

1. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
2. Satuan Biaya Honorarium dan Jasa;
3. Satuan Biaya Lembur;
4. Satuan Biaya Sewa ;
5. Satuan Biaya Jasa Konsultansi;
6. Satuan Biaya Iuran Kesehatan dan Asuransi;
7. Satuan Biaya Barang Dan Jasa BOK Puskesmas, dan
8. Satuan Biaya Hadiah Perlombaan

2.1 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

2.1.1 Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 4 Antar Kecamatan dalam Kabupaten (dalam liter):

| 5.1.02.01.01.0004 |               | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |                  |         |           |               |         |        |         |              |            |            |              |             |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|--------|---------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| No                | Kecamatan     | Standar Kendaraan Roda 4              | Kecamatan Tujuan |         |           |               |         |        |         |              |            |            |              | Gedung DPRD |
|                   |               |                                       | Pulau Punjung    | Sitiung | Koto Baru | Sungai Rumbai | IX Koto | Timpeh | Tiumang | Padang Laweh | Koto salak | Koto Besar | Asam Jujuhan |             |
| 1                 | Pulau Punjung | A                                     |                  | 6       | 11        | 13            | 12      | 11     | 11      | 10           | 13         | 14         | 24           | 4           |
|                   |               | B                                     |                  | 7       | 12        | 15            | 14      | 13     | 13      | 12           | 15         | 16         | 28           | 5           |
|                   |               | C                                     |                  | 8       | 15        | 18            | 17      | 15     | 15      | 14           | 18         | 19         | 33           | 6           |
| 2                 | Sitiung       | A                                     | 6                |         | 6         | 9             | 18      | 6      | 6       | 5            | 8          | 10         | 20           | 3           |
|                   |               | B                                     | 7                |         | 7         | 11            | 20      | 6      | 7       | 6            | 9          | 12         | 24           | 3           |
|                   |               | C                                     | 8                |         | 9         | 13            | 24      | 8      | 9       | 7            | 11         | 14         | 28           | 4           |
| 3                 | Koto Baru     | A                                     | 11               | 6       |           | 11            | 22      | 10     | 3       | 6            | 2          | 6          | 16           | 7           |
|                   |               | B                                     | 12               | 7       |           | 12            | 26      | 11     | 3       | 7            | 3          | 7          | 18           | 8           |
|                   |               | C                                     | 15               | 9       |           | 15            | 31      | 13     | 4       | 8            | 3          | 8          | 22           | 10          |
| 4                 | Sungai Rumbai | A                                     | 13               | 9       | 11        |               | 25      | 13     | 8       | 10           | 7          | 5          | 6            | 10          |
|                   |               | B                                     | 15               | 11      | 12        |               | 29      | 15     | 9       | 12           | 8          | 5          | 6            | 11          |
|                   |               | C                                     | 18               | 13      | 15        |               | 34      | 18     | 11      | 14           | 10         | 6          | 8            | 13          |
| 5                 | Sembilan Koto | A                                     | 12               | 18      | 22        | 25            |         | 20     | 22      | 22           | 24         | 25         | 35           | 16          |
|                   |               | B                                     | 14               | 20      | 26        | 29            |         | 23     | 26      | 25           | 28         | 29         | 41           | 19          |
|                   |               | C                                     | 17               | 24      | 31        | 34            |         | 27     | 31      | 30           | 34         | 35         | 49           | 22          |
| 6                 | Timpeh        | A                                     | 11               | 6       | 10        | 13            | 20      |        | 8       | 5            | 12         | 14         | 24           | 8           |
|                   |               | B                                     | 13               | 6       | 11        | 15            | 23      |        | 9       | 6            | 13         | 16         | 28           | 9           |
|                   |               | C                                     | 15               | 8       | 13        | 18            | 27      |        | 11      | 7            | 16         | 19         | 33           | 11          |
| 7                 | Tiumang       | A                                     | 11               | 6       | 3         | 8             | 22      | 8      |         | 3            | 4          | 9          | 18           | 7           |
|                   |               | B                                     | 13               | 7       | 3         | 9             | 26      | 9      |         | 4            | 4          | 10         | 21           | 8           |
|                   |               | C                                     | 15               | 9       | 4         | 11            | 31      | 11     |         | 4            | 5          | 12         | 26           | 10          |
| 8                 | Padang Laweh  | A                                     | 10               | 5       | 6         | 10            | 22      | 5      | 3       |              | 8          | 11         | 21           | 7           |
|                   |               | B                                     | 12               | 6       | 7         | 12            | 25      | 6      | 4       |              | 9          | 13         | 24           | 8           |

| No | Kecamatan    | Standar Kendaraan Roda 4 | Kecamatan Tujuan |         |           |               |         |         |          |              |            |            |              | Gedung DPRD |
|----|--------------|--------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|---------|----------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|    |              |                          | Pulau Punjung    | Sitiung | Koto Baru | Sungai Rumbai | IX Koto | Tim-peh | Tiu-mang | Padang Laweh | Koto salak | Koto Besar | Asam Jujuhan |             |
|    |              | C                        | 14               | 7       | 8         | 14            | 30      | 7       | 4        |              | 11         | 15         | 29           | 10          |
| 9  | Koto salak   | A                        | 13               | 8       | 2         | 7             | 24      | 12      | 4        | 8            |            | 8          | 17           | 9           |
|    |              | B                        | 15               | 9       | 3         | 8             | 28      | 13      | 4        | 9            |            | 9          | 20           | 10          |
|    |              | C                        | 18               | 11      | 3         | 10            | 34      | 16      | 5        | 11           |            | 10         | 24           | 12          |
| 10 | Koto Besar   | A                        | 14               | 10      | 6         | 5             | 25      | 14      | 9        | 11           | 8          |            | 14           | 13          |
|    |              | B                        | 16               | 12      | 7         | 5             | 29      | 16      | 10       | 13           | 9          |            | 16           | 15          |
|    |              | C                        | 19               | 14      | 8         | 6             | 35      | 19      | 12       | 15           | 10         |            | 19           | 18          |
| 11 | Asam Jujuhan | A                        | 24               | 20      | 16        | 6             | 35      | 24      | 18       | 21           | 17         | 14         |              | 19          |
|    |              | B                        | 28               | 24      | 18        | 6             | 41      | 28      | 21       | 24           | 20         | 16         |              | 22          |
|    |              | C                        | 33               | 28      | 22        | 8             | 49      | 33      | 26       | 29           | 24         | 19         |              | 26          |
| 12 | Gedung DPRD  | A                        | 4                | 3       | 7         | 10            | 16      | 8       | 7        | 7            | 9          | 13         | 19           |             |
|    |              | B                        | 5                | 3       | 8         | 11            | 19      | 9       | 8        | 8            | 10         | 15         | 22           |             |
|    |              | C                        | 6                | 4       | 10        | 13            | 22      | 11      | 10       | 10           | 12         | 18         | 26           |             |

2.1.2 Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Roda 2 (Dua) Antar Kecamatan dalam Kabupaten (dalam liter):

| No | Kecamatan     | Standar Kendaraan (Roda 2) | Kecamatan Tujuan |         |           |               |         |         |          |              |            |            |              | Gedung DPRD |
|----|---------------|----------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|---------|----------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|    |               |                            | Pulau Punjung    | Sitiung | Koto Baru | Sungai Rumbai | IX Koto | Tim-peh | Tiu-mang | Padang Laweh | Koto salak | Koto Besar | Asam Jujuhan |             |
| 1  | Pulau Punjung | A                          |                  | 3       | 5         | 6             | 6       | 5       | 5        | 5            | 6          | 7          | 11           | 2           |
|    |               | B                          |                  | 4       | 6         | 8             | 7       | 7       | 7        | 6            | 8          | 8          | 14           | 3           |
| 2  | Sitiung       | A                          | 3                |         | 3         | 5             | 8       | 3       | 3        | 3            | 4          | 5          | 10           | 2           |
|    |               | B                          | 4                |         | 4         | 6             | 10      | 3       | 4        | 3            | 5          | 6          | 12           | 2           |
| 3  | Koto Baru     | A                          | 5                | 3       |           | 5             | 11      | 5       | 2        | 3            | 1          | 3          | 8            | 4           |
|    |               | B                          | 6                | 4       |           | 6             | 13      | 6       | 2        | 4            | 2          | 4          | 9            | 4           |
| 4  | Sungai Rumbai | A                          | 6                | 5       | 5         |               | 12      | 6       | 4        | 5            | 4          | 2          | 3            | 5           |
|    |               | B                          | 8                | 6       | 6         |               | 15      | 8       | 5        | 6            | 4          | 3          | 3            | 6           |
| 5  | Sembilan      | A                          | 6                | 8       | 11        | 12            |         | 9       | 11       | 10           | 12         | 12         | 17           | 8           |

| No | Kecamatan    | Standar Kendaraa n (Roda 2) | Kecamatan Tujuan |         |           |               |         |         |          |              |            |            |              | Gedung DPRD |
|----|--------------|-----------------------------|------------------|---------|-----------|---------------|---------|---------|----------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|    |              |                             | Pulau Punjung    | Sitiung | Koto Baru | Sungai Rumbai | IX Koto | Tim-peh | Tiu-mang | Padang Laweh | Koto salak | Koto Besar | Asam Jujuhan |             |
|    | Koto         | B                           | 7                | 10      | 13        | 15            |         | 12      | 13       | 13           | 14         | 15         | 21           | 10          |
| 6  | Timpeh       | A                           | 5                | 3       | 5         | 6             | 9       |         | 4        | 3            | 6          | 7          | 11           | 4           |
|    |              | B                           | 7                | 3       | 6         | 8             | 12      |         | 5        | 3            | 7          | 8          | 14           | 5           |
| 7  | Tiumang      | A                           | 5                | 3       | 2         | 4             | 11      | 4       |          | 2            | 2          | 4          | 9            | 4           |
|    |              | B                           | 7                | 4       | 2         | 5             | 13      | 5       |          | 2            | 2          | 5          | 11           | 4           |
| 8  | Padang Laweh | A                           | 5                | 3       | 3         | 5             | 10      | 3       | 2        |              | 4          | 5          | 10           | 4           |
|    |              | B                           | 6                | 3       | 4         | 6             | 13      | 3       | 2        |              | 5          | 7          | 12           | 4           |
| 9  | Koto salak   | A                           | 6                | 4       | 1         | 4             | 12      | 6       | 2        | 4            |            | 4          | 8            | 4           |
|    |              | B                           | 8                | 5       | 2         | 4             | 14      | 7       | 2        | 5            |            | 5          | 10           | 5           |
| 10 | Koto Besar   | A                           | 7                | 5       | 3         | 2             | 12      | 7       | 4        | 5            | 4          |            | 7            | 6           |
|    |              | B                           | 8                | 6       | 4         | 3             | 15      | 8       | 5        | 7            | 5          |            | 8            | 8           |
| 11 | Asam Jujuhan | A                           | 11               | 10      | 8         | 3             | 17      | 11      | 9        | 10           | 8          | 7          |              | 9           |
|    |              | B                           | 14               | 12      | 9         | 3             | 21      | 14      | 11       | 12           | 10         | 8          |              | 11          |
| 12 | Gedung DPRD  | A                           | 2                | 2       | 4         | 5             | 8       | 4       | 4        | 4            | 4          | 6          | 9            |             |
|    |              | B                           | 3                | 2       | 4         | 6             | 10      | 5       | 4        | 4            | 5          | 8          | 11           |             |

- 2.1.3 Kebutuhan BBM untuk Kendaraan dinas dalam rangka pengambilan keliling sampah masyarakat sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke tempat tujuan.

| No | Tujuan        | Kendaraan Dinas Roda 4 |           | Roda 3 (Betor) |
|----|---------------|------------------------|-----------|----------------|
|    |               | Standar A              | Standar B |                |
| 1  | Pulau Punjung | 15                     | 20        | 4              |
| 2  | Sitiung       | 15                     | 20        |                |
| 3  | Koto Baru     | 20                     | 25        |                |
| 4  | Sungai Rumbai | 25                     | 30        |                |
| 5  | Sembilan Koto | 25                     | 30        |                |
| 6  | Timpeh        | 30                     | 35        |                |
| 7  | Tiumang       | 20                     | 25        |                |
| 8  | Padang Laweh  | 25                     | 30        |                |
| 9  | Koto Salak    | 25                     | 30        |                |
| 10 | Koto Besar    | 25                     | 30        |                |
| 11 | Asam Jujuhan  | 35                     | 40        |                |
| 12 | Gedung DPRD   | 10                     | 12        |                |

- 2.1.4 Kebutuhan BBM dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan ibukaota kabupaten tetangga yang diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke Kota Tujuan dan ditambah dengan kebutuhan BBM dalam kota

| No | Tujuan          | Standar |     |     |
|----|-----------------|---------|-----|-----|
|    |                 | A       | B   | C   |
| 1  | Muaro Sijunjung | 24      | 28  | 33  |
| 2  | Sawahlunto      | 30      | 35  | 42  |
| 3  | Solok           | 35      | 41  | 49  |
| 4  | Aro Suka        | 41      | 48  | 57  |
| 5  | Padang          | 52      | 60  | 72  |
| 6  | Bukit Tinggi    | 56      | 66  | 79  |
| 7  | Padang Panjang  | 53      | 61  | 74  |
| 8  | Batu Sangkar    | 41      | 47  | 57  |
| 9  | Painan          | 72      | 83  | 100 |
| 10 | Payakumbuh      | 47      | 55  | 66  |
| 11 | Pariaman / BIM  | 57      | 67  | 80  |
| 12 | Lubuk Basung    | 79      | 92  | 110 |
| 13 | Lubuk Sikaping  | 78      | 90  | 108 |
| 14 | Simpang Empat   | 98      | 114 | 137 |
| 15 | Padang Aro      | 66      | 77  | 92  |
| 16 | Muaro Bungo     | 32      | 38  | 45  |
| 17 | Muaro Tebo      | 45      | 53  | 63  |
| 18 | Batang Hari     | 85      | 99  | 119 |
| 19 | Taluak Kuantan  | 24      | 28  | 34  |
| 20 | Pekanbaru       | 69      | 81  | 97  |
| 21 | Jambi           | 99      | 115 | 138 |
| 22 | Palembang       | 166     | 194 | 233 |

Kebutuhan BBM dalam rangka perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke Kota Tujuan dan ditambah dengan kebutuhan BBM dalam kota

1. Untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transportasi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan standar kendaraan dan tempat tujuan;
2. Standar Kendaraan dikelompokan sebagai berikut:
  - a. Kendaan Dinas Roda 4 (empat) dikelompokan sebagai berikut:
    - 1) Standar A untuk kendaraan roda 4 (empat) dibawah 1.998 CC;
    - 2) Standar B untuk kendaraan roda 4 (empat) 1.998 CC– 2.450 CC;
    - 3) Standar C untuk kendaraan roda 4 (empat) diatas 2.450 CC;
  - b. Kendaan Dinas Roda 2 (dua) dikelompokan sebagai berikut:
    - 1) Standar A untuk kendaraan roda 2 (dua) sampai 125 CC;
    - 2) Standar B untuk kendaraan roda 2 (dua) diatas 125 CC;
3. Perhitungan jumlah liter BBM yang dianggarkan sebagaimana tersebut diatas berdasarkan kebutuhan jarak tempuh ke dan dari Ibu Kota Kabupaten/Kota dalam provinsi dan ke dan dari Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Dharmasraya.
4. Jika terjadi penambahan jarak perjalanan dinas dari Ibu Kota Kabupaten dan/atau dari Ibu Kota Kecamatan ke Nagari dan/atau perjalanan dinas antar nagari dalam Kecamatan maka kebutuhan penambahan BBM dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Dinas roda 4
    - 1) Standar A untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 8 (delapan) km
    - 2) Kendaraan Dinas roda 4 Standar B untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 6 (enam) km
    - 3) Kendaraan Dinas roda 4 Standar C untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 4 (empat) km
  - b. Kendaraan Dinas roda 2
    - 1) Standar A untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 20 (dua puluh) km.
    - 2) Standar B untuk 1 (satu) liter BBM dengan jarak tempuh 15 (lima belas) km.
5. Kebutuhan BBM untuk Kendaraan dinas yang digunakan untuk pengambilan keliling sampah masyarakat sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana tersebut diatas diberikan untuk 1 (satu) kali operasional.
6. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk Kendaraan berupa, Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, Pertamina Dex dengan melampirkan bon cetak elektronik pada SPBU bersangkutan.
7. Dalam hal bon cetak elektronik pada SPBU sebagaimana dimaksud angka 7 tidak tersedia, maka dapat digantikan dengan menggunakan bon manual.

## 2.2 Satuan Biaya Honorarium Non ASN

### 2.2.1 Jasa Tenaga Pendidikan

Belanja Jasa Tenaga Kependidikan diberikan kepada Non ASN setiap bulannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pendidikan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

### 2.2.2 Jasa Tenaga Kesehatan

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

### 2.2.3 Jasa Tenaga Laboratorium

Belanja Jasa Tenaga Laboratorium diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Laboratorium sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

### 2.2.4 Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Belanja Honorarium Tenaga Keamanan/ Piket Tenaga Satpol PP diberikan kepada Tenaga Non ASN Satpol PP dalam melaksanakan tugas menjaga Keamanan pada kegiatan tertentu sesuai dengan kehadiran per shift (8 jam per shift);
3. Belanja Operasional Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Tertentu diberikan kepada Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja/ yang disetarakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas pada kegiatan tertentu;
4. Honorarium yang diberikan untuk belanja sebagaimana point 3 (tiga) diatas sudah termasuk uang harian dan makan minum petugas yang dibayarkan secara lumsom.

### 2.2.5 Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

1. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan penyelamatan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Belanja Honorarium Piket Tenaga Pemadam Kebakaran diberikan kepada Tenaga Non ASN Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pada pos pemadam kebakaran sesuai dengan kehadiran per shift (8 jam per shift);
3. Belanja Operasional Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diberikan kepada Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Surat Perintah Tugas pada kegiatan tertentu;
4. Honorarium yang diberikan untuk belanja sebagaimana point 3 (tiga) diatas sudah termasuk uang harian dan makan minum petugas yang dibayarkan secara lumsom.

### 2.2.6 Jasa Belanja Tenaga Penanganan Bencana

1. Belanja Jasa Belanja Tenaga Penanganan Bencana diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Penanganan Bencana sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Belanja Operasional Penanganan Bencana Daerah diberikan kepada Tenaga Penanganan Bencana sesuai dengan Surat Perintah Tugas pada kegiatan tertentu;
3. Honorarium yang diberikan untuk belanja sebagaimana point 2 (dua) diatas sudah termasuk uang harian dan makan minum petugas yang dibayarkan secara lumsom.

#### 2.2.7 Jasa Tenaga Penanganan Sosial

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Tenaga Penanganan Sosial sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;

#### 2.2.8 Jasa Tenaga Sumber Daya Air

Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air diberikan setiap bulannya kepada Non ASN yang bekerja melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Sumber Daya Air (SPAM) sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

#### 2.2.9 Jasa Tenaga Perhubungan

1. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Perhubungan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Belanja Operasional Penanganan Lalu Lintas Hari Besar / Kondisi Tertentu diberikan kepada Tenaga Perhubungan/ yang disetarakan sesuai dengan Surat Perintah Tugas pada kegiatan tertentu;
3. Honorarium yang diberikan untuk belanja sebagaimana point 2 (dua) diatas sudah termasuk uang harian dan makan minum petugas yang dibayarkan secara lumsom.

#### 2.2.10 Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan

Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pertanian dan Pangan sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;

#### 2.2.11 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan

Belanja Jasa Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pelayanan Kearsipan dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

#### 2.2.12 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan diberikan setiap kegiatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Kesenian dan Kebudayaan sesuai Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD dan/ atau perjanjian kerja (kontrak).

#### 2.2.13 Jasa Tenaga Administrasi

Belanja Jasa Tenaga Administrasi diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Administrasi Perkantoran sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

#### 2.2.14 Jasa Tenaga Operator Komputer

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Operator Komputer sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

#### 2.2.15 Jasa Tenaga Ahli

1. Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau kompetensi dibidangnya dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya maupun pengeluaran sertifikasi serta pendampingan terhadap kasus hukum.
2. Tenaga Ahli Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi dilakukan untuk kegiatan pemerintah daerah yang perlu pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang dilakukan dalam bentuk perikatan kontrak perorangan maupun Mou dengan lembaga/ perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### 2.2.16 Jasa Tenaga Kebersihan

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Kebersihan Kantor atau sarana Pemerintah Lainnya sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu dan/ atau kontrak kerja untuk pekerjaan kontraktual.

#### 2.2.17 Jasa Tenaga Keamanan

Belanja Jasa Tenaga Keamanan diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Keamanan Kantor atau sarana Pemerintah Lainnya sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

#### 2.2.18 Jasa Tenaga Supir

1. Belanja Jasa Tenaga Supir diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Sopir Kendaraan Dinas sesuai dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu;
2. Untuk belanja Jasa Sopir Mobil Tinja diberikan kepada Non ASN berdasarkan trip pengangkutan tinja sesuai dengan surat tugas dari Kepala SKPD tanpa biaya perjalanan dinas;
3. Honorarium Operator Alat Berat diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan pemerintah daerah;
4. Untuk Operator Alat Berat yang digunakan oleh SKPD dalam kegiatan tertentu diberikan jasa Operator Alat berat sebesar Rp.250.000,-/ hari;
5. Untuk Operator Alat Berat yang digunakan oleh SKPD dalam kegiatan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah diberikan Jasa Operator sebesar Rp.200,000,-/hari;
6. Jasa yang diberikan kepada operator alat berat sebagai point 4 (empat) dan Point 5 (lima) tersebut diatas merupakan uang harian dan akomosi yang dibayarkan secara lumsun.

#### 2.2.19 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak

Belanja Jasa Juru Masak diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang masak dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.

#### 2.2.20 Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik

1. Belanja Jasa Teknisi Mekanik dan Listrik diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Teknisi Mekanik dan Listrik dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.
2. Belanja Jasa Tenaga Mekanik dan Listrik untuk servis kendaraan dinas dan alat berat serta peralatan milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Tenaga Tukang maupun profesi keahlian lainnya diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

#### 2.2.21 Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara dapat diberikan kepada ASN, Masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lomba/acara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jasa Tim Penilai/Wasit/Juri diberikan dalam rangka sebagai ahli dalam penilaian perlombaan/acara.
2. Jasa Pelatih/Tim Oficial/Atlit/Kontingen diberikan dalam rangka :
  - a. Latihan/TC/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
  - b. Mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kabupaten Dharmasraya.
  - c. Untuk latihan/TC/persiapan dan pertandingan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Dharmasraya diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada peraturan Bupati ini.
3. Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan perlombaan/pertandingan.

#### 2.2.22 Jasa Tata Rias

Belanja Jasa Tata Rias merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Paskibra, kesenian dan kebudayaan.

#### 2.2.23 Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

1. Belanja Jasa Informasi dan Teknologi diberikan setiap bulannya kepada Non ASN berdasarkan kehadiran sesuai hari kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Informasi dan Teknologi dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.
2. Belanja Jasa Tenaga Programmer Komputer diberikan setiap bulannya kepada Non ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Programmer Komputer dengan perjanjian kerja dari Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu.
3. Bagi SKPD yang mengangkat tenaga Non ASN Programmer Komputer/ IT, untuk Tenisi komputer tidak dibenakan lagi menganggarkan jasa pemeliharaan ringan/ servis komputer

#### 2.2.24 Jasa Kontribusi Asosiasi

Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi diberikan kepada asosiasi, lembaga, organisasi atau sejenisnya yang membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, event, ataupun perlombaan yang bertaraf daerah, nasional maupun internasional.

2.2.25 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

Belanja Jasa Pencucian Pakaian/ Jasa Laundry merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Pencucian Pakaian/ Laundry

2.2.26 Belanja Jasa Kalibrasi

Belanja Jasa Kalibrasi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan penyediaan jasa kalibrasi seperti pengecekan/ pengetesan/ maintenance alat ukur, alat tera dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau lembaga sertifikasi.

2.2.27 Jasa Pengolahan Sampah

Belanja Jasa Pengolahan Sampah merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Pengolahan Sampah.

2.2.28 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi

Belanja Jasa Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi.

2.2.29 Belanja Jasa Pengukuran Tanah

Belanja Jasa Pengukuran Tanah merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan Pengukuran Tanah.

2.2.30 Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan

Belanja Jasa Iklan/reklame, Film dan Pemotretan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan penyediaan jasa Pengumuman/iklan dimedia cetak, online, dan media lainnya serta jasa pembuatan Film, Video dan Pemotretan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

2.2.31 Paket/Pengiriman

Belanja jasa Paket/Pengiriman diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jasa pengiriman dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2.2.32 Belanja Tagihan Telepon

Belanja Tagihan Telepon diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

#### 2.2.33 Tagihan Air

Belanja Tagihan Air diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

#### 2.2.34 Tagihan Listrik

Belanja Tagihan Listrik diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan sumber daya listrik atau perusahaan yang ditunjuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

#### 2.2.35 Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

Belanja jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Jurnal/Surat Kabar/Majalah berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

#### 2.2.36 Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan

Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi/internet/tv berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

#### 2.2.37 Penambahan Daya

Belanja Penambahan Daya diberikan kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Beban Penambahan Daya dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

#### 2.2.38 Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Belanja Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

#### 2.2.39 Rekening Penerangan Jalan Umum

Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan Belanja Jasa Listrik dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

### 2.3 Satuan Biaya Lembur

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil (ASN) Negara dan Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
2. Uang lembur dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil (ASN) Negara dan Non ASN yang melakukan kerja lembur maksimal 50 jam dalam 1 bulan;
3. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

#### 2.3.1 Ketentuan Khusus Terhadap Pemberian Honorarium Non ASN/PTT

1. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Non ASN yang berstatus Pegawai Honor Daerah yang diangkat oleh Bupati terhitung

- Tahun 2005 yang honorinya diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan pada saat awal pengangkatan tahun 2005.
2. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat diberikan gaji ke-13 dan ke-14 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pembayarannya diatur dalam Peraturan Bupati;
  3. Honorarium Tenaga Non ASN diberikan kepada seseorang yang dipekerjakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan kesepakatan kerja berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap pekerjaan yang dilaksanakan;
  4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak dapat dibayarkan Honorariumnya pada bulan berjalan apabila pegawai yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan selama 8 (delapan) hari akumulasi dalam bulan yang bersangkutan.
  5. Honorarium NON ASN yang gajinya berdasarkan hari kerja dibayarkan sesuai kehadiran.
  6. Honorarium pegawai NON ASN/PTT tetap dibayarkan apabila :
    - a. Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
    - b. Izin alasan sakit maksimal 2 (dua) hari dengan membuat surat permohonan izin sakit yang disetujui oleh Kepala SKPD;
    - c. Izin alasan sakit lebih dari 2 (hari) dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter;
    - d. Izin alasan melahirkan maksimal 3 (tiga) bulan untuk anak pertama sampai anak ke-3 dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala SKPD;
    - e. Izin alasan sakit terhadap Non ASN yang mengalami gugur kandungan paling lama 1½ (satu setengah) bulan dengan mengajukan permohonan dan surat keterangan dokter;
    - f. Izin alasan penting dapat diberikan apabila ibu,bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertu atau menantu mengalami sakit keras atau meninggal dunia dengan dengan mengajukan permohonan yang disetujui kepala SKPD paling lama 1 (satu) bulan;
    - g. Izin alasan penting dapat diberikan apabila umrah/naik haji dengan dengan mengajukan permohonan yang disetujui kepala SKPD paling lama 1½ (satu setengah) bulan;
    - h. Non ASN yang ditugaskan dalam kegiatan tertentu berupa perjalanan dinas/lembur diluar hari kerja dapat dibayarkan sebesar uang harian perjalanan dinas/ lembur;
  7. Perpanjangan perjanjian kerja oleh Kepala SKPD akan dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                       | Spesifikasi                                | Satuan           | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--|--|------------------|-----------------|
| 1  | 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan                     |  |                  |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN-<br>Tenaga Pendidikan | Guru PTT - S1                              | Orang /<br>Bulan | 2.200.000       |
|    |                   |  | Guru PTT -<br>Sarjana Muda/<br>D.III/ D.II | Orang /<br>Bulan | 2.100.000       |
|    |                   |  | Operator Sekolah                           | Orang /<br>Bulan | 300.000         |
|    |                   |  | Pengelola PAUD                             | Orang /<br>Bulan | 100.000         |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                        | Spesifikasi   | Satuan                       | Harga<br>Satuan |         |
|----|-------------------|---|---|------------------------------|-----------------|---------|
|    |                   |   | Guru SD   | Orang /<br>Bulan             | 350.000         |         |
|    |                   |   | Guru TK   | Orang /<br>Bulan             | 350.000         |         |
|    |                   |   | Guru SMP  | Orang /<br>Bulan             | 350.000         |         |
| 2  | 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan                       |   |                              |                 |         |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN-<br>Tenaga Kesehatan   | Honor Dokter<br>Daerah Terpencil                                | Orang /<br>Hari              | 135.000         |         |
|    |                   |   | Tenaga Kesehatan  | Orang /<br>Hari              | 55.000          |         |
|    |                   |   | Honor Dokter Non<br>Daerah Terpencil                            | Orang /<br>Hari              | 75.000          |         |
|    |                   |   | THL UPT<br>Puskesmas  | Orang /<br>Bulan             | 400.000         |         |
|    |                   |   | Dokter Spesialis<br>Dalam Daerah<br>(refferal)                  | Orang /<br>Hari              | 700.000         |         |
|    |                   |   | Dokter Spesialis<br>Luar Daerah<br>(referral)                   | Orang /<br>Hari              | 1.500.000       |         |
|    |                   |   | IUD, IMPLANT,<br>Pencabutan<br>Implant                          | Orang/<br>Kali               | 105.000         |         |
|    |                   |   | Jasa medis<br>operasional<br>penggerakan<br>pelayanan KB<br>MOW | Orang/<br>Kali               | 2.000.000       |         |
|    |                   |   | Jasa medis<br>operasional<br>penggerakan<br>pelayanan KB<br>MOP | Orang/<br>Kali               | 400.000         |         |
|    |                   |   | Pemeriksaan<br>Parasit Darah                                    | Pemeriksaan                  | Ekor            | 500.000 |
|    |                   |   | Pemeriksaan<br>Jembrana   | Pemeriksaan                  | Ekor            | 10.000  |
|    |                   |   | Jasa Tenaga<br>Keswan   | pengambilan<br>sampel ternak | Ekor            | 20.000  |
|    |                   |   | PCR Daging Sapi<br>(Cemaran Babi)                               | Cemaran babi                 | Ekor            | 500.000 |
|    |                   |   | Uji Pembusukan<br>Daging  | Pembusukan<br>daging         | Ekor            | 50.000  |
|    |                   | belanja jasa tenaga<br>kesehatan                    | insentif ukm  | Orang                        | 100.000         |         |
|    |                   | Tenaga Medis  | Tenaga medis<br>kegiatan tertentu                               | OH                           | 130.000         |         |
| 3  | 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium                    |   |                              |                 |         |
|    |                   | Honorarium Non<br>ASN - Jasa Tenaga<br>Laboratorium | Petugas<br>Laboratorium   | Orang /<br>Hari              | 55.000          |         |
|    |                   |   | Visum et<br>Repertum -<br>Korban Hidup                          | Orang/<br>Kali               | 550.000         |         |

| NO | Rekening Belanja | Uraian Belanja /<br>Komponen | Spesifikasi  | Satuan         | Harga<br>Satuan |
|----|------------------|------------------------------|--|----------------|-----------------|
|    |                  |                              | Visum et<br>Repertum -<br>Korban Mati                      | Orang/<br>Kali | 500.000         |
|    |                  |                              | Parameter BOD  | Sampel         | 60.000          |
|    |                  |                              | Parameter COD  | Sampel         | 70.000          |
|    |                  |                              | Parameter Minyak<br>Lemak                                  | Sampel         | 125.000         |
|    |                  |                              | Parameter TSS  | Sampel         | 40.000          |
|    |                  |                              | Parameter TDS  | Sampel         | 25.000          |
|    |                  |                              | Parameter<br>Amoniak                                       | Sampel         | 55.000          |
|    |                  |                              | Parameter pH   | Sampel         | 25.000          |
|    |                  |                              | Parameter<br>Nitrogen Total                                | Sampel         | 65.000          |
|    |                  |                              | Parameter Timbal<br>(Pb)                                   | Sampel         | 160.000         |
|    |                  |                              | Parameter<br>Cadmium (Cd)                                  | Sampel         | 160.000         |
|    |                  |                              | Parameter Seng<br>(Zn)                                     | Sampel         | 75.000          |
|    |                  |                              | Total Coliform   | Sampel         | 86.000          |
|    |                  |                              | Fenol  | Sampel         | 120.000         |
|    |                  |                              | Klorin Bebas   | Sampel         | 25.000          |
|    |                  |                              | Air Raksa (Hg)   | Sampel         | 120.000         |
|    |                  |                              | Sianida  | Sampel         | 55.000          |
|    |                  |                              | Tembaga, Nitrit,<br>Amonia, Mbas,<br>TDS, Minyak<br>Lemak  | Paket          | 450.000         |
|    |                  |                              | Nitrat, Total<br>Phosphat, Fecal<br>Coli, BOD, COD,<br>TSS | Paket          | 450.000         |
|    |                  | Pemeriksaan<br>Sampel SHK    | Pemeriksaan<br>Sampel SHK ke<br>Laboratorium<br>Rujukan    | Paket          | 59.500          |
|    |                  | Pemantapan mutu<br>eksternal | Pengujian<br>Hematologi                                    | Paket          | 1.150.000       |
|    |                  | Pemantapan mutu<br>eksternal | Pengujian<br>Imunologi                                     | Paket          | 1.400.000       |
|    |                  | Pemantapan mutu<br>eksternal | Pengujian Kimia<br>Kesehatan                               | Paket          | 900.000         |
|    |                  | Pemantapan mutu<br>eksternal | Pengujian Kimia<br>Klinik                                  | Paket          | 850.000         |
|    |                  | Pemantapan mutu<br>eksternal | Pengujian<br>Mikrobiologi                                  | Paket          | 1.575.000       |
|    |                  | Pemantapan mutu<br>eksternal | Pengujian<br>Urinalisa                                     | Paket          | 800.000         |
|    |                  | Jasa Pemeriksaan<br>Sampel   | Analisis air<br>embung di<br>labkesda Sumbar               | Paket          | 1.200.000       |
|    |                  | Jasa Pemeriksaan<br>Sampel   | Analisis air sumur<br>di labkesda<br>Sumbar                | Paket          | 2.000.000       |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja / Komponen   | Spesifikasi  | Satuan        | Harga Satuan |
|----|-------------------|---|--|---------------|--------------|
|    |                   | Jasa Pemeriksaan Sampel   | Parameter Tembaga (Cu)   | Sampel        | 75.000       |
| 4  | 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  |  |               |              |
|    |                   | Tenaga Fasilitator Masyarakat Teknis  | Pendidikan Minimal D3  | Bulan         | 3.990.000    |
| 5  | 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                              |  |               |              |
|    |                   | Honorarium Tenaga Non ASN - Honorarium tenaga Kemanan   | Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja  | Orang / Hari  | 65.000       |
|    |                   |   | Petugas Jaga/Piket Satpol PP   | Orang / Hari  | 50.000       |
|    |                   |   | Operasional Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Tertentu             | Orang / Hari  | 130.000      |
| 6  | 5.1.02.02.01.0018 | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  |  |               |              |
|    |                   | Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Honorarium Tenaga Non ASN - Tenaga Pemadam Kebakaran | Tenaga Pemadam Kebakaran   | Orang / Hari  | 65.000       |
|    |                   |   | Piket Tenaga Pemadam Kebakaran   | Orang / Hari  | 50.000       |
|    |                   |   | Operasional Penanganan Bencana Kebakaran                                 | Orang / Hari  | 130.000      |
|    |                   |   | Operasional Penanganan Bencana diluar Kebakaran                          | Orang / Titik | 130.000      |
| 7  | 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana  |  |               |              |
|    |                   | Honorarium Tenaga Non ASN - Tenaga Penanganan Bencana   | Tenaga Penanganan Bencana Daerah   | Orang / Hari  | 65.000       |
|    |                   |   | Operasional Kebencanaan  | Orang / Titik | 130.000      |
| 8  | 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial   |  |               |              |
|    |                   | Honorarium Tenaga Non ASN - Tenaga Penanganan Sosial  | Tenaga Penanganan Sosial   | Orang / Hari  | 55.000       |
|    |                   | Belanja Operasional Keluarga Berencana BOKB DAK Non Fisik   | Pengganti Tidak Bekerja Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW dan MOP | Orang/ Kali   | 450.000      |
|    |                   | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial   | Biaya Transportasi   | Orang/ Kali   | 300.000      |
|    |                   |   | Biaya Konsumsi Korban  | Orang/ Kali   | 120.000      |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen  | Spesifikasi                                    | Satuan           | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|---|--|------------------|-----------------|
|    |                   |   | Biaya Konsumsi<br>Pendamping<br>Korban         | Orang/<br>Kali   | 120.000         |
|    |                   |   | Biaya Penginapan<br>Korban                     | Orang /<br>Hari  | 650.000         |
|    |                   | Biaya Operasional<br>Pendampingan dan<br>Penjangkauan<br>Korban           | Biaya Penginapan<br>dan Pendamping<br>Korban   | Orang /<br>Hari  | 650.000         |
|    |                   |   | Kebutuhan<br>Spesifik Korban                   | Orang/<br>Kali   | 400.000         |
|    |                   | Biaya Operasional<br>Rumah<br>Perlindungan                                | Biaya Konsumsi                                 | Orang /<br>Kali  | 120.000         |
|    |                   | Biaya Operasional<br>Rumah<br>Perlindungan                                | Biaya Transportasi                             | Orang /<br>Kali  | 300.000         |
|    |                   | Biaya Operasional<br>Pendampingan dan<br>Penjangkauan<br>Korban           | Tali Asih                                      | Orang /<br>Bulan | 200.000         |
|    |                   | Tali Asih Pengelola<br>DTKS Kabupaten<br>dan Operator<br>SIKS-NG Nagari   | Tali Asih                                      | Orang /<br>Bulan | 300.000         |
|    |                   | Tali Asih Pekerja<br>Sosial Masyarakat                                    | Tali Asih                                      | Orang /<br>Bulan | 200.000         |
|    |                   | Biaya Operasional<br>Rumah<br>Perlindungan                                | Uang Harian<br>Petugas<br>Pendamping<br>Korban | Orang /<br>Hari  | 100.000         |
| 9  | 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air                                       |  |                  |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Pegawai Tidak<br>Tetap (PTT)                                | Tenaga UPT Spam                                | Orang /<br>Bulan | 2.500.000       |
| 10 | 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan   |  |                  |                 |
|    |                   | Belanja Jasa<br>Tenaga<br>Perhubungan                                     | Pengatur Lalu<br>Lintas Jalan                  | Orang /<br>Hari  | 65.000          |
|    |                   | Belanja Jasa<br>Tenaga<br>Perhubungan                                     | Tenaga Lalu<br>Lintas Dinas<br>Perhubungan     | Orang /<br>Hari  | 65.000          |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Tenaga<br>Perhubungan                   | Tenaga Pengujian<br>Kendaraan                  | Orang /<br>Hari  | 65.000          |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Tenaga<br>Perhubungan                   | Pengawas Lalu<br>Lintas Darat                  | Orang /<br>Hari  | 65.000          |
|    |                   | Operasional<br>Penanganan Lalu<br>Lintas Hari Besar /<br>Kondisi Tertentu | Tenaga Lalu<br>Lintas Dinas<br>Perhubungan     | Orang /<br>Hari  | 130.000         |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                                     | Spesifikasi   | Satuan          | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 11 | 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan                  |   |                 |                 |
|    |                   | Belanja Jasa<br>Tenaga Teknis<br>Pertanian dan<br>Pangan         | Petugas-Pengawas<br>dan Pengendali<br>Penyakit Hewan                                  | Orang /<br>Hari | 55.000          |
|    |                   |  | Tanam Jajar<br>Legowo   | Orang /<br>Hari | 150.000         |
|    |                   |  | Tenaga kerja Laki-<br>laki pemupukan<br>kegiatan tanaman<br>pangan                    | Orang /<br>Hari | 150.000         |
|    |                   |  | Petugas Perawat<br>Ternak   | Orang /<br>Hari | 60.000          |
|    |                   | Upah tenaga kerja  | Kegiatan Demplok<br>bidang Tanaman<br>Pangan  | Orang /<br>Hari | 150.000         |
| 12 | 5.1.02.02.01.0024 | Upah tenaga kerja  |   |                 |                 |
|    |                   | Honorarium Non<br>ASN - Tenaga<br>Teknis Pertanian<br>dan Pangan | Tenaga Kearsipan  | Orang /<br>Hari | 55.000          |
|    |                   | Upah tenaga kerja  | Tenaga<br>Perpustakaan  | Orang /<br>Hari | 55.000          |
|    |                   |  | Petugas Depo<br>Arsip   | Orang /<br>Hari | 85.000          |
|    |                   |  | Pengelola Arsip   | Orang /<br>Hari | 55.000          |
| 13 | 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                      |   |                 |                 |
|    |                   | jasa tenaga tari   | group tarian  | Kegiatan        | 2.000.000       |
|    |                   | Jasa Artis   | Jasa Artis Ibukota<br>Tipe - X  | Kegiatan        | 522.000.000     |
|    |                   | Jasa Tenaga<br>Kesenian  | Artis Tingkat<br>Provinsi   | Kegiatan        | 40.000.000      |
|    |                   | Artis Kim  | Luar Daerah,<br>Akomodasi,<br>Trasportasi dan<br>Makan Minum                          | Kegiatan        | 7.500.000       |
|    |                   | Jasa Tenaga<br>Kesenian  | Penari Kolosal  | Kegiatan        | 15.000.000      |
|    |                   | Jasa Tenaga Tari<br>Tradisional                                  | Dalam Daerah<br>Anggota 1 - 10<br>orang, Uang Saku<br>Transportasi dan<br>Makan Minum | Kegiatan        | 3.500.000       |
|    |                   | Jasa Anak Band   | Dalam Daerah<br>Anggota 1 - 8<br>orang,<br>Transportasi dan<br>Makan Minum            | Kegiatan        | 2.500.000       |
|    |                   | Jasa Tenaga<br>Kesenian  | Jasa Tenaga<br>Pencak Silat   | Kegiatan        | 20.000.000      |
|    |                   | Penampilan Seni<br>Tambua Tasa                                   | Dalam Daerah<br>Anggota 10 - 15<br>orang, Uang Saku<br>Transportasi dan               | Kegiatan        | 5.000.000       |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                             | Spesifikasi   | Satuan           | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--|---|------------------|-----------------|
|    |                   |  | Makan Minum   |                  |                 |
|    |                   | Jasa Tenaga Tari   | Grup Tarian   | Kegiatan         | 2.000.000       |
|    |                   | Jasa Personil Band                                       | Group Band<br>Dalam Daerah  | Kegiatan         | 2.500.000       |
|    |                   | Jasa Tenaga<br>Kesenian                                  | jasa Penari   | Orang/<br>Kali   | 100.000         |
|    |                   | Jasa Artis   | Jasa Artis Ibukota  | Kegiatan         | 473.696.000     |
|    |                   | Artis Kim  | Luar Daerah,<br>Akomodasi,  | Kegiatan         | 10.000.000      |
|    |                   |  | Trasportrasi dan<br>Makan Minum   |                  |                 |
|    |                   | Jasa Artis   | Jasa Artis Ibukota  | Kegiatan         | 511.664.000     |
| 14 | 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                         |   |                  |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Pegawai Tidak<br>Tetap (PTT)               | Pasca Sarjana (S2)  | Orang /<br>Bulan | 2.500.000       |
|    |                   |  | Sarjana (S1)  | Orang /<br>Bulan | 2.200.000       |
|    |                   |  | Sarjana Muda /<br>D.III/ D. II  | Orang /<br>Bulan | 2.100.000       |
|    |                   |  | D.I/ SLTA   | Orang /<br>Bulan | 2.000.000       |
|    |                   |  | SD/ SLTP  | Orang /<br>Bulan | 1.900.000       |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN -<br>Tenaga<br>Administrasi | Tenaga<br>Administrasi<br>Umum  | Orang /<br>Hari  | 55.000          |
|    |                   |  | Staf Khusus<br>Bupati   | Orang /<br>Hari  | 200.000         |
|    |                   |  | Staf Khusus Wakil<br>Bupati   | Orang /<br>Hari  | 155.000         |
|    |                   |  | Pengadministrasi<br>Umum TU<br>Pimpinan DPRD/<br>Penyusun<br>Naskah/ Notulis<br>Rapat | Orang /<br>Hari  | 90.000          |
|    |                   |  | Ajudan Ketua<br>DPRD/ Wakil<br>Ketua DPRD/  | Orang /<br>Hari  | 90.000          |
|    |                   |  | Ajudan Bupati /<br>Wakil Bupati   | Orang /<br>Hari  | 90.000          |
|    |                   |  | Pengawasan/<br>Ajudan Bupati/<br>Wabup  | Orang /<br>Hari  | 100.000         |
|    |                   |  | Pengadministrasi<br>Umum TU Bupati/<br>Penyusun<br>Naskah/ Notulis<br>Rapat           | Orang /<br>Hari  | 90.000          |
|    |                   |  | Tenaga Ahli Fraksi<br>DPRD  | Orang /<br>Hari  | 135.000         |
| 16 | 5.1.02.02.01.0027 |  | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer   |                  |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN -                           | Operator Sim<br>Pendapatan  | Orang /<br>Hari  | 55.000          |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen   | Spesifikasi  | Satuan                    | Harga<br>Satuan |  |
|----|-------------------|--|--|---------------------------|-----------------|--|
|    |                   | Tenaga Operator Komputer   | Operator Perencanaan Keuangan  | Orang / Hari              | 55.000          |  |
|    |                   |  | Operator SIM BMD   | Orang / Hari              | 55.000          |  |
|    |                   |  | Operator SIPD  | Orang / Hari              | 55.000          |  |
|    |                   |  | Operator PBB dan BPHTB   | Orang / Hari              | 55.000          |  |
|    |                   |  | Operator E PANDA   | Orang / Hari              | 55.000          |  |
|    |                   |  | Operator SIMBG   | Orang / Bulan             | 750.000         |  |
| 17 | 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli   |  |                           |                 |  |
|    |                   | Honor Psikolog Klinis  | Psikolog Puspaga   | Orang / Bulan             | 2.500.000       |  |
|    |                   | Honorarium Tenaga Ahli   | Swakelola (S2)   | Orang / Bulan             | 7.500.000       |  |
|    |                   | Honor Tenaga Ahli Penyusunan Profil Peluang Investasi                | Jasa Ahli Non Sertifikat untuk pekerjaan Penelitian (pendidikan S2/S3) | Orang / Paket / Pekerjaan | 9.500.000       |  |
|    |                   | Jasa Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Buku Profil Peluang Investasi | Jasa Ahli Pendamping Penyusunan Buku Profil Peluang Investasi          | Orang / Paket / Pekerjaan | 2.700.000       |  |
|    |                   | Honorarium Tim Ahli  | Tenaga Ahli Cagar Budaya   | Orang / Kali              | 600.000         |  |
|    |                   | Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusun RDTR                               | Ketua  | Orang / Bulan             | 9.000.000       |  |
|    |                   |  | Anggota  | Orang / Bulan             | 7.500.000       |  |
|    |                   |  | Asisten ahli   | Orang / Bulan             | 4.000.000       |  |
|    |                   | Honorarium Tim Ahli  | Ketua Tim Pendamping Legislasi RDTR                                    | Orang / Bulan             | 7.000.000       |  |
|    |                   |  | Tenaga Ahli Pendamping Legislasi RDTR                                  | Orang / Bulan             | 5.500.000       |  |
|    |                   | Jasa Tenaga Ahli penyusun KLHS                                       | Ketua  | Orang / Bulan             | 9.000.000       |  |
|    |                   |  | Anggota  | Orang / Bulan             | 7.500.000       |  |
|    |                   |  | Sekretariat  | Orang / Bulan             | 4.000.000       |  |
|    |                   | Jasa Tenaga Ahli   | Penyusun KLHS  | Paket                     | 196.000.000     |  |
|    |                   | Jasa Validasi KLHS   | Tim Teknis Validasi KLHS   | Orang / Kegiatan          | 250.000         |  |
|    |                   | Honorarium Tim Ahli  | Tenaga Ahli Warisan Budaya Tak Benda                                   | Orang / Bulan             | 4.000.000       |  |
|    |                   | Belanja Jasa   | Ketua  | Orang /                   | 3.000.000       |  |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                            | Spesifikasi  | Satuan                    | Harga<br>Satuan   |  |
|----|-------------------|---|--|---------------------------|-------------------|--|
|    |                   | Tenaga Ahli<br>Penyusunan<br>Naskah RIPPARDA            | Anggota  | Bulan<br>Orang /<br>Bulan | 2.000.000         |  |
|    |                   | Honorarium Tim<br>Pelaksana PBG                         | TPA (Tim Profesi<br>Ahli)  | Orang /<br>Bulan          | 3.000.000         |  |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Ahli<br>Penyusun RPJMD             | Tim Leader   | Orang /<br>Bulan          | 9.000.000         |  |
|    |                   |   | Tenaga Ahli  | Orang /<br>Bulan          | 7.500.000         |  |
|    |                   |   | Asisten Tenaga<br>Ahli RPJMD   | Orang /<br>Bulan          | 4.000.000         |  |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Ahli                               | Swakelola  | Orang /<br>Bulan          | 7.500.000         |  |
|    |                   | Honorarium<br>Surveyor                                  | Swakelola  | Orang /<br>Bulan          | 3.990.000         |  |
|    |                   | Honorarium<br>Pemberi<br>Keterangan<br>Ahli/Saksi Ahli  | Penilaian PBG  | Orang /<br>Kegiatan       | 1.000.000         |  |
|    |                   | Penyusunan<br>Dokumen                                   | Penyusunan<br>Dokumen RDTR   | Dokume<br>n               | 1.300.000.0<br>00 |  |
| 18 | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                          |  |                           |                   |  |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Petugas<br>Kebersihan | K3 Kantor  | Orang /<br>Hari           | 60.000            |  |
|    |                   |   | K3 Mes Pemda<br>Padang   | Orang /<br>Hari           | 60.000            |  |
|    |                   |   | K3 Taman Masjid<br>Agung   | Orang /<br>Hari           | 60.000            |  |
|    |                   |   | Asisten Rumah<br>Tangga/ Pram<br>Kebersihan<br>Khusus Rumah<br>Dinas Bupati          | Orang /<br>Hari           | 90.000            |  |
|    |                   |   | Asisten Rumah<br>Tangga/ Pram<br>Kebersihan<br>Khusus Rumah<br>Dinas Wakil<br>Bupati | Orang /<br>Hari           | 90.000            |  |
|    |                   | Jasa Tenaga<br>Kebersihan                               | Petugas<br>Kebersihan Harian   | Orang /<br>Hari           | 75.000            |  |
|    |                   |   | Pekerja pembersih<br>lahan   | Orang /<br>Hari           | 120.000           |  |
|    |                   | Biaya Sedot WC  | Sedot WC   | Kali                      | 300.000           |  |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Operator Mesin        | Operator Sinso   | Orang /<br>Hari           | 250.000           |  |
| 19 | 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                            |  |                           |                   |  |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Petugas Keamanan      | Keamanan Kantor  | Orang /<br>Hari           | 60.000            |  |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Petugas Keamanan      | Keamanan Mess<br>Pemda Padang  | Orang /<br>Hari           | 60.000            |  |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen   | Spesifikasi                                     | Satuan           | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--|---|------------------|-----------------|
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Petugas Keamanan                         | Keamanan Masjid<br>Agung                        | Orang /<br>Hari  | 60.000          |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Petugas Keamanan                         | Pengamanan Balai<br>Penyuluh KB                 | Orang /<br>Bulan | 900.000         |
| 20 | 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir  |   |                  |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Tenaga Sopir                             | Sopir SKPD/<br>Operasional                      | Orang /<br>Hari  | 65.000          |
|    |                   |  | Sopir Bupati/<br>Wakil Bupati                   | Orang /<br>Hari  | 110.000         |
|    |                   |  | Sopir Ketua<br>DPRD/Wakil<br>Ketua DPRD         | Orang /<br>Hari  | 110.000         |
|    |                   |  | Sopir Sekretaris<br>Daerah                      | Orang /<br>Hari  | 110.000         |
|    |                   |  | Sopir Mobil<br>Sampah                           | Orang /<br>Hari  | 60.000          |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Operator Alat<br>Berat                   | Operator Alat<br>berat                          | Orang /<br>Hari  | 75.000          |
|    |                   |  | Operator Alat<br>Berat Harian                   | Orang /<br>Hari  | 250.000         |
|    |                   |  | Operator alat<br>berat TPA                      | Orang /<br>Hari  | 200.000         |
|    |                   |  | Operator crane                                  | Orang /<br>Hari  | 100.000         |
| 21 | 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak   |   |                  |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Jasa Tenaga Juru<br>Masak                | Juru Masak                                      | Orang /<br>Hari  | 50.000          |
|    |                   |  | Juru Masak<br>Bupati/Wakil                      | Orang /<br>Hari  | 65.000          |
|    |                   |  | Pramusaji Balai<br>penyuluh KB                  | Orang /<br>Bulan | 900.000         |
| 22 | 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                            |   |                  |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Tenaga Teknisi<br>Mekanik dan<br>Listrik | Tenaga Teknik-<br>UPT Alkal Dinas<br>PUPR       | Orang /<br>Hari  | 55.000          |
|    |                   |  | Asisten Mekanik<br>UPT Alkal Dinas<br>PUPR      | Orang /<br>Hari  | 35.000          |
|    |                   |  | Tenaga Mekanik<br>Dinas Pangan dan<br>Perikanan | Orang /<br>Hari  | 35.000          |
|    |                   |  | Tenaga listrik                                  | Orang /<br>Hari  | 55.000          |
|    |                   |  | Teknisi Masjid<br>Agung                         | Orang /<br>Hari  | 55.000          |
|    |                   |  | Tenaga Sound<br>System                          | Orang /<br>Hari  | 55.000          |
| 23 | 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                                  |   |                  |                 |
|    |                   | Belanja Jasa Juri<br>Lomba/Pertanding<br>an                                | Acara Tingkat<br>Kabupaten                      | Orang /<br>Hari  | 500.000         |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen  | Spesifikasi                                 | Satuan              | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|---|---|---------------------|-----------------|
|    |                   | Jasa Tim<br>Penilai/Juri/Wasit<br>/Tim Official/<br>Atlet/Kontingen<br>Perlombaan/ yang<br>dipersamakan | Juri Senam Luar<br>Kabupaten                | Orang /<br>Hari     | 900.000         |
|    |                   |   | Juri Senam Dalam<br>Kabupaten               | Orang /<br>Hari     | 400.000         |
|    |                   |   | Acara Tingkat<br>Provinsi                   | Orang /<br>Hari     | 1.500.000       |
|    |                   |   | Acara Tingkat<br>Kabupaten                  | Orang /<br>Hari     | 500.000         |
|    |                   | Jasa Tim<br>Penilai/Juri/Wasit<br>/Tim Official   | Acara tingkat<br>Kabupaten                  | Orang /<br>Hari     | 200.000         |
|    |                   | Honorarium<br>Pelatih   | Pelatih<br>Bersertifikat                    | Orang /<br>Hari     | 200.000         |
|    |                   | Honorarium<br>Asisten Pelatih   | Asisten Pelatih                             | Orang /<br>Hari     | 100.000         |
|    |                   | Honorarium<br>Pelatih   | Bersertifikat                               | Orang /<br>Kegiatan | 500.000         |
| 24 | 5.1.02.02.01.0038 | Belanja Jasa Tata Rias  |   |                     |                 |
|    |                   | Pangkas Rambut  | Pangkas Biasa                               | Orang /<br>Kali     | 25.000          |
|    |                   |   | Barber Shop                                 | Orang /<br>Kali     | 40.000          |
|    |                   | DEKORASI STAND<br>APKASI  | DEKORASI STAND<br>APKASI OTONOMI<br>EXPO    | Paket               | 80.000.000      |
|    |                   | Belanja Tata Rias   | Alat Kosmetik                               | Paket               | 3.000.000       |
|    |                   | Make Up Seni  | Make Up Seni                                | Kegiatan            | 400.000         |
|    |                   | Jasa Make UP  | Make Up<br>Paskibraka                       | Orang               | 120.000         |
|    |                   |   | Jasa make up                                | Orang               | 150.000         |
|    |                   | Jasa dekorasi   | Dekorasi Pentas                             | M2                  | 150.000         |
|    |                   | Dekorasi  | Dekorasi taman<br>pentas auditorium         | Paket               | 2.500.000       |
|    |                   | jasa tata rias Putri<br>Apkasi  | Belanja Jasa<br>Desainer                    | Paket               | 3.000.000       |
|    |                   |   | Belanja Jasa<br>Desainer                    | Paket               | 4.000.000       |
| 25 | 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   |   |                     |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Tenaga Non ASN –<br>Jasa Tenaga<br>Informasi dan<br>Teknologi                             | Tenaga Informasi<br>dan Teknologi           | Orang /<br>Hari     | 55.000          |
|    |                   |   | Programer<br>Komputer (IT)                  | Orang /<br>Bulan    | 5.000.000       |
| 26 | 5.1.02.02.01.0041 |   |   |                     |                 |
|    |                   | Pemasangan Baru<br>Listrik  | Daya 1300                                   | VA                  | 2.500.000       |
|    |                   | Pemasangan Baru<br>Internet   | Pasang Sambung<br>Baru Indihome/<br>Indibiz | Paket               | 150.000         |
|    |                   | Pemasangan<br>Instalasi Air Spam  | Sambungan<br>Rumah (SR)<br>instalasi SPAM   | Unit                | 2.000.000       |
|    |                   | Jasa Sambung  | Jasa Sambung                                | Set                 | 8.200.000       |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                    | Spesifikasi  | Satuan              | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|---|--|---------------------|-----------------|
|    |                   | Internet  | Internet satelit                                       |                     |                 |
| 27 | 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi |  |                     |                 |
|    |                   | Aplikasi E-BMD                                  | Migrasi Data E-BMD                                     | Paket               | 90.000.000      |
| 28 | 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara              |  |                     |                 |
|    |                   | Honorarium<br>Pengurus Mesjid                   | Honorarium<br>Penceramah<br>Tingkat<br>Kabupaten       | Orang /<br>Kegiatan | 300.000         |
|    |                   |   | Honorarium<br>Insentif Imam<br>Masjid Agung            | Orang /<br>Bulan    | 6.000.000       |
|    |                   |   | Honorarium<br>Insentif Muazin<br>Masjid Agung          | Orang /<br>Bulan    | 5.000.000       |
|    |                   |   | Honorarium<br>Garim Mushalla<br>At-Tauhid              | Orang /<br>Bulan    | 1.500.000       |
|    |                   | Honorarium<br>Penceramah                        | Honorarium<br>Penceramah<br>masjid agung               | Orang /<br>Kegiatan | 500.000         |
|    |                   |   | Honorarium<br>Penceramah<br>Tingkat Provinsi           | Orang /<br>Kegiatan | 4.000.000       |
|    |                   |   | Honorarium<br>Penceramah<br>Tingkat Nasional           | Orang /<br>Kegiatan | 70.000.000      |
|    |                   | Uang Saku<br>Petugas Upacara                    | Perwira Upacara  | OH                  | 200.000         |
|    |                   |   | Komandan<br>Upacara                                    | OH                  | 200.000         |
|    |                   |   | Tim Korsik   | Paket               | 1.000.000       |
|    |                   |   | Aubade   | Paket               | 500.000         |
|    |                   | Uang Saku<br>Paskibraka                         | Panitia  | OH                  | 150.000         |
|    |                   |   | Pataka   | OH                  | 150.000         |
|    |                   |   | Pelatih  | OH                  | 150.000         |
|    |                   |   | Peserta<br>Paskibraka                                  | OH                  | 50.000          |
|    |                   |   | K3/ Sopir<br>Paskibraka                                | OH                  | 150.000         |
|    |                   |   | Uang Saku<br>Karyawisata                               | OH                  | 150.000         |
|    |                   | uang saku                                       | uang saku pelatih<br>paduan suara                      | Orang /<br>Hari     | 150.000         |
|    |                   | Jasa<br>Penyelenggara<br>Acara                  | Jasa Event<br>Organisazer (EO)<br>Tingkat<br>Kabupaten | Kegiatan            | 395.000.000     |
|    |                   | Instruktur<br>Kesenian                          | Instruktur Tari<br>dan Koreo                           | Orang /<br>Kali     | 150.000         |
|    |                   | Kegiatan Uda Uni                                | Uang Saku<br>Uda/Uni<br>Dharmasraya                    | Orang /<br>Kali     | 200.000         |
|    |                   | Instruktur<br>Pembinaan                         | Instruktur senam                                       | Orang /<br>Kali     | 150.000         |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                                      | Spesifikasi  | Satuan              | Harga<br>Satuan |  |
|----|-------------------|---|--|---------------------|-----------------|--|
|    |                   | Jasmani   |  |                     |                 |  |
|    |                   | Honorarium<br>Petugas Upacara                                     | Komandan KOMPI   | Orang<br>Kegiatan   | 200.000         |  |
|    |                   | Honorarium<br>Petugas Upacara                                     | Pembaca Teks<br>Pembukaan UUD<br>1945  | Orang<br>Kegiatan   | 150.000         |  |
|    |                   | Honorarium<br>Petugas Upacara                                     | Pembaca Teks<br>Naskah Kongres<br>Sumpah Pemuda<br>1928  | Orang<br>Kegiatan   | 150.000         |  |
|    |                   | Uang Saku<br>Petugas Upacara                                      | Tim Paduan Suara   | Kelompok            | 750.000         |  |
|    |                   | Jasa<br>Penyelenggara<br>Acara                                    | Jasa Event<br>Organisazer (EO)<br>Tingkat<br>Kabupaten   | Kegiatan            | 98.649.000      |  |
|    |                   |   | Jasa Event<br>Organisazer (EO)<br>Tingkat<br>Kabupaten   | Kegiatan            | 105.655.000     |  |
| 29 | 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                  |  |                     |                 |  |
|    |                   | Kontribusi<br>Bimbingan Teknis                                    | Spesifikasi :<br>Kontribusi<br>Bimbingan Teknis<br>Anggota DPRD  | Orang /<br>Kegiatan | 7.000.000       |  |
|    |                   | Biaya Registrasi<br>Sertifikasi<br>Kompetensi Kerja<br>Konstruksi | SKK Jenjang 1 - 3  | Kali                | 700.000         |  |
|    |                   |   | SKK Jenjang 4 - 6  | Kali                | 1.000.000       |  |
|    |                   | Biaya Kontribusi<br>Pelatihan                                     | Pelatihan teknis<br>audit tim kendali<br>internal<br>pendampingan<br>sertifikasi ISPO<br>untuk Pekebun<br>Sawit              | Orang/<br>Paket     | 13.500.000      |  |
|    |                   |   | Pelatihan teknis<br>audit tim kendali<br>internal<br>pendampingan<br>sertifikasi ISPO<br>untuk ASN<br>(pemerintah<br>daerah) | Orang/<br>Paket     | 20.550.000      |  |
|    |                   | Kontribusi  | Pendaftaran Putri<br>Apkasi  | Kegiatan            | 3.000.000       |  |
|    |                   | kontribusi<br>keikutsertaan tim<br>sepak bola Tk<br>Provinsi      | Kelompok Umur<br>13 Tahun  | Regu                | 5.500.000       |  |
|    |                   | kontribusi<br>keikutsertaan tim<br>sepak bola Tk<br>Provinsi      | Kelompok Umur<br>15 tahun  | Regu                | 6.500.000       |  |
|    |                   | kontribusi<br>keikutsertaan tim                                   | Kelompok Umur<br>17 tahun  | Regu                | 7.500.000       |  |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen   | Spesifikasi   | Satuan          | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--|---|-----------------|-----------------|
|    |                   | sepak bola Tk<br>Provinsi  |   |                 |                 |
|    |                   | Kontribusi   | Pendaftaran Putri<br>Apkasi   | Kegiatan        | 3.500.000       |
|    |                   | Kontribusi rekor<br>muri   | Rekor MURI<br>Baribu Talempong<br>Pacik                               | Paket           | 50.000.000      |
|    |                   | Kontribusi<br>Bimbingan Teknis<br>PNS  | Spesifikasi :<br>Asosiasi Sekretaris<br>DPRD (ASDEKSI)                | Orang           | 6.000.000       |
|    |                   | Pelatihan Tenaga<br>Kesehatan  | Pelatihan<br>Gardamaneo/Pone<br>d                                     | Orang           | 14.150.000      |
|    |                   | Kontribusi<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan AMDAL  | Diklat Dasar-<br>dasar AMDAL  | Orang/<br>Paket | 5.000.000       |
|    |                   | Kontribusi<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan AMDAL  | Diklat Penilai<br>AMDAL   | Orang/<br>Paket | 8.500.000       |
| 30 | 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan,<br>serta Alat Rumah Tangga |   |                 |                 |
|    |                   | Jasa Laundry   | Cuci dan Setrika  | Kg              | 6.000           |
| 31 | 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi   |   |                 |                 |
|    |                   | Jasa Kalibrasi   | Kalibrasi Alat Uji<br>Kendaraan<br>Bermotor                           | Unit/<br>Tahun  | 1.000.000       |
|    |                   | kalibrasi alat<br>kesehatan  | Berbagai jenis/<br>ukuran   | Paket           | 164.043.000     |
|    |                   | Jasa Kalibrasi<br>Labkesda   | alat dan<br>instrumen<br>laboratorium                                 | Unit            | 1.000.000       |
|    |                   | Honorarium<br>Teknisi Kalibrasi<br>Timbangan   | Teknisi Kalibrasi   | Orang /<br>Hari | 300.000         |
| 32 | 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah   |   |                 |                 |
|    |                   | Pembayaran<br>Retribusi Sampah   | Retribusi Sampah  | Bulan           | 250.000         |
| 33 | 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi                                |   |                 |                 |
|    |                   | Upah tenaga kerja  | Tenaga Kerja Laki-<br>laki penyiangan<br>kegiatan tanaman<br>pangan   | Orang /<br>Hari | 150.000         |
|    |                   |  | Tenaga Kerja Laki-<br>laki Penyemprotan<br>Pegiatan tanaman<br>pangan | Orang /<br>Hari | 150.000         |
|    |                   |  | Spesifikasi nyo :<br>jasa pembersihan<br>lahan                        | Ha              | 1.000.000       |
| 34 | 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah  |   |                 |                 |
|    |                   | Jasa Pengukuran<br>Tanah   | Akte Notaris  | Paket           | 2.000.000       |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                        | Spesifikasi                                     | Satuan        | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|---|---|---------------|-----------------|
| 35 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan    |   |               |                 |
|    |                   | Iklan Radio   | Iklan Layanan masyarakat (Radio)                | Hari          | 90.000          |
|    |                   | Jasa pembuatan iklan                                | Biaya Produksi Iklan Masyarakat                 | Paket         | 1.200.000       |
|    |                   | jasa pembuatan video                                | Pembuatan Jasa Video Bangsa Kencana             | Paket         | 3.000.000       |
|    |                   | Media Online  | Lokal Sumbar                                    | Per Tayang    | 60.000          |
|    |                   |   | Langgam   | Per Tayang    | 300.000         |
|    |                   |   | klik Positif                                    | Per Tayang    | 200.000         |
|    |                   |   | Antara  | Per Tayang    | 200.000         |
|    |                   |   | Tribun Padang                                   | Per Tayang    | 200.000         |
|    |                   |   | Sumbarkita                                      | Per Tayang    | 200.000         |
|    |                   |   | Pariwara khusus                                 | Per Tayang    | 400.000         |
|    |                   | Media Cetak   | Lokal Sumbar Berwarna                           | Per Halaman   | 9.000.000       |
|    |                   |   | Lokal Sumbar Monocrom                           | Per Halaman   | 7.000.000       |
|    |                   | Media Sosial  | Follower 500 Ribu sd 1 Juta                     | Per Tayang    | 800.000         |
|    |                   |   | Follower > 1 Juta                               | Per Tayang    | 1.200.000       |
|    |                   |   | Follower 200 Ribu s.d <500 Ribu                 | Per Tayang    | 600.000         |
|    |                   | Jasa Siaran Langsung Televisi                       | Spesifikasi : Siaran Langsung TVRI              | Paket         | 45.000.000      |
|    |                   | Belanja Jasa Pengumuman Lelang                      | Iklan Koran                                     | Paket         | 3.000.000       |
|    |                   | Belanja Jasa Muat Iklan/Artikel/Pariwara/Advetorial | Media Cetak Lokal Sumbar                        | Per Halaman   | 9.000.000       |
|    |                   | Jasa Pembuatan Photo dan Video                      | Belanja Jasa Pembuatan Photo dan Video Kegiatan | Paket         | 7.500.000       |
|    |                   | Belanja Jasa Muat Iklan/Artikel/Pariwara/Advetorial | Spesifikasi : Kumparan.Com                      | Tayang / Spot | 4.000.000       |
|    |                   | Jasa Pengambilan dan Pengeditan Video Dokumenter    | Video Dokumnter Durasi ± 30 Menit               | Kegiatan      | 9.000.000       |
| 36 | 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon                             |   |               |                 |
|    |                   | Belanja Tagihan                                     | Belanja Telepon                                 | Menit         |                 |

| N0 | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                     | Spesifikasi  | Satuan       | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--|--|--------------|-----------------|
|    |                   | Telepon  |  |              | 300             |
|    |                   |  |  | Paket        | 100.000         |
| 37 | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan<br>Air                           |  |              |                 |
|    |                   | Belanja Tagihan<br>Air                           | Air Tanki  | M3           | 85.000          |
|    |                   |  | Air PDAM   | M3           | 3.000           |
| 38 | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan<br>Listrik                       |  |              |                 |
|    |                   | Tarif Listrik<br>Rumah Tangga                    | Golongan (R-1/TR)<br>batas daya 900 VA                               | Kwh          | 1.487           |
|    |                   |  | Golongan (R-1/TR)<br>batas daya 1.300<br>VA                          | Kwh          | 1.595           |
|    |                   |  | Golongan (R-1/TR)<br>batas daya 2.200<br>VA                          | Kwh          | 1.595           |
|    |                   |  | Golongan (R-2/TR)<br>batas daya 3.500-<br>5.500 VA                   | Kwh          | 1.870           |
|    |                   |  | Golongan (R-3/TR)<br>batas daya 6.600<br>VA ke atas                  | Kwh          | 1.870           |
|    |                   | Tarif Listrik Bisnis                             | Golongan (B2/TR)<br>Batas daya 6.600<br>VA – 200 kVA                 | Kwh          | 1.870           |
|    |                   |  | Golongan (B2/TM)<br>Batas daya diatas<br>200 kVA                     | Kwh          | 1.870           |
|    |                   |  | Golongan B-3<br>/Tegangan<br>Menengah (TM)<br>daya diatas 200<br>kVA | Kwh          | 1.265           |
|    |                   | Tarif Listrik<br>Pemerintah                      | Golongan (P-1/TR)<br>batas daya 6.600<br>VA hingga 200<br>kVA        | Kwh          | 1.870           |
|    |                   |  | Golongan P-2 /TM<br>daya diatas 200<br>kVA                           | Kwh          | 1.705           |
|    |                   | Tarif Listrik<br>Khusus                          | Golongan L/TR,<br>TM, TT   | Kwh          | 1.870           |
| 39 | 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah     |  |              |                 |
|    | 5.1.02.02.01.0062 | Media Cetak                                      | Lokal Sumbar   | Per<br>Bulan | 180.000         |
| 40 | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |  |              |                 |
|    |                   | DNS Server                                       | Langganan DNS<br>Server  | Tahun        | 2.500.000       |
|    |                   | Aplikasi<br>Berlangganan                         | Langganan Zoom<br>Meeting I  | Bulan        | 500.000         |

| NO | Rekening Belanja | Uraian Belanja /<br>Komponen | Spesifikasi                  | Satuan | Harga<br>Satuan |
|----|------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------|
|    |                  | Aplikasi Berlangganan        | Langgaran Zomm Meeting II    | Bulan  | 300.000         |
|    |                  | Aplikasi Berlangganan        | Editing Canva                | Paket  | 800.000         |
|    |                  | Indihome (Internet Only)     | Paket Jitu 1 30 Mbps         | Bulan  | 350.000         |
|    |                  | Indihome (Internet Only)     | Paket Jitu 1 30 Mbps         | Bulan  | 370.000         |
|    |                  | Indihome (Internet Only)     | Paket Jitu 1 50 Mbps         | Bulan  | 410.000         |
|    |                  | Indihome (Internet Only)     | Paket Jitu 1 50 Mbps         | Bulan  | 530.000         |
|    |                  | Indibiz (Intenet Only)       | 50 Mbps                      | Bulan  | 500.000         |
|    |                  | Indibiz (Intenet Only)       | 75 Mbps                      | Bulan  | 590.000         |
|    |                  | Indibiz (Intenet Only)       | 100 Mbps                     | Bulan  | 790.000         |
|    |                  | Indibiz (Intenet Only)       | 150 Mbps                     | Bulan  | 920.000         |
|    |                  | Indibiz (Intenet Only)       | 200 Mbps                     | Bulan  | 1.180.000       |
|    |                  | Indibiz (Intenet Only)       | 300 Mbps                     | Bulan  | 1.680.000       |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV   | 50 Mbps                      | Bulan  | 720.000         |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV   | 75 Mbps                      | Bulan  | 810.000         |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV   | 100 Mbps                     | Bulan  | 980.000         |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV   | 150 Mbps                     | Bulan  | 1.150.000       |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + IPTV   | 200 Mbps                     | Bulan  | 1.400.000       |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + Telp   | 50 Mbps                      | Bulan  | 540.000         |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + Telp   | 75 Mbps                      | Bulan  | 680.000         |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + Telp   | 100 Mbps                     | Bulan  | 800.000         |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + Telp   | 150 Mbps                     | Bulan  | 970.000         |
|    |                  | Indibiz(HIS Bisnis) + Telp   | 200 Mbps                     | Bulan  | 1.220.000       |
|    |                  | Jasa Layanan Internet        | Paket Internet Dinas Kominfo | Bulan  | 75.000.000      |
|    |                  | Hosting                      | Langganan Sewa Hosting       | Tahun  | 3.000.000       |
|    |                  | Langgaran Internet Astinet   | Astinet (3 Mbps)             | Bulan  | 4.000.000       |
|    |                  | Langgaran Internet Astinet   | Astinet (3 Mbps)             | Bulan  | 3.200.000       |
|    |                  | Langgaran Internet Astinet   | Astinet (8 Mbps)             | Bulan  | 9.000.000       |
|    |                  | Langgaran Internet Astinet   | Astinet (Terintegrasi)       | Bulan  | 35.000.000      |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen   | Spesifikasi  | Satuan | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--------------------------------|--|--------|-----------------|
|    |                   | Langgaran Internet Astinet     | IP Public (Internet Dedicated Astinet 2 mbps)                      | Bulan  | 5.000.000       |
|    |                   | TV Berlangganan                | TV Kabel   | Paket  | 100.000         |
|    |                   | Zoom Meeting                   | Premium  | Bulan  | 1.000.000       |
|    |                   | Paket Interne/data             | Spesifikasi : Kuota Internet                                       | Paket  | 100.000         |
|    |                   | Belanja IP Public              | Astinet 10 Mbps + Indibiz 300 Mbps                                 | Bulan  | 4.800.000       |
|    |                   | Langganan layanan Google Earth | Google Earth Engine/Google Earth Pro                               | Tahun  | 5.000.000       |
|    |                   | Langganan Zoom Meeting III     | paket zoom meeting   | Tahun  | 1.800.000       |
|    |                   | Tagihan Speedy                 | Internet Broadband Indihome 100 mbps                               | Bulan  | 1.316.758       |
|    |                   | Langganan Internet             | Langganan internet Satelit   | Bulan  | 900.000         |
|    |                   | langganan Aplikasi             | Langganan layanan emergency call center 112                        | Tahun  | 199.700.000     |
| 41 | 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman       |  |        |                 |
|    | 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman       | Paket dalam Provinsi Menggunakan Travel Dalam Kota Tujuan          | Paket  | 35.000          |
|    |                   |                                | Paket dalam Provinsi Menggunakan Travel Luar Kota Luar Kota Tujuan | Paket  | 50.000          |
|    |                   |                                | Paket Dalam Provinsi Menggunakan JNE/JNT dan sejenisnya            | Kg     | 15.000          |
| 42 | 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya        |  |        |                 |
|    |                   | Penambahan Daya Listrik        | Penambahan Daya Lampu PJU Daya 1300-5500 VA                        | Paket  | 4.070.000       |
|    |                   |                                | Penambahan Daya Lampu PJU Daya 5500-7700 VA                        | Paket  | 1.940.000       |
|    |                   |                                | Penambahan Daya Lampu PJU daya 6600-10600 VA                       | Paket  | 7.429.400       |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                 | Spesifikasi  | Satuan       | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--|--|--------------|-----------------|
|    |                   | Tambah Daya listrik 8400 watt                | Biaya pasang + SLO   | Paket        | 15.200.000      |
| 43 | 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |  |              |                 |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)           | Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)                             | Unit / Tahun | 250.000         |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 3 (tiga)          | Pajak Kendaraan Dinas Roda 3 (tiga)                            | Unit / Tahun | 800.000         |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)         | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Pejabat/ Pimpinan Daerah  | Unit / Tahun | 8.000.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)         | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Pejabat Esselon II        | Unit / Tahun | 6.000.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)         | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Pick Up       | Unit / Tahun | 2.700.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)         | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Mini Bus      | Unit / Tahun | 4.000.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)         | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Operasional Double Gardan | Unit / Tahun | 5.000.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)          | Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) Mini Bus Sedang            | Unit / Tahun | 7.000.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 (enam)          | Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) Mini Bus Besar             | Unit / Tahun | 11.000.000      |
|    |                   | Pengurusan izin Plat Khusus Kendaraan Dinas  | Kendaraan Dinas Bupati/ Wakil/ Sekretaris Daerah               | Unit         | 3.500.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan                              | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan I                          | Unit / Tahun | 100.000         |
|    |                   | Pajak Kendaraan                              | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan II                         | Unit / Tahun | 200.000         |
|    |                   | Pajak Kendaraan                              | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam I                     | Unit / Tahun | 1.000.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan                              | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam II                    | Unit / Tahun | 2.000.000       |

| NO | Rekening Belanja | Uraian Belanja /<br>Komponen | Spesifikasi   | Satuan          | Harga<br>Satuan |
|----|------------------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Enam III   | Unit /<br>Tahun | 3.000.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Enam IV    | Unit /<br>Tahun | 4.000.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Enam V     | Unit /<br>Tahun | 5.000.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Enam VI    | Unit /<br>Tahun | 6.000.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat I    | Unit /<br>Tahun | 500.000         |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat II   | Unit /<br>Tahun | 1.000.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat III  | Unit /<br>Tahun | 1.500.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat IV   | Unit /<br>Tahun | 2.000.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat V    | Unit /<br>Tahun | 2.500.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat VI   | Unit /<br>Tahun | 3.000.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat VII  | Unit/T<br>ahun  | 3.500.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat VIII | Unit/<br>Tahun  | 4.000.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat IX   | Unit/<br>Tahun  | 4.500.000       |
|    |                  | Pajak Kendaraan              | Beban Pajak<br>Kendaraan<br>Bermotor Roda<br>Empat X    | Unit/<br>Tahun  | 5.000.000       |

| NO | Rekening Belanja  | Uraian Belanja /<br>Komponen                             | Spesifikasi  | Satuan         | Harga<br>Satuan |
|----|-------------------|--|--|----------------|-----------------|
|    |                   | Pajak Kendaraan  | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat XI             | Unit/<br>Tahun | 5.500.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan  | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat XII            | Unit/<br>Tahun | 6.000.000       |
|    |                   | Pajak Kendaraan  | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua I                | Unit/<br>Tahun | 250.000         |
|    |                   | Pajak Kendaraan  | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua II               | Unit/<br>Tahun | 500.000         |
|    |                   | Pajak Kendaraan  | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua III              | Unit/<br>Tahun | 750.000         |
|    |                   | Pajak Kendaraan  | Beban Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua IV               | Unit/<br>Tahun | 1.000.000       |
| 44 | 5.1.02.02.01.0068 | Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum                   |  |                |                 |
|    | 5.1.02.02.01.0068 | Tarif Listik Penerangan Jalan Umum                       | Golongan P-3 /TR untuk penerangan jalan umum             | Kwh            | 1.870           |
| 45 | 5.1.02.02.01.0070 | Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan |  |                |                 |
|    | 5.1.02.02.01.0070 | Belanja Ganti Rugi                                       | Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan | Tahun          | 8.000.000       |
| 46 | 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur   |  |                |                 |
|    |                   | Uang Lembur  | Pejabat Eselon III/ Gol. IV                              | Orang /<br>Jam | 25.000          |
|    |                   |  | Pejabat Eselon IV/ Gol. III dan PPPK Gol IX s.d XI       | Orang /<br>Jam | 20.000          |
|    |                   |  | Gol I/ Gol II dan PPPK Gol I s.d VII                     | Orang /<br>Jam | 17.000          |
|    |                   |  | PTT/ Non ASN/ Sopir                                      | Orang /<br>Jam | 15.000          |
| 47 | 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up                                 |  |                |                 |
|    |                   | Belanja Medical Check Up                                 | Medical Check Up Bupati                                  | Tahun          | 60.000.000      |
|    |                   |  | Medical Check Up Wakil Bupati                            | Tahun          | 40.000.000      |
|    |                   |  | Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD               | Tahun          | 3.000.000       |

## 2.4 Satuan Biaya Sewa

### 2.4.1 Sewa Excavator

Satuan biaya Belanja Sewa Peralatan dan mesin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa Excavator untuk Penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia atau tidak memadai alat berat yang dimiliki pemerintah daerah serta dilakukan secara selektif dan efisien.
3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan Operator.

### 2.4.3 Sewa Alat Besar Darat Lainnya

Satuan biaya Belanja Sewa Peralatan dan mesin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa alat besar lainnya untuk Penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia atau tidak memadai alat berat yang dimiliki pemerintah daerah serta dilakukan secara selektif dan efisien.
3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan Operator.

### 2.4.4 Sewa Electric Generating Set

Satuan biaya sewa Electric Generating Set merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Sewa Genset untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

### 2.4.5 Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan bermotor penumpang roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus - menerus).

### 2.4.6 Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus - menerus) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
2. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

#### 2.4.7 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang

Satuan biaya sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang merupakan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan air berupa perahu bermotor, untuk pelaksanaan kegiatan atau perjalanan dinas ke Lubuk Ulang Aling, Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan operator.

#### 2.4.8 Sewa Alat Kantor Lainnya

Satuan biaya sewa alat kantor lainnya merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sewa Alat Rumah Tangga/Dekorasi, Belanja Sewa Panggung dan Sewa Tenda untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

#### 2.4.9 Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Satuan biaya sewa alat Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk sewa peralatan rumah tangga untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

#### 2.4.10 Sewa Peralatan Studio Audio

Satuan biaya sewa Peralatan Studio Audio merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk sewa Sound System dan Organ Tunggal dan peralatan kesenian lainnya untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

#### 2.4.11 Sewa Peralatan Studio Video dan Film

Satuan biaya Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa papan karangan bunga untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

#### 2.4.12 Sewa Komputer Jaringan

Satuan biaya sewa Komputer Jaringan merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa papan karangan bunga untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

#### 2.4.13 Sewa Personal Computer

Satuan biaya sewa Personal Computer merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa komputer dan laptop untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar

#### 2.4.14 Sewa Peralatan Personal Computer

Satuan biaya sewa Peralatan Personal Computer merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa Printer untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2.4.15 Sewa Bangunan Gedung Kantor

Satuan biaya sewa bangunan gedung kantor merupakan biaya estimasi per tahun yang digunakan untuk menyewa bangunan dan gedung kantor untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan bentuk dan ukuran rumah mengacu kepada aturan yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana Pemerintah.

2.4.16 Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Satuan biaya sewa ruang rapat dan pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang rapat dan pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. sewa ruang rapat dan pertemuan sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

Satuan biaya Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Belanja Ruang Rapat dan Pertemuan merupakan biaya estimasi per hari yang digunakan untuk menyewa Sewa Gedung/Kantor/Tempat dan Belanja Ruang Rapat dan Pertemuan untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah, Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan fasilitas serta pelayanan.

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen      | Spesifikasi   | Satuan | Harga Satuan |
|----|-------------------|---------------------------------------|---|--------|--------------|
| 1  | 5.1.02.02.03.0035 | Belanja Sewa Lapangan Lainnya         |   |        |              |
|    |                   | Sewa Lapangan Olah Raga               | Lapangan Futsal Indor                                     | Jam    | 150.000      |
| 2  | 5.1.02.02.04.0003 | Belanja Sewa Excavator                |   |        |              |
|    |                   | Sewa Alat Berat                       | Belanja Sewa Alat Berat (exkavator) + Operator + bbm      | Jam    | 600.000      |
|    |                   |                                       | Belanja Sewa Alat Berat (exkavator)                       | Jam    | 250.000      |
|    |                   |                                       | Belanja Sewa Alat Berat (exkavator mini) + Operator + bbm | Jam    | 250.000      |
| 3  | 5.1.02.02.04.0010 | Belanja Sewa Alat Pengangkat          |   |        |              |
|    |                   | Belanja sewa alat pengangkat          | Sewa pengangkat truk trado                                | Kali   | 600.000      |
| 4  | 5.1.02.02.04.0012 | Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya |   |        |              |
|    |                   | Sewa Alat Berat                       | Belanja Sewa Alat Berat (buldozer)                        | Jam    | 250.000      |
|    |                   |                                       | Belanja Sewa Alat Berat (buldozer Mini) + Operator + bbm  | Jam    | 250.000      |
|    |                   |                                       | Belanja Sewa Alat Berat (buldozer) +                      | Jam    | 600.000      |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen                | Spesifikasi                             | Satuan    | Harga Satuan |
|----|-------------------|---|---|-----------|--------------|
|    |                   |   | Operator + bbm                          |           |              |
| 5  | 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set            |   |           |              |
|    |                   | Belanja Sewa Genset                             | Belanja Sewa Genset Kecil               | Unit      | 5.000.000    |
|    |                   |   | Belanja Sewa Genset Besar               | Unit      | 10.000.000   |
|    |                   |   | Kapasitas 125-150 Kva                   | Unit      | 25.000.000   |
|    |                   |   | Sewa genset                             | Paket     | 50.000.000   |
|    |                   | Sewa genset area talent & vip                   | 60 kva                                  | Kegiatan  | 5.085.000    |
|    |                   | Sewa genset led                                 | 100 kva                                 | Kegiatan  | 13.560.000   |
|    |                   | Sewa genset sound                               | 100 kva                                 | Kegiatan  | 13.560.000   |
|    |                   | Belanja Sewa Genset                             | Belanja Sewa Genset Besar               | Per Hari  | 7.000.000    |
|    |                   | Sewa Genset                                     | 70 Kva                                  | Kegiatan  | 5.000.000    |
|    |                   | Sewa genset                                     | 25 Kva                                  | Kegiatan  | 3.000.000    |
| 6  | 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang       |   |           |              |
|    |                   | Sewa Kendaraan Roda 4                           | Kendaraan <2000 CC                      | Hari      | 500.000      |
|    |                   |   | Kendaraan 2000 - 2500 CC                | Hari      | 600.000      |
|    |                   |   | Kendaraan > 2500 CC                     | Hari      | 2.500.000    |
|    |                   |   | Sewa Mini Bus                           | Hari      | 1.100.000    |
|    |                   | Sewa Kendaraan Operasional Roda 4               | spesifikasi 1500 - 2500 cc              | Bulan     | 3.000.000    |
|    |                   |   | Super Eksekutif                         | Hari      | 9.000.000    |
|    |                   |   | Eksekutif                               | Hari      | 6.000.000    |
|    |                   |   | Sewa Bus Besar                          | Hari      | 6.000.000    |
|    |                   |   | Sewa Bus Haji                           | Unit      | 9.800.000    |
|    |                   |   | Sewa Bus menengah                       | Hari      | 3.500.000    |
|    |                   | Sewa Minibus                                    | Hari                                    | 2.500.000 |              |
|    |                   | Sewa Kendaraan                                  | Sewa Bus Karya Wisata                   | Hari      | 6.500.000    |
|    |                   | Sewa kendaraan roda 6                           | Sewa Bus besar dan panjang (Eksekutive) | Unit      | 8.500.000    |
| 7  | 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |   |           |              |
|    |                   | Sewa Kendaraan Roda 4                           | Pick up                                 | Hari      | 1.000.000    |
|    |                   |   | Sewa Mobil Box                          | Hari      | 2.300.000    |
|    |                   | Sewa Kendaraan Roda 6                           | Truck Menengah                          | Hari      | 2.500.000    |
|    |                   |   | Sewa Truk Besar                         | Hari      | 8.000.000    |
|    |                   | Sewa  | Mobilisasi Genset                       | Lot       | 5.500.000    |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen                          | Spesifikasi                    | Satuan       | Harga Satuan |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
|    |                   | Mobilisasi Genset   |                                |              |              |
| 8  | 5.1.02.02.04.0049 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang |                                |              |              |
|    |                   | Sewa Sarana Mobilitas Air                                 | Perahu bermotor                | Hari         | 2.500.000    |
|    |                   | Sewa Perahu Ketek   | Sewa Perahu Ketek              | Unit         | 2.000.000    |
| 9  | 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                          |                                |              |              |
|    |                   | Sewa Tiang Reklame/ Baliho                                | 3 x 4 m3                       | Unit / Bulan | 800.000      |
|    |                   |   | 4 x 6 m3                       | Unit / Bulan | 1.200.000    |
|    |                   |   | 6 x 8 m3                       | Unit / Bulan | 1.500.000    |
|    |                   | Sewa Papan Karangan Bunga                                 | Besar                          | Paket        | 600.000      |
|    |                   |   | Sedang                         | Paket        | 400.000      |
|    |                   |   | Kecil                          | Paket        | 250.000      |
| 10 | 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)         |                                |              |              |
|    |                   | Sewa Alat Rumah Tangga                                    | Sewa Otobot                    | Buah         | 1.350.000    |
|    |                   |   | Sewa Rempel                    | Lembar       | 99.500       |
|    |                   |   | Sewa Kursi                     | Unit         | 6.000        |
|    |                   |   | Sewa Kursi Plastik bersarung   | Buah         | 9.000        |
|    |                   |   | Sewa Kursi Futura bersarung    | Buah         | 14.000       |
|    |                   |   | Sewa Kain Tabir Dinding        | Lembar       | 177.000      |
|    |                   |   | Sewa Blower                    | Buah         | 599.500      |
|    |                   |   | Sewa Karpas Merah/Karpas Jalan | Roll         | 9.500        |
|    |                   |   | Sewa Permadani                 | Lembar       | 230.000      |
|    |                   |   | Sewa Meja Makan Bulat          | Buah         | 94.500       |
|    |                   |   | Sewa Meja Hidangan             | Buah         | 249.500      |
|    |                   |   | Sewa Meja                      | Unit         | 55.000       |
|    |                   |   | Sewa Karpas                    | M1           | 33.300       |
|    |                   | Sewa Baju   | Sewa Baju Adat                 | Lembar       | 1.500.000    |
|    |                   | Sewa Alat Rumah Tangga                                    | Sewa Baju Adat                 | Stel         | 1.500.000    |
|    |                   | Sewa sound system   | Belanja sewa sound system      | Unit         | 3.500.000    |
| 11 | 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                       |                                |              |              |
|    |                   | Sewa Sound System   | Sound System dan personil      | Kegiatan     | 10.000.000   |
|    |                   | Sewa Sound System   | Sound System 3000 W            | Kegiatan     | 3.500.000    |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen             | Spesifikasi  | Satuan   | Harga Satuan |
|----|-------------------|--|--|----------|--------------|
|    |                   | Lighting System                              | Lampu Parlep, Prasnel, PoloSpot, Smogun,Lampu, Beam, Miser BMX,Mini brute dan Operator | Kegiatan | 10.000.000   |
|    |                   | Sewa Peralatan Musik                         | Peralatan Band   | Set      | 5.000.000    |
|    |                   | Lighting System                              | Lampu Parlep, Prasnel,PoloSpot,Smogun,Lampu, Beam, Miser BMX,Mini brute dan Operator   | Hari     | 6.660.000    |
|    |                   | Sewa Barricade                               | Pagar Besi   | M1       | 55.500       |
|    |                   | Sewa Mess Cover Sound                        | Ukuran 6 x 2.80 cm   | Unit     | 2.497.500    |
|    |                   | Sewas Alat Band                              | 1 Set Dram, Ampli Gitar,Bass Ampli, Ampli Keyboard, Gitar, Keyboard                    | Hari     | 1.665.000    |
|    |                   | Sound System30.000 watt                      | speaker lane array-subwofer, speaker monitor mixer M32 operator soundman               | Hari     | 8.325.000    |
|    |                   | Sewa sound system                            | Sound system acara   | Set      | 2.500.000    |
|    |                   | Live cam                                     | camera camcoder nx 100 include cameraman   | Hari     | 11.300.000   |
|    |                   | Sewa Sound sytems                            | 50000 Watt   | Kegiatan | 50.850.000   |
|    |                   | Live cam                                     | camera camcoder nx 100 include cameraman   | Hari     | 10.170.000   |
|    |                   | Sewa Sound sytems                            | 40000 Watt   | Kegiatan | 50.850.000   |
| 12 | 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film |  |          |              |
|    |                   | Sewa Peralatan Studio                        | Spesifikasi : Sewa Videotron   | Set      | 35.000.000   |
|    |                   | Sewa Proyektor                               | Video Mapping  | Kegiatan | 15.000.000   |
|    |                   | Sewa LED Vidiotron                           | Ukuran 3 x 4 M, dudukan Vidiotron,Gawang gate ringging penyangga dan operator          | M1       | 4.218.000    |
|    |                   | Sewa led center                              | 3X 8 M   | M1       | 1.073.500    |
| 13 | 5.1.02.02.04.0404 | Belanja Sewa Komputer Jaringan               |  |          |              |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen                      | Spesifikasi                                      | Satuan       | Harga Satuan |
|----|-------------------|---|--|--------------|--------------|
|    |                   | Belanja Kawat/Faksimile/ Internet/ TV berlangganan    | Belanja Sewa Komputer Jaringan Ujian SKD dan SKB | Unit         | 65.000       |
|    |                   | Belanja Sewa Komputer Jaringan                        | Sewa Colocation Server LPSE                      | Bulan        | 5.000.000    |
| 14 | 5.1.02.02.04.0405 | Belanja Sewa Personal Computer                        |  |              |              |
|    |                   | Sewa Personal Komputer                                | Personal Computer/Laptop                         | Bulan        | 50.000       |
|    |                   | Sewa Personal Komputer                                | Komputer Editing                                 | Hari         | 250.000      |
|    |                   | Sewa Laptop   | Sewa Laptop dengan aplikasi pemetaan             | Bulan        | 2.000.000    |
|    |                   | Sewa Laptop   | Laptop   | Bulan        | 1.000.000    |
| 15 | 5.1.02.02.04.0409 | Belanja Sewa Peralatan Personal Computer              |  |              |              |
|    |                   | Sewa Printer  | Printer  | Bulan        | 500.000      |
| 16 | 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor                   |  |              |              |
|    |                   | Sewa Bangunan Gedung Kantor                           | Sewa Kantor OPD                                  | Unit / Tahun | 70.000.000   |
|    |                   | Sewa Rumah Tunggu Kelahiran                           | Sewa Rumah Tunggu Kelahiran                      | Unit / Tahun | 50.000.000   |
| 17 | 5.1.02.02.05.0011 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga          |  |              |              |
|    |                   | Sewa Lapangan Olahraga                                | Lapangan Futsal Indoor                           | Jam          | 150.000      |
| 18 | 5.1.02.02.05.0012 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar |  |              |              |
|    |                   | Sewa Stand  | Sewa Tempat Pameran (Stand Pameran)              | Paket        | 40.000.000   |
| 19 | 5.1.02.02.05.0025 | Belanja Sewa Bangunan Terbuka                         |  |              |              |
|    |                   | Sewa Tenda Sarnafil                                   | Tenda Sarnafil                                   | M2           | 225.000      |
|    |                   | Sewa Tenda Kerucut                                    | Tenda Kerucut                                    | M2           | 150.000      |
|    |                   | Sewa Tenda Roudor                                     | Tenda Roder                                      | M2           | 450.000      |
|    |                   | Sewa Tenda Rigging                                    | Tenda Rigging                                    | M2           | 400.000      |
|    |                   | Sewa Tenda Biasa                                      | Tenda Biasa                                      | M2           | 100.000      |
|    |                   | Dekorasi Stand Pameran                                | Pameran Luar daerah                              | Paket        | 20.000.000   |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen     | Spesifikasi  | Satuan   | Harga Satuan |
|----|-------------------|--------------------------------------|--|----------|--------------|
|    |                   | BELANJA SEWA BANGUNAN TERBUKA        | SEWA STAND PAMERAN APKASI EXPO                                   | Unit     | 42.000.000   |
|    |                   | Sewa Pentas / Panggung               | Stage Rigging  | M2       | 250.000      |
|    |                   | Sewa Pelaminan                       | Ukuran 10 x 15   | M1       | 30.000       |
|    |                   | Tenda Sarnafil                       | Ukuran 3 x 3, folring karpet, lampu penerangan, 1 meja + 2 kursi | Paket    | 4.000.000    |
|    |                   | Stage Rigging                        | Ukuran 8x12  | M1       | 288.600      |
|    |                   | Sewa Area VIP                        | Area VIP   | Kegiatan | 58.308.000   |
|    |                   | Sewa FOH                             | uk 5m x 5m   | Kegiatan | 5.650.000    |
|    |                   | Sewa Rigging Stage dan Stage         | uk 10 mx 12m   | Kegiatan | 22.600.000   |
|    |                   | Sewa riging kubus line array         | uk 2m x 9 m  | Kegiatan | 11.300.000   |
|    |                   | Sewa tenda sarnafil SOH              | uk 5m x 5 m  | Kegiatan | 5.650.000    |
|    |                   | Sewa Tenda Talent                    | Tenda Talent   | Kegiatan | 11.096.600   |
|    |                   | Sewa wing stage SOH                  | uk 5x5 m t 1,5 m   | Kegiatan | 5.650.000    |
|    |                   | Sewa Tenda Talent                    | Tenda Talent   | Kegiatan | 16.294.600   |
|    |                   | Sewa Area VIP                        | Area VIP   | Kegiatan | 62.715.000   |
|    |                   | Sewa Tenda Talent                    | Tenda Talent   | Kegiatan | 15.729.600   |
|    |                   | Sewa Area VIP                        | Area VIP   | Kegiatan | 58.195.000   |
|    |                   | Sewa Rigging Stage dan Stage         | uk 8 mx 12m  | Kegiatan | 35.000.000   |
|    |                   | Sewa Pentas Riging                   | Atap Terpal, Tarikan Sound System                                | M2       | 3.500.000    |
|    |                   | Belanja sewa tenda                   | Sewa panggung seleksi  | Paket    | 1.000.000    |
|    |                   | Belanja Sewa Tenda                   | Spesifikasi : Belanja Sewa Tenda Tempat Makan                    | Paket    | 15.000.000   |
|    |                   | Belanja Sewa Tenda                   | Spesifikasi : Sewa Tenda Utama 25 x 15                           | Paket    | 21.000.000   |
| 20 | 5.1.02.02.05.0038 | Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I |  |          |              |
|    |                   | Sewa Rumah                           | Sewa Rumah Dinas   | Tahun    | 60.000.000   |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen                       | Spesifikasi                        | Satuan       | Harga Satuan |
|----|-------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|
|    |                   | Dinas  | Wakil Bupati                       |              |              |
| 21 | 5.1.02.02.05.0041 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan |                                    |              |              |
|    |                   | Sewa Rumah   | Sewa Rumah Aman                    | Unit / Tahun | 42.500.000   |
|    |                   | Sewa Rumah   | Sewa Rumah Aman/Rumah Perlindungan | Unit / Tahun | 42.379.000   |
| 22 | 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya    |                                    |              |              |
|    |                   | Sewa Rumah Tunggu Kelahiran                            | Sewa Rumah Tunggu Kelahiran        | Tahun        | 50.000.000   |
| 23 | 5.1.02.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik                                |                                    |              |              |
|    |                   | Sewa Organ+player                                      | Sewa Organ+player                  | Kegiatan     | 3.000.000    |

## 2.5 Satuan Biaya Jasa Konsultansi

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen   | Spesifikasi   | Satuan  | Harga Satuan |
|----|-------------------|--|---|---------|--------------|
| 1  | 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi |   |         |              |
|    |                   | Perencanaan Pembangunan Bandara Dharmasraya  | DED   | Paket   | 200.000.000  |
|    |                   | Jasa Survey Jalan dan Jembatan   | Jasa Survey Kondisi Jalan, Jembatan & Perencanaan Lainnya         | Paket   | 100.000.000  |
| 2  | 5.1.02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya                                   |   |         |              |
|    |                   | Jasa Konsultasi Analisis   | Jasa Konsultasi Analisis Tunjangan Perumahan Anggota DPRD         | Paket   | 75.000.000   |
|    |                   |  | Jasa Konsultasi Analisis Tunjangan Transportasi Anggota DPRD      | Paket   | 75.000.000   |
| 3  | 5.1.02.02.08.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan               |   |         |              |
|    |                   | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan                                   | Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pulau Punjung | Dokumen | 550.000.000  |
|    |                   |  | Penyusunan KLHS Kawasan Pulau Punjung                             | Dokumen | 275.000.000  |

| No | Kode Rekening     | Uraian Rekening Belanja/Komponen   | Spesifikasi  | Satuan  | Harga Satuan  |
|----|-------------------|--|--|---------|---------------|
|    |                   | Perancangan Perkotaan  | Penyusunan Peta Dasar Kawasan Sungai Rumbai  | Dokumen | 100.000.000   |
|    |                   |  | Penyusunan dan Penetapan Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah (Perkada) RDTR Kawasan Pulau Punjung | Dokumen | 200.000.000   |
| 27 | 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik   |  |         |               |
|    |                   | Penyusunan Dokumen Pendukung Pembangunan Pasar Sungai Rumba                              | Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Pasar Sungai Rumbai   | Paket   | 750.000.000   |
|    |                   |  | Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Bangunan Gedung/Kantor / Air Minum/Air Limbah/Sampah                  | Dokumen | 100.000.000   |
|    |                   |  | Penyusunan Dokumen Survey dan pemetaan bangunan/air minum/air limbah/sampah                              | Dokumen | 100.000.000   |
|    |                   |  | Penyusunan Dokumen Rencana Kebijakan dan Strategi Air Minum/ Air Limbah /Sampah                          | Dokumen | 100.000.000   |
| 4  | 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus                                |  |         |               |
|    |                   | Jasa Pendampingan  | Jasa Pendampingan Pengelolaan Aplikasi E- BMD oleh Pihak ke Tiga   | Tahun   | 60.000.000    |
| 5  | 5.1.02.02.10.0009 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan |  |         |               |
|    |                   | Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan         | KPBU Penerangan Jalan Umum   | Tahun   | 9.300.000.000 |

2.6 Satuan Biaya Iuran Kesehatan dan Asuransi

### 2.6.1 Iuran Jaminan/Asuransi

Standar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari digunakan untuk mencatat belanja jaminan kesehatan bagi penerima bantuan yang merupakan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program pemerintah daerah yang didasarkan kepada peraturan yang ada.

### 2.6.2 Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI

Sandar satuan biaya belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi PBI Digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI), yang merupakan sharing pembiayaan dengan pemerintah provinsi.

### 2.6.3 Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Standar satuan biaya jasa Asuransi Kesehatan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS sebagai kompensasi terhadap Pegawai Non ASN yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.

### 2.6.4 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Standar satuan biaya jasa Asuransi Jaminan Kecelakaan adalah premi yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kompensasi terhadap Tenaga Non ASN yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan Kematian, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah.

### 2.6.5 Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Standar satuan Asuransi Jaminan Kematian adalah premi yang disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai kompensasi terhadap Tenaga Non ASN yang di rekrut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk jaminan Kematian, sesuai dengan kontribusi terhadap pelaksanaan/penunjang program kegiatan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kepatutan dan kewajaran serta kemampuan keuangan daerah

## Belanja Iuran Kesehatan dan Asuransi

| No | Kode Rekening     | Uraian Belanja/Komponen   | Spesifikasi                 | Sstuan      | Harga Satuan |
|----|-------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------|
| 1  | 5.1.02.02.02.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |                             |             |              |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Wali Nagari                         | Wali Nagari                 | Orang/Bulan | 120.000      |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Perangkat Wali                      | Sekretaris/Perangkat Nagari | Orang/Bulan | 100.000      |

| No | Kode Rekening     | Uraian Belanja/Komponen  | Spesifikasi  | Sstuan          | Harga Satuan |
|----|-------------------|--|--|-----------------|--------------|
|    |                   | Nagari   |  |                 |              |
| 2  | 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI                            |  |                 |              |
|    |                   | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI                            | Belanja Kotribusi Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Tidak Mampu – PBI | Orang/<br>Bulan | 42.000       |
| 3  | 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3         |  |                 |              |
|    |                   | Belanja bahan obat- obatan Labot Kesehatan                               | Iuran PBPU Pemda (Jamkesda)  | Per Orang       | 28.000       |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3         | Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 Aktif         | Orang/<br>Bulan | 2.800        |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3         | Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3               | Orang/<br>Bulan | 30.800       |
| 4  | 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 |  |                 |              |
|    |                   | Jaminan Pemeliharaan Kesehatan   | Bantuan PBPU Pemda (Jamkesda)  | Per Orang       | 2.800        |
|    |                   | Jaminan Pemeliharaan Kesehatan   | Bantuan Pemda Kelas III Mandiri Aktif                                  | Per Orang       | 1.800        |
| 5  | 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                             |  |                 |              |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                             | Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kelas I                                   | Orang/<br>Bulan | 150.000      |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                             | Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II                                       | Orang/<br>Bulan | 100.000      |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                             | Iuran Jaminan Kesehatan Kelas III                                      | Orang/<br>Bulan | 42.000       |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi                                     | Bantuan Iuran Mandiri Kelas III aktif                                  | Orang/<br>Bulan | 2.800        |

| No | Kode Rekening     | Uraian Belanja/Komponen   | Spesifikasi                                    | Sstuan      | Harga Satuan |
|----|-------------------|---|--|-------------|--------------|
|    |                   | Non ASN   |  |             |              |
| 6  | 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                   |  |             |              |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                   | Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)                 | Orang/Bulan | 6.600        |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                   | Iuran JKK                                      | Orang/Bulan | 10.000       |
| 7  | 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   |  |             |              |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | Jaminan Kematian (JKM) Non ASN                 | Orang/Bulan | 8.250        |
|    |                   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | Iuran JKM                                      | Orang/Bulan | 6.800        |
| 8  | 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah  |  |             |              |
|    |                   | Asuransi Gedung Kantor  | Spesifikasi : Asuransi Gedung Kantor DPRD      | Paket       | 150.000.000  |
|    |                   | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Asuransi Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan | Spesifikasi : Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan | Paket       | 90.000.000   |
|    |                   | Asuransi Kendaraan  | Asuransi Kendaraan Roda 4                      | Tahun       | 450.000.000  |
|    |                   | Asuransi Kendaraan  | Asuransi Kendaraan Roda 4                      | Tahun       | 250.000.000  |
| 9  | 5.1.02.02.02.0009 | Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS                   |  |             |              |
|    |                   | Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS                   | Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS    | Orang/Kali  | 1.600.000    |

2.7 Satuan Biaya Barang dan Jasa BOK Puskesmas

| No | Kode Rekening     | Uraian Belanja/Komponen               | Spesifikasi                                    | Sstuan           | Harga Satuan |
|----|-------------------|---------------------------------------|--|------------------|--------------|
| 1  | 5.1.02.90.01.0001 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |  |                  |              |
|    |                   | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | Pengganti Transpor jejaring dalam Kecamatan    | Orang Kegiatan   | 80.000       |
|    |                   |                                       | Transpor Petugas Dalam Kecamatan               | Orang/ Kegiatan  | 100.000      |
|    |                   |                                       | Snack  | Kotak            | 8.000        |
|    |                   |                                       | Makan  | Bks              | 22.000       |
|    |                   |                                       | pembelian bahan PMT untuk demonstrasi          | Paket            | 750.000      |
|    |                   |                                       | BUMIL KEK                                      | Orang / Kegiatan | 21.500       |
|    |                   |                                       | BALITA dengan Permasalahan Gizi                | Orang / Kegiatan | 16.500       |
|    |                   |                                       | Transport calon pendonor darah dalam Kabupaten | Orang / Kegiatan | 100.000      |
|    |                   |                                       | Belanja cetak/penggandaan kegiatan (Foto Copy) | Lembar           | 350          |
|    |                   |                                       | Uang harian calon pendonor darah               | Orang / Kegiatan | 100.000      |
|    |                   |                                       | PERTALITE                                      | Ltr              | 10.000       |
|    |                   |                                       | DEXLITE  | Ltr              | 13.250       |
|    |                   |                                       | Pembayaran paket data                          | Paket            | 100.000      |
|    |                   |                                       | Pembayaran sistim Informasi Puskesmas (SIMPUS) | Bulan            | 1.000.000    |
|    |                   |                                       | Insentif petugas                               | Orang / Kegiatan | 100.000      |

2.8 Satuan Biaya Hadiah Perlombaan

| No | Kode Rekening     | Uraian Belanja/Komponen                            | Spesifikasi      | Sstuan | Harga Satuan |
|----|-------------------|--|------------------|--------|--------------|
| 1  | 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan            |                  |        |              |
|    |                   | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan) | Juara I          | Orang  | 500.000      |
|    |                   | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan) | Juara II         | Orang  | 350.000      |
|    |                   | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan) | Juara III        | Orang  | 250.000      |
|    |                   | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan) | Juara Harapan I  | Orang  | 200.000      |
|    |                   | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan) | Juara Harapan II | Orang  | 150.000      |

| No | Kode Rekening | Uraian Belanja/Komponen  | Spesifikasi       | Sstuan | Harga Satuan |
|----|---------------|--|-------------------|--------|--------------|
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Perorangan)                       | Juara Harapan III | Orang  | 100.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang ) | Juara I           | Regu   | 1.000.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang ) | Juara II          | Regu   | 800.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang ) | Juara III         | Regu   | 600.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang ) | Juara Harapan I   | Regu   | 400.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang ) | Juara Harapan II  | Regu   | 300.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota sampai 3 orang ) | Juara Harapan III | Regu   | 200.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang ) | Juara I           | Regu   | 1.300.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang ) | Juara II          | Regu   | 1.000.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang ) | Juara III         | Regu   | 800.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang ) | Juara Harapan I   | Regu   | 600.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang ) | Juara Harapan II  | Regu   | 500.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kecamatan – (Kelompok anggota diatas 3 orang ) | Juara Harapan III | Regu   | 200.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)                         | Juara I           | Orang  | 1.000.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)                         | Juara II          | Orang  | 800.000      |

| No | Kode Rekening | Uraian Belanja/Komponen   | Spesifikasi       | Sstuan | Harga Satuan |
|----|---------------|---|-------------------|--------|--------------|
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)                    | Juara III         | Orang  | 600.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)                    | Juara Harapan I   | Orang  | 400.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)                    | Juara Harapan II  | Orang  | 300.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Perorangan)                    | Juara Harapan III | Orang  | 200.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang | Juara I           | Regu   | 2.000.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang | Juara II          | Regu   | 1.600.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang | Juara III         | Regu   | 1.200.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang | Juara Harapan I   | Regu   | 800.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang | Juara Harapan II  | Regu   | 600.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota sampai 3 orang | Juara Harapan III | Regu   | 400.000      |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara I           | Regu   | 3.000.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara II          | Regu   | 2.500.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara III         | Regu   | 2.000.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara Harapan I   | Regu   | 1.500.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara Harapan II  | Regu   | 1.200.000    |

| No | Kode Rekening | Uraian Belanja/Komponen   | Spesifikasi                                 | Sstuan   | Harga Satuan |
|----|---------------|---|---|----------|--------------|
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara Harapan III                           | Regu     | 1.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan                           | Juara I                                     | Orang    | 5.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan                           | Juara II                                    | Orang    | 4.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan                           | Juara III                                   | Orang    | 3.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan                           | Harapan I                                   | Orang    | 2.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan                           | Harapan II                                  | Orang    | 1.500.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Perorangan                           | Harapan III                                 | Orang    | 1.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu                               | Juara I                                     | Regu     | 8.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu                               | Juara II                                    | Regu     | 7.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu                               | Juara III                                   | Regu     | 6.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu                               | Harapan I                                   | Regu     | 5.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu                               | Harapan II                                  | Regu     | 4.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara MTQ Tk. Kabupaten Beregu                               | Harapan III                                 | Regu     | 3.000.000    |
|    |               | Juara Lomba Camat Tingkat Kabupaten                                 | Juara I                                     | Regu     | 7.500.000    |
|    |               | Juara Lomba Camat Tingkat Kabupaten                                 | Juara II                                    | Regu     | 5.000.000    |
|    |               | Juara Lomba Camat Tingkat Kabupaten                                 | Juara III                                   | Regu     | 3.000.000    |
|    |               | Hadiah Perlombaan Tingkat Kabupaten (Kelompok)                      | Pemenang Utama Lomba Nagari Besih dan Sehat | Kelompok | 5.000.000    |
|    |               | Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten                                | Juara I Uda-Uni                             | Orang    | 3.000.000    |
|    |               | Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten                                | Juara II Uda-Uni                            | Orang    | 2.750.000    |
|    |               | Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten                                | Uda-Uni Duta Pendidikan                     | Orang    | 2.500.000    |
|    |               | Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten                                | Uda-Uni Duta Olahraga                       | Orang    | 2.250.000    |
|    |               | Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten                                | Uda-Uni Talenta                             | Orang    | 2.000.000    |
|    |               | Perlombaan Uda Uni Tingkat Kabupaten                                | Uda-Uni Favorite                            | Orang    | 1.750.000    |

| No | Kode Rekening | Uraian Belanja/Komponen                                   | Spesifikasi                            | Sstuan           | Harga Satuan |
|----|---------------|---|--|------------------|--------------|
|    |               | Juara Lomba Nagari Tingkat Kabupaten                      | Juara I                                | Regu             | 15.000.000   |
|    |               | Juara Lomba Nagari Tingkat Kabupaten                      | Juara II                               | Regu             | 7.500.000    |
|    |               | Juara Lomba Nagari Tingkat Kabupaten                      | Juara III                              | Regu             | 5.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara Sepak Bola Tingkat Kabupaten                 | juara I                                | Regu             | 8.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara Sepak Bola Tingkat Kabupaten                 | juara II                               | Regu             | 7.000.000    |
|    |               | Hadiah Juara Sepak Bola Tingkat Kabupaten                 | juara III                              | Regu             | 6.000.000    |
|    |               | Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2024 | Juara 1                                | Orang / Kegiatan | 35.000.000   |
|    |               | Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2024 | Juara 2                                | Orang / Kegiatan | 30.000.000   |
|    |               | Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2024 | Juara 3                                | Orang / Kegiatan | 25.000.000   |
|    |               | Bonus MTQ Ramadhan  | Juara 1 Perorangan                     | Orang / Kegiatan | 5.000.000    |
|    |               | Bonus MTQ Ramadhan  | Juara 2 Perorangan                     | Orang / Kegiatan | 4.000.000    |
|    |               | Bonus MTQ Ramadhan  | Juara 3 Perorangan                     | Orang / Kegiatan | 3.000.000    |
|    |               | Bonus MTQ Ramadhan  | Juara 1 beregu                         | Orang / Kegiatan | 1.000.000    |
|    |               | Bonus MTQ Ramadhan  | Juara 2 beregu                         | Orang / Kegiatan | 1.000.000    |
|    |               | Bonus MTQ Ramadhan  | Juara 3 beregu                         | Orang / Kegiatan | 1.000.000    |
|    |               | Tropy   | Tropy Juara 1 MTQ Ramadhan             | Buah             | 270.000      |
|    |               | Tropy   | Tropy Juara 2 MTQ Ramadhan             | Buah             | 160.000      |
|    |               | Tropy   | Tropy Juara 3 MTQ Ramadhan             | Buah             | 100.000      |
|    |               | piala   | tinggi 30cm, kaki kayu, atas aluminium | Bh               | 400.000      |
|    |               | Tropy   | Tropi 1 Kaki Ukuran Besar              | Buah             | 160.000      |
|    |               | Sepeda Gunung   | Sepeda Gunung Biasa                    | Unit             | 3.000.000    |
|    |               | Sepeda Listrik  | Sepeda Listrik                         | Unit             | 4.500.000    |
|    |               | Televisi  | Adroid 42 Inc                          | Unit             | 4.500.000    |
|    |               | Perlengkapan olahraga                                     | Tropy                                  | Buah             | 100.000      |

| No | Kode Rekening     | Uraian Belanja/Komponen  | Spesifikasi  | Sstuan   | Harga Satuan |
|----|-------------------|--|--|----------|--------------|
|    |                   | Hadiah Perlombaan Tingkat Provinsi Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara I  | Kelompok | 15.000.000   |
|    |                   | Hadiah Perlombaan Tingkat Provinsi Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara II   | Kelompok | 10.000.000   |
|    |                   | Hadiah Perlombaan Tingkat Provinsi Kelompok anggota diatas 3 orang | Juara III  | Kelompok | 5.000.000    |
|    |                   | Trophy   | Trophy perlombaan juara 1-4  | Paket    | 1.000.000    |
|    |                   | Piala set futsal   | Bahan metal, tinggi 1:56 cm, tinggi 2:61 cm, tinggi 3,47 cm              | Set      | 900.000      |
|    |                   | Tropy  | Bahan kuningan premium   | Buah     | 270.000      |
|    |                   | Kulkas   | Kulkas 1 Pintu Semi Automatic  | Unit     | 3.000.000    |
|    |                   | Mesin Cuci   | Body: Plastic, Kapasitas: 8 Kg, Mesin cuci 2 tabung                      | Unit     | 3.000.000    |
|    |                   | Medali   | Spesifikasi : Berat 1 gram Dimensi Ukuran 7x7x7cm (Berat volume: 0.06kg) | Pcs      | 68.000       |
| 2  | 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi                            |  |          |              |
|    |                   | Bonus Lomba Camat Tingkat Provinsi                                 | Juara I  | Regu     | 10.000.000   |
|    |                   | Bonus Lomba Camat Tingkat Provinsi                                 | Juara II   | Regu     | 7.500.000    |
|    |                   | Bonus Lomba Camat Tingkat Provinsi                                 | Juara III  | Regu     | 5.000.000    |
|    |                   | Bonus Lomba Nagari Tingkat Provinsi                                | Juara I  | Regu     | 20.000.000   |
|    |                   | Bonus Lomba Nagari Tingkat Provinsi                                | Juara II   | Regu     | 15.000.000   |
|    |                   | Bonus Lomba Nagari Tingkat Provinsi                                | Juara III  | Regu     | 10.000.000   |
|    |                   | Bonus Tingkat Provinsi   | Juara I  | Orang    | 15.000.000   |
|    |                   | Bonus Tingkat Provinsi   | Juara II   | Orang    | 10.000.000   |
|    |                   | Bonus Tingkat Provinsi   | Juara III  | Orang    | 7.500.000    |
|    |                   | Bonus MTQ Tingkat Provinsi   | Juara I  | Orang    | 35.000.000   |

| No | Kode Rekening | Uraian Belanja/Komponen    | Spesifikasi | Sstuan | Harga Satuan |
|----|---------------|----------------------------|-------------|--------|--------------|
|    |               | Bonus MTQ Tingkat Provinsi | Juara II    | Orang  | 30.000.000   |
|    |               | Bonus MTQ Tingkat Provinsi | Juara III   | Orang  | 25.000.000   |
|    |               | Bonus Tingkat Provinsi     | Juara I     | Regu   | 15.000.000   |
|    |               | Bonus Tingkat Provinsi     | Juara II    | Regu   | 10.000.000   |
|    |               | Bonus Tingkat Provinsi     | Juara III   | Regu   | 7.500.000    |
|    |               | Bonus MTQ Tingkat Provinsi | Juara I     | Regu   | 35.000.000   |
|    |               | Bonus MTQ Tingkat Provinsi | Juara II    | Regu   | 30.000.000   |
|    |               | Bonus MTQ Tingkat Provinsi | Juara III   | Regu   | 25.000.000   |

BUPATI DHARMASRYA,  
  
SULTAN RISKA



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN  
ANGGARAN 2025.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab penuh atas satuan biaya  
yang digunakan dalam kegiatan....., dimana harga pasar melebihi harga  
satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor .....  
Tahun .... tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran  
2024.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien,  
efektif dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana terlampir.

Demikianlah Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya.

Pulau Punjung, .....

Pejabat Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
Nip.....

BUPATI DHARMASRAYA



pLAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN  
 ANGGARAN 2025

Logo  
 Daerah

**KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke .....  
 Kode No .....  
 Nomor .....

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**  
**(S P P D)**

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| 1.  | Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran  |                          |
| 2.  | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas   |                          |
| 3.  | a. Pangkat dan Golongan<br>b. Jabatan/Instansi<br>c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas                   | a.<br>b.<br>c.           |
| 4.  | Maksud Perjalanan Dinas   |                          |
| 5.  | Alat Angkut Yang Dipergunakan   |                          |
| 6.  | a. Tempat Berangkat<br>b. Tempat Tujuan   | a.<br>b.                 |
| 7.  | a. Lamanya Perjalanan Dinas<br>b. Tanggal Berangkat<br>c. Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru*) | a.<br>b.<br>c.           |
| 8.  | Pengikut : Nama   | Tanggal Lahir Keterangan |
|     | 1<br>2<br>3   |                          |
| 9.  | Pembebanan Anggaran<br>a. Instansi<br>b. Mata Anggaran  | a.<br>b.                 |
| 10. | Keterangan Lain-lain  | c.                       |

\* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
 Tanggal.....  
 Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna  
 Anggaran

.....  
 NIP.....

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | I Berangkat dari : Pulau Punjung<br>(tempat kedudukan)<br>Ke :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala .....<br>Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan<br><br>.....<br>NIP : .....        |
| Mengetahui   |   |   |
| II   | Tiba di :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala :<br><br>.....<br>NIP : ..... | II Berangkat dari :<br>Ke :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala :<br><br>.....<br>NIP : .....   |
| Mengetahui   |   |   |
| III  | Tiba di :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala :<br><br>.....<br>NIP : ..... | III Berangkat dari :<br>Ke :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala :<br><br>.....<br>NIP : .....  |
| Mengetahui   |   |   |
| IV   | Tiba di :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala :<br><br>.....<br>NIP : ..... | IV Berangkat dari :<br>Ke :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala :<br><br>.....<br>NIP : .....   |
| V  | Tiba di :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala :<br><br>.....<br>NIP : ..... | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. |
| VI   | CATATAN LAIN-LAIN   |   |
| VII  | PERHATIAN :   |   |
| Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPPD, Pejabat/Pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah. Apabila negara menderita rugi akibat kesakahan, kelalaian dan kealpaanya. |   |   |

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA  
PENGUNA ANGGARAN

.....  
NIP. ....



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN  
ANGGARAN 2025

Logo  
Daerah

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

No. Kuitansi : .....

No. Rek :  
Tahun Anggaran :

**KUITANSI**

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu .....  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan dinas an. .... dalam rangka .....  
.....  
dengan rincian :  
1. Uang Harian : Rp.....  
2. Biaya Transfortasi : Rp.....  
3. Biaya Penginapan : Rp.....  
4. Uang Representasi Perjalanan : Rp.....  
5. Biaya Taksi : Rp.....

Biaya tersebut dibebankan kepada sub kegiatan .....

ttd

Menyetujui  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
Anggaran

Bendaharan Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Diketahui Oleh :  
PPTK

.....  
NIP.....



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN  
ANGGARAN 2025

Logo  
Daerah

**KOP NASKAH DINAS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..... tanggal.....  
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pejabat/pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
|    | Jumlah |        |

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui  
Pegguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Pelaksana SPPD

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN  
ANGGARAN 2025

Logo  
Daerah

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN DALAM PERJALANAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP/No. KTP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal....., saya mengalami keterlambatan dalam perjalanan menuju/dari Bandara..... akibat kemacetan lalu lintas yang tidak terduga.

Kemacetan tersebut terjadi di lokasi..... selama ... (.....) jam.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat diberikan 2 (dua) hari perjalanan dinas dalam mengantarkan/menjemput pejabat ke/dari Bandara.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui/Menyetujui  
Pegguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Pelaksana SPPD

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

